

A stylized map of Southeast Asia is overlaid on a dark brown background. The map shows the outlines of the region's countries, with some areas highlighted in a lighter brown color. The text "ASEAN SELAYANG PANDANG" is superimposed on the map.

ASEAN

SELAYANG PANDANG

ASEAN

SELAYANG PANDANG

DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA ASEAN
DEPARTEMEN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2007

Edisi Ke-1	- 1982
Edisi Ke-2	- 1983
Edisi Ke-3	- 1984
Edisi Ke-4	- 1985
Edisi Ke-5	- 1986
Edisi Ke-6	- 1987
Edisi Ke-7	- 1988
Edisi Ke-8	- 1990
Edisi Ke-8 (Cetak Ulang Pertama)	- 1990
Edisi Ke-8 (Cetak Ulang Kedua)	- 1990
Edisi Ke-8 (Cetak Ulang Ketiga)	- 1991
Edisi Ke-9	- 1992
Edisi Ke-10	- 1995
Edisi Ke-11	- 1996
Edisi Ke-12	- 1997
Edisi Ke-13	- 1998
Edisi Ke-14	- 1999
Edisi Ke-15	- 2000
Edisi Ke-16	- 2005
Edisi Ke-16 (Cetak Ulang)	- 2006
Edisi ke-17	- 2007

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh

Kerjasama internasional adalah elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri Indonesia. Melalui kerjasama-kerjasama internasional, Indonesia dapat memanfaatkan peluang-peluang untuk menunjang dan melaksanakan pembangunan nasionalnya. Kerjasama ASEAN memegang peran kunci dalam pelaksanaan kerjasama internasional Indonesia karena ASEAN merupakan lingkaran konsentris pertama kawasan terdekat Indonesia dan pilar utama pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

Tahun ini ASEAN genap berusia 40 tahun. Selama itu, telah banyak capaian-capaian yang telah diraih ASEAN dan sumbangsih yang diberikan ASEAN bagi negara-negara anggotanya. Salah satu capaian dan sumbangsih terpenting dari ASEAN adalah terciptanya perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Terciptanya perdamaian dan stabilitas di kawasan merupakan hal utama sehingga program pembangunan Indonesia dapat terus dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN terus mengalami peningkatan. Secara khusus, ASEAN telah membantu Indonesia dalam penanganan bencana Tsunami di Aceh, gempa bumi di Yogyakarta, proses perdamaian di Aceh, penanggulangan kebakaran hutan dan lain-lain.

Selama empat dekade keberadaannya, ASEAN telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan positif dan signifikan yang mengarah pada pendewasaan ASEAN. Kerjasama ASEAN kini menuju tahapan baru yang lebih integratif dan berwawasan ke depan dengan akan dibentuknya Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) pada tahun 2015. Hal ini diperkuat dengan akan disahkannya Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) yang secara khusus akan menjadi landasan hukum dan landasan jati diri ASEAN ke depannya.

Pembentukan Komunitas ASEAN diawali dengan komitmen para pemimpin ASEAN dengan ditandatanganinya *ASEAN Vision 2020* di Kuala Lumpur tahun 1997 yang mencita-citakan ASEAN sebagai suatu satuan komunitas yang berpandangan maju ke depan, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil dan makmur, dipersatukan oleh hubungan kemitraan dalam pembangunan yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli. Tekad untuk membentuk Komunitas ASEAN kemudian dipertegas lagi pada KTT ke-9 ASEAN di Bali pada tahun 2003 dengan ditandatanganinya *ASEAN Concord II*. *ASEAN Concord II* menegaskan bahwa ASEAN akan menjadi sebuah komunitas yang aman, damai, stabil, dan sejahtera pada tahun 2020.

Komitmen untuk mewujudkan komunitas ASEAN dipercepat dari tahun 2020 menjadi tahun 2015 dengan ditandatanganinya "*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*", pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu Filipina pada Januari 2007. Tujuan dari pembentukan Komunitas ASEAN adalah untuk lebih mempererat integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan konstelasi politik internasional. ASEAN menyadari sepenuhnya bahwa ASEAN perlu menyesuaikan cara pandangnya agar dapat lebih terbuka dalam menghadapi permasalahan-permasalahan internal dan eksternal.

Negara-negara ASEAN menyadari perlunya meningkatkan kekompakan, kohesivitas dan efektifitas kerjasama. Kerjasama-kerjasama dalam ASEAN tidak lagi hanya berfokus pada kerjasama-kerjasama ekonomi namun harus juga didukung oleh kerjasama lainnya di bidang keamanan dan sosial budaya. Untuk menjaga keseimbangan itu, pembentukan Komunitas ASEAN 2015 didasari atas 3 pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community*), Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*), dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community*).

Namun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi ASEAN. ASEAN harus dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan perkembangan pesat politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan pengetahuan dan bidang-bidang lainnya dari negara-negara di luar kawasan Asia Tenggara. ASEAN juga menyadari pentingnya lebih melibatkan masyarakat ASEAN sehingga tumbuh "rasa memiliki" (*we feeling*) terhadap ASEAN. ASEAN harus memfokuskan dirinya untuk dapat menjalin kerjasama-kerjasama yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat ASEAN. Dengan demikian, diharapkan ASEAN tidak lagi menjadi forum kerjasama para pejabat pemerintah negara-negara ASEAN atau kalangan elit tertentu, namun dapat menjadi milik seluruh masyarakat ASEAN (*people-centered organization*). Hal-hal tersebut merupakan tantangan yang membutuhkan tanggapan tepat dan cepat dan tentunya tidak mudah untuk dilaksanakan.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri, berkewajiban untuk memberikan informasi dan pemahaman mengenai perkembangan kerjasama ASEAN kepada masyarakat. Penyebarluasan informasi mengenai ASEAN dilakukan melalui penerbitan buku, penyelenggaraan seminar, ceramah, diskusi, ASEAN Festival, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat membantu memberikan pemahaman mengenai ASEAN kepada masyarakat.

Buku ASEAN Selayang Pandang yang ada di hadapan Anda merupakan edisi ke-17 yang telah mengalami revisi dan perubahan mengenai perkembangan terkini ASEAN. Saya berharap bahwa melalui buku ini akan didapatkan gambaran menyeluruh dan pemahaman yang cukup mengenai ASEAN. Diharapkan pula, informasi dalam buku ini dapat menggugah rasa kepemilikan kita terhadap ASEAN. Kepedulian dan keterlibatan masyarakat secara maksimal dalam ASEAN merupakan kunci utama keberhasilan kerjasama ASEAN dan terwujudnya Komunitas ASEAN. Saya yakin bahwa kawasan Asia

Tenggara yang aman, damai dan sejahtera akan membawa dampak positif bagi peningkatan stabilitas dan keamanan, taraf hidup masyarakat Indonesia serta kelangsungan pembangunan Indonesia di segala bidang. Selamat membaca. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh

Jakarta, Juli 2007

Ttd,

Dian Triansyah Djani, MA
Direktur Jenderal Kerjasama
ASEAN

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Pembentukan ASEAN	1
B. Tujuan dan Prinsip ASEAN	2
C. Keanggotaan ASEAN	3
D. Profil Negara-negara ASEAN	4
E. Struktur Organisasi ASEAN	14
F. Sekretariat ASEAN	23
G. Keuangan ASEAN	25
BAB II PERKEMBANGAN KERJASAMA ASEAN	
A. ASEAN Sebagai Suatu Komunitas	27
B. Kerjasama Terkait dengan Pilar Komunitas Keamanan ASEAN	28
C. Kerjasama Terkait dengan Pilar Komunitas Ekonomi ASEAN	41
D. Kerjasama Terkait dengan Pilar Komunitas Sosial Budaya ASEAN	81
E. Kerjasama ASEAN Dengan Mitra Wicara	105
F. Piagam ASEAN	135
BAB III INDONESIA DAN ASEAN MENUJU KOMUNITAS ASEAN	
A. Peran Indonesia dalam Pembentukan Komunitas ASEAN 2015.....	137
B. Pembentukan Komunitas ASEAN 2015	138
1. Komunitas Keamanan ASEAN	138
2. Komunitas Ekonomi ASEAN	142
3. Komunitas Sosial Budaya ASEAN	144
C. Hubungan Eksternal ASEAN	146

BAB IV KESIMPULAN 151

Lampiran :

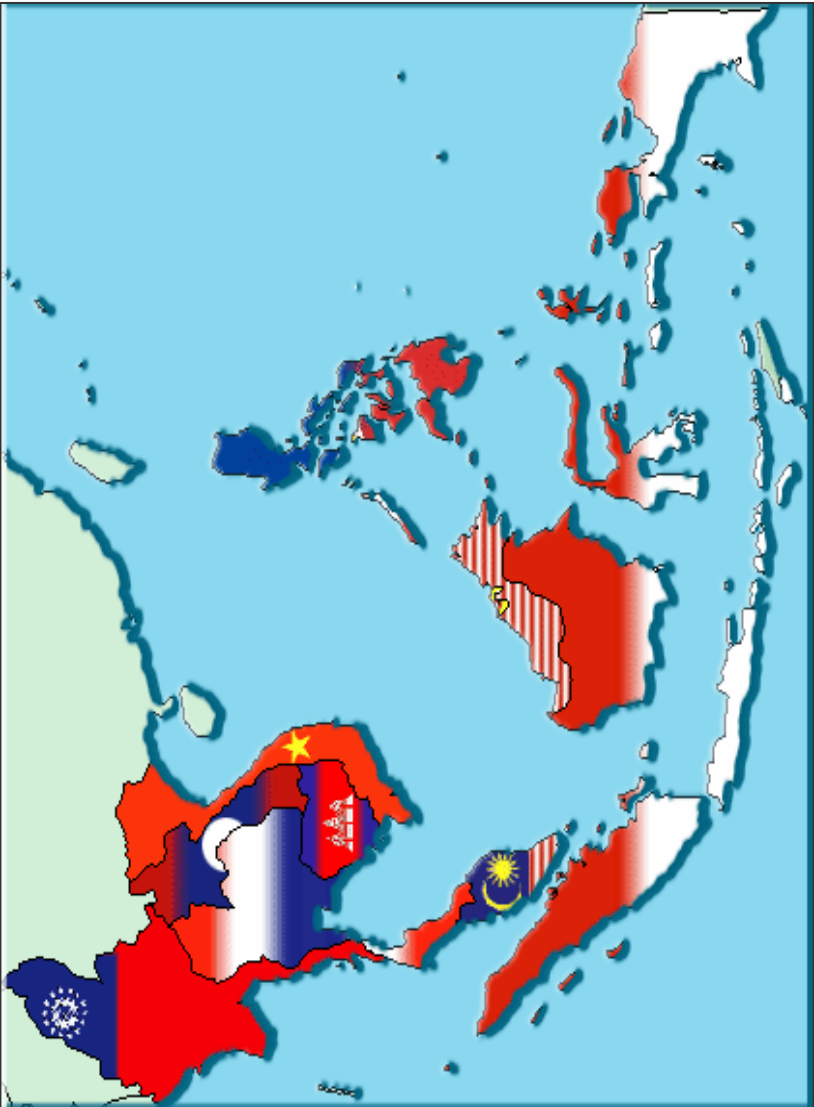
1. THE ASEAN DECLARATION
(BANGKOK DECLARATION) 159

2. DECLARATION OF ASEAN CONCORD 163

3. ASEAN VISION 2020 169

4. ASEAN CONCORD II 175

5. SINGKATAN 185



PETA ASEAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN ASEAN

Secara geopolitik dan geoekonomi, kawasan Asia Tenggara memiliki nilai yang sangat strategis. Hal tersebut tercermin dari adanya berbagai konflik di kawasan yang melibatkan kepentingan negara-negara besar pasca Perang Dunia II, sehingga Asia Tenggara pernah dijuluki sebagai “Balkan-nya Asia”. Persaingan antar negara adidaya dan kekuatan besar lainnya di kawasan antara lain terlihat dari terjadinya Perang Vietnam. Disamping itu, konflik kepentingan juga pernah terjadi diantara sesama negara-negara Asia Tenggara seperti “konfrontasi” antara Indonesia dan Malaysia, klaim teritorial antara Malaysia dan Filipina mengenai Sabah, serta berpisahnya Singapura dari Federasi Malaysia.

Dilatarbelakangi oleh hal itu, negara-negara Asia Tenggara menyadari perlunya dibentuk kerjasama untuk meredakan rasa saling curiga dan membangun rasa saling percaya, serta mendorong kerjasama pembangunan kawasan. Sebelum ASEAN terbentuk pada tahun 1967, negara-negara Asia Tenggara telah melakukan berbagai upaya untuk menggalang kerjasama regional baik yang bersifat intra maupun ekstra kawasan seperti *Association of Southeast Asia* (ASA), *Malaya, Philipina, Indonesia* (MAPHILINDO), *South East Asian Ministers of Education Organization* (SEAMEO), *South East Asia Treaty Organization* (SEATO) dan *Asia and Pacific Council* (ASPAC).

Dampak positif dari meredanya rasa saling curiga dan konflik di antara bangsa-bangsa di Asia Tenggara telah mendorong upaya pembentukan organisasi kerjasama kawasan. Pertemuan-pertemuan konsultatif yang dilakukan secara intensif antara para Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand menghasilkan rancangan *Joint Declaration*, yang mencakup kesadaran akan perlunya meningkatkan saling pengertian untuk hidup bertetangga secara baik serta membina kerjasama yang bermanfaat di antara negara-negara yang sudah terikat oleh pertalian sejarah dan budaya.

Upaya pembentukan organisasi kerjasama kawasan telah membuahkan hasil dengan ditandatanganinya Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Malaysia dan para Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand. Deklarasi tersebut menandai berdirinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of South East Asian Nations/ASEAN*). Masa awal pendirian ASEAN lebih diwarnai oleh upaya-upaya membangun rasa saling percaya (*confidence building*) antar negara anggota guna mengembangkan kerjasama regional yang bersifat kooperatif namun belum bersifat integratif.

B. TUJUAN DAN PRINSIP ASEAN

Tujuan dibentuknya ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah untuk :

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi;
4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik dan administrasi;
5. Bekerjasama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka;

6. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara;
7. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan serupa, dan untuk menjajagi segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara erat di antara mereka sendiri.

Prinsip utama dalam kerjasama ASEAN antara lain adalah persamaan kedudukan dalam keanggotaan (*equality*), tanpa mengurangi kedaulatan masing-masing negara anggota. Negara-negara anggota ASEAN sepenuhnya tetap memiliki kedaulatan ke dalam maupun ke luar (*sovereignty*). Sedangkan musyawarah (*consensus and consultation*), kepentingan bersama (*common interest*), dan saling membantu (*solidarity*) dengan semangat ASEAN merupakan ciri kerjasama ini.

C. KEANGGOTAAN ASEAN

Sesuai dengan Pasal 4 Deklarasi Bangkok, keanggotaan ASEAN terbuka bagi seluruh negara-negara Asia Tenggara dengan syarat negara-negara calon anggota dapat menyetujui dasar-dasar dan tujuan organisasi ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi ASEAN dan semua traktat/persetujuan yang telah dibuat ASEAN. Di samping itu, perlu adanya kesepakatan semua negara anggota ASEAN mengenai keanggotaan baru ASEAN.

Proses perluasan keanggotaan ASEAN hingga tercapainya ASEAN-10 adalah sebagai berikut :

1. Brunei Darussalam secara resmi diterima menjadi anggota ke-6 ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984, dalam Sidang Khusus Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta.
2. Vietnam diterima menjadi anggota ke-7 ASEAN dalam Pertemuan Para Menteri Luar Negeri (AMM) ke-28 pada tanggal 29 - 30 Juli 1995 di Bandar Seri Begawan.
3. Laos dan Myanmar diterima sebagai anggota penuh ASEAN melalui suatu upacara resmi pada tanggal 23 Juli 1997 dalam

rangkaian Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-30 di Subang Jaya, Malaysia, tanggal 23-28 Juli 1997.

4. Kamboja diterima sebagai anggota penuh ASEAN pada upacara penerimaan resmi di Hanoi tanggal 30 April 1999.

Dengan diterimanya Kamboja, maka cita-cita para pendiri ASEAN untuk mewujudkan ASEAN yang mencakup sepuluh negara Asia Tenggara (visi ASEAN-10) telah tercapai.

D. PROFIL NEGARA-NEGARA ASEAN

1. BRUNEI DARUSSALAM



Nama Resmi Negara : Brunei Darussalam
 Tanggal Kemerdekaan : 1 Januari 1984
 Bentuk Pemerintahan : Monarki Konstitusional

GEOGRAFI

Ibu Kota : Bandar Seri Begawan
 Luas Wilayah : 5.770 KM2
 Perbatasan : Laut China Selatan dan Malaysia

DEMOGRAFI

Jumlah Penduduk : 374.577 (Juli 2007 est.)
 Pertumbuhan Penduduk : 1,81 % (2007 est.)
 Kelompok Etnis : Melayu 67 %, China 15 %, lain-lain 18 %
 Agama : Islam (agama resmi) 67 %, Budha 13 %, Kristen 10 %, lain-lain 10 %

Bahasa : Melayu (bahasa resmi), Inggris, China

PEREKONOMIAN

Gross Domestic Product (GDP) : USD \$ 9.527 juta (2005)
 Pertumbuhan GDP : 0,4 % (2005)
 GDP Perkapita : USD \$ 25.744 (2005)

2. KAMBOJA



Nama Resmi Negara : Kingdom of Cambodia
 Tanggal Kemerdekaan : 9 Nopember 1953
 Bentuk Pemerintahan : Monarki Konstitusional

GEOGRAFI

Ibu Kota : Phnom Penh
 Luas Wilayah : 181.040 KM2
 Perbatasan : Teluk Thailand, Thailand, Laos, dan Vietnam

DEMOGRAFI

Jumlah Penduduk : 13.995.904 (Juli 2007 est.)
 Pertumbuhan Penduduk : 1,729 % (2007 est.)
 Kelompok Etnis : Khmer 90 %, Vietnam 5 %, China 1 %, lain 4 %
 Agama : Budha Theravada 95 %, lain-lain 5 %
 Bahasa : Khmer (bahasa resmi) 95 %, Prancis, Inggris

PEREKONOMIAN

<i>Gross Domestic Product (GDP)</i>	: USD \$ 5.523 juta (2005)
Pertumbuhan GDP	: 9,81 % (2005)
GDP Perkapita	: USD \$ 404 (2005)

3. INDONESIA



Nama Resmi Negara	: Republic of Indonesia
Tanggal Kemerdekaan	: 17 Agustus 1945
Bentuk Pemerintahan	: Republik

GEOGRAFI

Ibu Kota	: Jakarta
Luas Wilayah	: 1.919.440 KM2
Perbatasan	: Samudera India, Timor Leste, Australia, Papua New Guinea, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura

DEMOGRAFI

Jumlah Penduduk	: 234.693.997 (July 2007 est.)
Pertumbuhan Penduduk	: 1,213 % (2007 est.)
Kelompok Etnis	: Jawa 40,6 %, Sunda 15 %, Madura 3,3 %, Minangkabau 2,7 %, Betawi 2,4 %, Bugis 2,4 %, Banten 2 %, Banjar 1,7 %, lain-lain 29,9 %
Agama	: Islam 88 %, Kristen Protestant 5 %, Katholik 3 %, Hindu 2 %, Budha dan lainnya 1 %
Bahasa	: Bahasa Indonesia (bahasa resmi), Inggris, berbagai bahasa daerah

PEREKONOMIAN

<i>Gross Domestic Product (GDP)</i>	: USD \$ 280.265 juta (2005)
Pertumbuhan GDP	: 5,6 % (2005)
GDP Perkapita	: USD \$ 1.278 (2005)

4. LAOS



Nama Resmi Negara	: Lao People's Democratic Republic
Tanggal Kemerdekaan	: 19 Juli 1949
Bentuk Pemerintahan	: Republik Sosialis

GEOGRAFI

Ibu Kota	: Vientiane
Luas Wilayah	: 236.800 KM2
Perbatasan	: Myanmar, Kamboja, China, Thailand, dan Vietnam

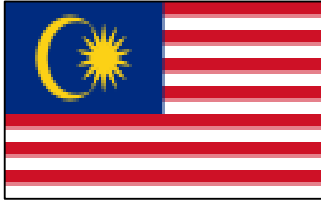
DEMOGRAFI

Jumlah Penduduk	: 6.521.998 (July 2007 est.)
Pertumbuhan Penduduk	: 2,37 % (2007 est.)
Kelompok Etnis	: Lao Loum 68 %, Lao Theung 22 %, Lao Soung (Hmong dan Yao) 9 %, Vietnam dan China 1 %
Agama	: Budha 65%, animisme 32,9%, Kristen 1,3%, lain-lain 0,8 %
Bahasa	: Lao (bahasa resmi), Prancis, Inggris

PEREKONOMIAN

<i>Gross Domestic Product (GDP)</i>	: USD \$ 2.860 juta (2005)
Pertumbuhan GDP	: 7,29 % (2005)
GDP Perkapita	: USD \$ 478 (2005)

5. MALAYSIA



Nama Resmi Negara : Malaysia
Tanggal Kemerdekaan : 31 Agustus 1957
Bentuk Pemerintahan : Monarki Konstitusional

GEOGRAFI

Ibu Kota : Kuala Lumpur
Luas Wilayah : 329.750 KM2
Perbatasan : Brunei Darussalam, Indonesia, Thailand, Singapura, dan Filipina

DEMOGRAFI

Jumlah Penduduk : 24.821.286 (July 2007 est.)
Pertumbuhan Penduduk : 1,759 % (2007 est.)
Kelompok Etnis : Melayu 62 %, China 24 %, India 8 %, lain-lain 6 %
Agama : Islam (60,4 %), Budha (19,2 %), Kristen (9,1 %), Hindu (6,3 %), Konfusianisme (2,6 %), lain-lain 2,4 %
Bahasa : Bahasa Melayu (bahasa resmi), China, Inggris, Tamil

PEREKONOMIAN

Gross Domestic Product (GDP) : USD \$ 130.784 juta (2005)
Pertumbuhan GDP : 5,16 % (2005)
GDP Perkapita : USD \$ 5.005 (2005)

6. MYANMAR



Nama Resmi Negara : Union of Burma
Tanggal Kemerdekaan : 4 Januari 1948
Bentuk Pemerintahan : Junta Militer

GEOGRAFI

Ibu Kota : Yangon
Luas Wilayah : 678.500 KM2
Perbatasan : Bangladesh, China, India, Laos, Thailand, Laut Andaman, dan Teluk Bengala

DEMOGRAFI

Jumlah Penduduk : 47.373.958 (Juli 2007 est.)
Pertumbuhan Penduduk : 0,815 % (2007 est.)
Kelompok Etnis : Burma 68 %, Shan 9 %, Karen 7 %, Rakhine 4 %, China 3 %, India 2 %, lain-lain 7 %
Agama : Budha 89 %, Kristen 4 %, Islam 4 %, lainnya 3 %
Bahasa : Burma (bahasa resmi), beberapa bahasa etnis minoritas

PEREKONOMIAN

Gross Domestic Product (GDP) : USD \$ 11.168 juta (2005)
Pertumbuhan GDP : 4,5 % (2005)
GDP Perkapita : USD \$ 199 (2005)

7. FILIPINA



Nama Resmi Negara : Republic of the Philippines
Tanggal Kemerdekaan : 4 Juli 1946
Bentuk Pemerintahan : Republik

GEOGRAFI

Ibu Kota : Manila
Luas Wilayah : 300.000 KM2
Perbatasan : Laut China Selatan, Laut Sulawesi, Laut Filipina, dan Laut Sulu

DEMOGRAFI

Jumlah Penduduk : 91.077.287 (Juli 2007 est.)
Pertumbuhan Penduduk : 1,764 % (2007 est.)
Kelompok Etnis : Tagalog 28,1 %, Cebuano 13,1 %, Ilocano 9 %, Bisaya/Binisaya 7,6 %, Hiligaynon Ilonggo 7,5 %, Bikol 6%, Waray 3,4 %, lain-lain 25,3 %
Agama : Katolik 81 %, Kristen 9 %, Muslim 5 %, lain-lain 5 %
Bahasa : Filipino/Tagalog (bahasa resmi) dan Inggris

PEREKONOMIAN

Gross Domestic Product (GDP) : USD \$ 98.407 juta (2005)
Pertumbuhan GDP : 4,97 % (2005)
GDP Perkapita : USD \$ 1.154 (2005)

8. SINGAPURA



Nama Resmi Negara : Republic of Singapore
Tanggal Kemerdekaan : 9 Agustus 1965
Bentuk Pemerintahan : Republik

GEOGRAFI

Ibu Kota : Singapore
Luas Wilayah : 300.000 KM2
Perbatasan : Malaysia dan Indonesia

DEMOGRAFI

Jumlah Penduduk : 4.553.009 (Juli 2007 est.)
Pertumbuhan Penduduk : 1,275 % (2007 est.)
Kelompok Etnis : China 76,8 %, Melayu 13,9 %, India 7,9 %, lain-lain 1,4 %
Agama : Budha 42,5 %, Islam 14,9 %, Taoist 8,5 %, Hindu 4 %, Katolik 4,8 %, Kristen 9,8 %, lain-lain 0,7%, tidak beragama 14,8 %
Bahasa : Mandarin (bahasa resmi), Inggris, Melayu, Tamil

PEREKONOMIAN

Gross Domestic Product (GDP) : USD \$ 116.639 juta (2005)
Pertumbuhan GDP : 6,89 % (2005)
GDP Perkapita : USD \$ 26.864 (2005)

9. THAILAND



Nama Resmi Negara : The Kingdom of Thailand
Tanggal Kemerdekaan : Tidak pernah dijajah
Bentuk Pemerintahan : Monarki Konstitusional

GEOGRAFI

Ibu Kota : Bangkok
Luas Wilayah : 514.000 KM2
Perbatasan : Laut Andaman, Teluk Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Malaysia

DEMOGRAFI

Jumlah Penduduk : 65.068.149 (Juli 2007 est.)
Pertumbuhan Penduduk : 0,663 % (2007 est.)
Kelompok Etnis : Thai 75 %, China 14 %, lain-lain 11 %
Agama : Budha 94,6 %, Islam 4,6 %, Kristen 0,7 %, lain-lain 0,1 %
Bahasa : Thai (bahasa resmi), Inggris

PEREKONOMIAN

Gross Domestic Product (GDP) : USD \$ 176.206 juta (2005)
Pertumbuhan GDP : 4,49 % (2005)
GDP Perkapita : USD \$ 2.524 (2005)

10. VIETNAM



Nama Resmi Negara : Socialist Republic of Vietnam
Tanggal Kemerdekaan : 2 September 1945
Bentuk Pemerintahan : Republik Sosialis

GEOGRAFI

Ibu Kota : Ha Noi
Luas Wilayah : 329.560 KM2
Perbatasan : Teluk Thailand, Teluk Tonkin, Laut China Selatan, China, Laos, dan Kamboja

DEMOGRAFI

Jumlah Penduduk : 85.262.356 (Juli 2007 est.)
Pertumbuhan Penduduk : 1,004 % (2007 est.)
Kelompok Etnis : Kinh (Viet) 86,2 %, Tay 1,9 %, Thai 1,7 %, Muong 1,5 %, Khome 1,4 %, Hoa 1,1 %, Nun 1,1 %, Hmong 1 %, lain-lain 4,1%
Agama : Budha 9,3 %, Katholik 6,7 %, Hoa Hao 1,5 %, Cao Dai 1,1 %, Protestant 0,5%, Islam 0,1 %, tidak beragama 80,8 %
Bahasa : Vietnam (bahasa resmi), Inggris, Prancis, China, Khmer

PEREKONOMIAN

Gross Domestic Product (GDP) : USD \$ 53.038 juta (2005)
Pertumbuhan GDP : 8,43 % (2005)
GDP Perkapita : USD \$ 555 (2005)

E. STRUKTUR ORGANISASI ASEAN

Berdasarkan Deklarasi Bangkok Struktur organisasi ASEAN, terdiri dari: Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting/AMM*); Sidang Panitia Tetap ASEAN (*ASEAN Standing Committee/ASC*) yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri negara yang menjadi Ketua ASC beranggotakan para Duta Besar negara anggota ASEAN yang ditempatkan di negara yang menjadi Ketua ASC; Komite-komite permanen dan komite-komite *ad-hoc*; dan Sekretariat Nasional di masing-masing negara anggota ASEAN.

Pada saat ini, struktur tersebut telah dikembangkan sesuai dengan tuntutan perkembangan kerjasama, dan telah mengalami beberapa perubahan, meliputi:

1. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN adalah pertemuan para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN yang mempunyai otoritas atau kekuasaan tertinggi di dalam ASEAN. KTT berfungsi sebagai penentu arah bagi kegiatan kerjasama ASEAN. Ada dua jenis KTT yang diselenggarakan oleh ASEAN, yaitu KTT formal dan informal.

Pada KTT Formal ASEAN ke-4 tahun 1992 di Singapura diputuskan untuk menyelenggarakan KTT setiap 3 tahun sekali, dimana di antara KTT formal tersebut diadakan KTT informal. Akan tetapi mengingat perkembangan kerjasama ASEAN yang semakin pesat, maka pada KTT Informal tahun 2000 di Singapura diputuskan bahwa KTT formal diadakan setiap tahun dengan meniadakan KTT informal.

ASEAN telah menyelenggarakan KTT sebagai berikut:

- a. KTT ke-1 ASEAN di Bali, Indonesia, 23-25 Pebruari 1976;
- b. KTT ke-2 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, 4-5 Agustus 1977;
- c. KTT ke-3 ASEAN di Manila, Filipina, 14-15 Desember 1987;
- d. KTT ke-4 ASEAN di Singapura, 27-28 Januari 1992;

- e. KTT ke-5 ASEAN di Bangkok, Thailand, 14-15 Desember 1995;
- f. KTT Informal ke-1 ASEAN di Jakarta, Indonesia, 30 Nopember 1996;
- g. KTT Informal ke-2 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, 14-16 Desember 1997;
- h. KTT ke-6 ASEAN di Hanoi, Vietnam, 15-16 Desember 1998;
- i. KTT Informal ke-3 ASEAN di Manila, Filipina, 27-28 Nopember 1999;
- j. KTT Informal ke-4 ASEAN di Singapura, 22-25 Nopember 2000;
- k. KTT ke-7 ASEAN di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 5-6 Nopember 2001;
- l. KTT ke-8 ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, 4-5 Nopember 2002;
- m. KTT ke-9 ASEAN di Bali, Indonesia, 7-8 Oktober 2003;
- n. KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Laos, 29-30 Nopember 2004;
- o. KTT ke-11 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, 12-14 Desember 2005; dan
- p. KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, 12-13 Januari 2007.

2. Sidang Para Menteri Luar Negeri ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting/AMM*)

Keputusan para Kepala Negara/Pemerintahan dalam KTT diimplementasikan melalui AMM. AMM mempunyai peran dan tanggung jawab untuk merumuskan garis kebijakan dan koordinasi kegiatan-kegiatan ASEAN yang telah diputuskan dalam KTT. Dalam situasi khusus, para Menteri Luar Negeri dapat mengadakan pertemuan lebih dari sekali dalam setahun. Pada KTT ke-3 ASEAN disetujui bahwa AMM dapat melibatkan menteri-menteri lainnya jika diperlukan.

3. Sidang Para Menteri Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Ministerial Meeting/AEM*)

AEM merupakan badan tertinggi dalam menentukan kebijakan kerjasama ekonomi ASEAN. AEM diadakan sekali dalam setahun selain AEM *Retreat* dan *Preparatory AEM* menjelang KTT. AEM

mulai dilembagakan sejak KTT ke-2 ASEAN. Pada KTT ke-4 ASEAN dibentuk Dewan ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) untuk mengawasi, melaksanakan koordinasi dan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan Skema Tarif Preferensi Efektif Bersama (*Common Effective Preferential Tariff/CEPT*) menuju Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN. Hasil AMM dan AEM disampaikan kepada KTT.

4. Sidang Menteri-Menteri Sektor ASEAN

Selain pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Ekonomi, diadakan pula beberapa pertemuan para Menteri sektoral, yaitu:

- a. Pertemuan menteri terkait dengan pilar Komunitas Keamanan ASEAN
 - i. Pertemuan para Menteri Pertahanan ASEAN (ASEAN *Defence Ministers' Meeting/ADMM*). ADMM didirikan pada tahun 2006 dan bertemu setahun sekali ;
 - ii. Pertemuan para Menteri Hukum ASEAN (ASEAN *Law Ministers' Meeting/ALAWMM*). ALAWMM didirikan pada tahun 1986 dan bertemu sekali setiap 36 bulan ;
 - iii. Pertemuan para Menteri terkait dengan Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara ASEAN (ASEAN *Ministerial Meeting on Transnational Crime/AMMTC*). AMMTC didirikan pada tahun 1997 dan bertemu sekali setiap 2 tahun.
- b. Pertemuan menteri terkait dengan pilar Komunitas Ekonomi ASEAN
 - i. Pertemuan Dewan ASEAN *Free Trade Area* (AFTA *Council*). AFTA *Council* didirikan pada tahun 1992 dan mengadakan pertemuan setiap tahun;
 - ii. Pertemuan Dewan ASEAN *Investment Area* (AIA

Council). AIA *Council* didirikan pada tahun 1998 dan mengadakan pertemuan setiap tahun;

- iii. Pertemuan para Menteri Pertanian dan Kehutanan (ASEAN *Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry/AMAF*). AMAF didirikan pada tahun 1979 dan mengadakan pertemuan setiap tahun;
- iv. Pertemuan para Menteri Energi ASEAN (ASEAN *Ministers on Energy Meeting/AMEM*). AMEM didirikan pada tahun 1980 dan mengadakan pertemuan setiap tahun;
- v. Pertemuan para Menteri Keuangan ASEAN (ASEAN *Finance Ministers' Meeting/ AFMM*). AFMM didirikan pada tahun 1997 dan mengadakan pertemuan setiap tahun;
- vi. Pertemuan tahunan para Menteri terkait dengan Kerjasama Pembangunan Lembah Mekong (ASEAN *Mekong Basin Development Cooperation/AMBDC*). AMBDC didirikan pada tahun 1996 dan mengadakan pertemuan setiap tahun;
- vii. Pertemuan para Menteri Mineral ASEAN (ASEAN *Ministerial Meeting on Minerals/AMMin*). AMMin didirikan pada tahun 2005 dan mengadakan pertemuan sedikitnya sekali dalam 3 tahun;
- viii. Pertemuan para Menteri Telekomunikasi dan Teknologi Informasi ASEAN (ASEAN *Telecommunications and Information Technology Ministers' Meeting/ TELMIN*). TELMIN didirikan pada tahun 2001 dan mengadakan pertemuan setiap tahun;
- ix. Pertemuan para Menteri Perhubungan ASEAN (ASEAN *Transport Ministers' Meeting/ATM*). ATM didirikan pada tahun 1996 dan mengadakan pertemuan setiap tahun; dan
- x. Pertemuan para Menteri Pariwisata ASEAN (ASEAN *Tourism Ministers' Meeting/M-ATM*). M-ATM didirikan pada tahun 1998 dan mengadakan pertemuan setiap tahun.

c. Pertemuan menteri terkait dengan pilar Komunitas Sosial Budaya ASEAN

- i. Pertemuan para Menteri terkait dengan Kebudayaan dan Kesenian ASEAN (*ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts/AMCA*). AMCA didirikan pada tahun 2003 dan mengadakan pertemuan sekali setiap 2 tahun;
- ii. Pertemuan para Menteri terkait dengan Penanggulangan Bencana ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management/AMMDM*). AMMDM didirikan pada tahun 2004 dan mengadakan pertemuan bila diperlukan;
- iii. Pertemuan para Menteri Pendidikan ASEAN (*ASEAN Education Ministers Meeting/ASED*). ASED didirikan pada tahun 2006 dan mengadakan pertemuan setiap tahun;
- iv. Pertemuan tahunan para Menteri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology/AMMST*). AMMST didirikan pada tahun 1980 dan mengadakan pertemuan setiap tahun;
- v. Pertemuan para Menteri Lingkungan Hidup ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting on the Environment/AMME*). AMME didirikan pada tahun 1981 dan mengadakan pertemuan sekali setiap 3 tahun, dengan pertemuan informal setiap tahun diantara pertemuan formalnya;
- vi. Pertemuan para Menteri ASEAN terkait dengan Penanganan Asap (*ASEAN Ministerial Meeting on Haze/AMMH*). AMMH didirikan pada tahun 1997 dan mengadakan pertemuan jika diperlukan;
- vii. Pertemuan para Menteri Kesehatan ASEAN (*ASEAN Health Ministers Meeting/ AHMM*). AHMM didirikan pada tahun 1980 dan mengadakan pertemuan sekali setiap 2 tahun;
- viii. Pertemuan para Menteri ASEAN terkait dengan Informasi

(*ASEAN Ministers Responsible for Information/AMRI*). AMRI didirikan pada tahun 1989 dan mengadakan pertemuan sekali setiap 18 bulan;

- ix. Pertemuan para Menteri Ketenagakerjaan ASEAN (*ASEAN Labour Ministers Meeting/ALMM*). ALMM didirikan pada tahun 1975 dan mengadakan pertemuan sekali setiap 2 tahun setelah tahun 2004;
- x. Pertemuan para Menteri ASEAN terkait dengan Kesejahteraan dan Pembangunan Sosial (*ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development/AMMSWD*). AMMSWD didirikan pada tahun 1979 dan mengadakan pertemuan sekali setiap 3 tahun;
- xi. Pertemuan para Menteri ASEAN terkait dengan Pembangunan Pedesaan dan Pengentasan Kemiskinan (*ASEAN Ministers Meeting on Rural Development and Poverty Eradication/AMRDPE*). AMRDPE didirikan pada tahun 1997 dan mengadakan pertemuan sekali setiap 2 tahun; dan
- xii. Pertemuan para Menteri Kepemudaan ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting on Youth/AMMY*). AMMY didirikan pada tahun 1992 dan mengadakan pertemuan sekali setiap 3 tahun.

5. Panitia Tetap ASEAN (*ASEAN Standing Committee/ASC*)

ASC bertanggung jawab kepada AMM dan melaksanakan kegiatan diantara 2 AMM. Saat ini, ASC diketuai oleh Menteri Luar Negeri negara yang menjadi Ketua ASC dan beranggotakan Sekretaris Jenderal ASEAN dan para Direktur Jenderal Sekretariat Nasional ASEAN. Dalam mekanisme kerjasama ASEAN, Panitia Tetap ASEAN (*ASEAN Standing Committee/ASC*) merupakan mekanisme koordinasi umum dari semua kegiatan ASEAN.

Sesuai dengan Deklarasi Bangkok, ASC pada awalnya terdiri dari para Duta Besar di negara tuan rumah ASC dan diketuai oleh Menteri Luar Negeri negara tuan rumah AMM. Pada tahun 1976, para Direktur Jenderal dari Sekretariat-sekretariat Nasional ASEAN diikutsertakan dalam komposisi ASC. Untuk meningkatkan efektifitas badan tersebut, KTT ke-4 ASEAN di Singapura tahun 1992 menetapkan komposisi ASC terdiri atas Sekretaris Jenderal ASEAN dan para Direktur Jenderal Sekretariat-sekretariat Nasional ASEAN, serta diketuai oleh Menteri Luar Negeri negara anggota yang akan menjadi tuan rumah AMM. ASC mengawasi seluruh kegiatan dari komite-komite fungsional, hubungan eksternal, termasuk perkembangan kerja sama dan operasional Sekretariat ASEAN.

Dalam setahun biasanya diselenggarakan Sidang ASC sebanyak 4-6 kali, dimana sidang pertama dan terakhir diselenggarakan di negara tuan rumah AMM dan Sidang ASC lainnya diselenggarakan di Sekretariat ASEAN, Jakarta. Sesuai dengan ketentuan alfabetis (dalam bahasa Inggris), Filipina mendapat giliran sebagai ketua ASEAN untuk periode 2006-2007.

6. Sidang Para Pejabat Tinggi Kementerian Luar Negeri ASEAN (ASEAN Senior Officials Meeting/ASEAN SOM)

ASEAN SOM secara resmi dilembagakan sebagai bagian dari mekanisme ASEAN pada KTT ke-3 ASEAN dan bertanggung jawab untuk menangani kerjasama di bidang politik dan keamanan. SOM diselenggarakan bila diperlukan dan bertanggung jawab kepada AMM.

7. Sidang para Pejabat Tinggi Ekonomi ASEAN (ASEAN Senior Economic Officials Meeting/SEOM)

SEOM secara resmi dibentuk sebagai bagian dari mekanisme ASEAN juga pada KTT ke-3 ASEAN di Manila. Pada KTT ke-4 ASEAN disetujui bahwa lima komite ekonomi yang ada dibubarkan, dan diambil alih oleh SEOM. SEOM dapat membentuk kelompok-kelompok kerja (*working groups*) sesuai

kebutuhannya. SEOM bertemu secara reguler dan bertanggung jawab kepada AEM.

8. Sidang Para Pejabat Tinggi ASEAN Bidang Lainnya

Selain itu, terdapat pula sidang para pejabat tinggi ASEAN lainnya yang terkait dengan badan sektoral masing-masing antara lain: ASEAN *Defence Senior Officials Meeting* (ADSOM), ASEAN *Senior Law Officials' Meeting* (ASLOM), *Senior Transport Officials' Meeting* (STOM), *Telecommunication Senior Officials' Meeting* (TELSOM), *Senior Officials Meeting on Youth* (SOMY), dan *Senior Officials' Meeting on Education* (SOMED).

9. Sidang Konsultasi Gabungan

Sidang Konsultasi Gabungan (*Joint Consultative Meeting/JCM*) dibentuk pada KTT ke-3 ASEAN di Manila, meliputi Sekretaris Jenderal ASEAN, SOM, SEOM dan para Direktur Jenderal ASEAN. Sidang diselenggarakan apabila diperlukan, dipimpin oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, dan untuk keperluan koordinasi lintas sektoral pada tingkat pejabat-pejabat pemerintah. Sekretaris Jenderal melaporkan hasil JCM secara langsung kepada AMM dan AEM.

10. Sidang ASEAN dengan para Mitra Wicara

Dalam pelaksanaan kerjasama ASEAN dengan negara-negara Mitra Wicara (*Dialogue Partner*), setiap anggota diberi tanggung jawab sebagai koordinator dalam hubungan kerjasama dengan salah satu negara Mitra Wicara. Sesuai keputusan AMM ke-18 di Kuala Lumpur, negara koordinator ditetapkan secara bergantian setiap tiga tahun dengan urutan alfabetis.

Jabatan koordinator untuk kerjasama ASEAN dengan para Mitra Wicara periode Juli 2006-2009 adalah sebagai berikut:

- a. Brunei Darussalam, koordinator ASEAN-China;

- b. Kamboja, koordinator ASEAN-Uni Eropa;
- c. Indonesia, koordinator ASEAN-India;
- d. Laos, koordinator ASEAN-Jepang;
- e. Malaysia, koordinator ASEAN-Korea Selatan;
- f. Myanmar, koordinator ASEAN-Selandia Baru;
- g. Filipina, koordinator ASEAN-Rusia ;
- h. Singapura, koordinator ASEAN-Amerika Serikat;
- i. Thailand, koordinator ASEAN-Australia; dan
- j. Vietnam, koordinator ASEAN-Kanada.

Khusus dalam hubungan antara ASEAN dengan UNDP ditetapkan Sekretariat ASEAN sebagai koordinator tetap. Selain itu, ASEAN juga memiliki satu negara Mitra Dialog sektoral yaitu Pakistan. Dalam hal ini Sekretariat ASEAN bertindak sebagai koordinator.

11. Komite-komite ASEAN di Negara Ketiga

Disamping pembentukan negara koordinator dialog, dalam pelaksanaan kerjasama dengan negara ketiga, ASEAN juga membentuk komite-komite di setiap negara Mitra Wicara, yang berfungsi sebagai penghubung kegiatan dialog ASEAN.

Komite-komite ASEAN di negara/organisasi Mitra Wicara ASEAN beranggotakan para Duta Besar negara-negara ASEAN di negara akreditasi sebagai berikut:

- a. ASEAN *Brussels Committee* (ABC);
- b. ASEAN *Canberra Committee* (ACC);
- c. ASEAN *Committee in Beijing* (ACB);
- d. ASEAN *Committee in Moscow* (ACM);
- e. ASEAN *Committee in Seoul* (ACS);
- f. ASEAN *Committee in Tokyo* (ACT);
- g. ASEAN *Committee in Wellington* (ACW);
- h. ASEAN *Geneva Committee* (AGC);
- i. ASEAN *Islamabad Committee* (AIC);
- j. ASEAN *London Committee* (ALC);
- k. ASEAN *New Delhi Committee* (ANDC);
- l. ASEAN *New York Committee* (ANYC)
- m. ASEAN *Ottawa Committee* (AOC);

- n. ASEAN *Paris Committee* (APC); dan
- o. ASEAN *Washington Committee* (AWC).

12. Sekretariat Nasional ASEAN (Setnas ASEAN)

Dalam Deklarasi Bangkok dinyatakan bahwa untuk melaksanakan maksud dan tujuan ASEAN dibentuk Sekretariat Nasional ASEAN di setiap negara anggota. Setnas ASEAN bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan ASEAN atas nama negara masing-masing dan melayani Sidang Tahunan atau Sidang Khusus Para Menteri Luar Negeri, Sidang-sidang Panitia Tetap dan komite-komite ASEAN.

Sekretariat Nasional ASEAN dalam perkembangannya mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di ASEAN. Untuk Indonesia, perubahan terakhir terjadi melalui Keppres No. 138 Tahun 1998 tanggal 9 September 1998, dimana Direktorat Jenderal Sekretariat Nasional ASEAN diubah menjadi Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN.

F. SEKRETARIAT ASEAN

Dalam dasawarsa pertama sejak berdirinya ASEAN, meningkatnya program kerjasama telah mendorong didirikannya sebuah sekretariat bersama. Sekretariat ini berfungsi untuk membantu negara-negara anggota ASEAN dalam mengelola dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan ASEAN serta melakukan kajian-kajian yang dibutuhkan.

Pada KTT ke-1 ASEAN di Bali, tahun 1976, para Menteri Luar Negeri ASEAN menandatangani *Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat*. Sekretariat ASEAN berfungsi sejak tanggal 7 Juni 1976, dikepalai oleh seorang Sekretaris Jenderal, dan berkedudukan di Jakarta. Semula bertempat di Departemen Luar Negeri Republik Indonesia hingga diselesaikannya pembangunan gedung Sekretariat ASEAN di Jakarta, tahun 1981.

Pada awalnya, Sekretariat ASEAN berfungsi sebagai badan administratif yang membantu koordinasi kegiatan ASEAN dan menyediakan jalur komunikasi antara negara-negara anggota ASEAN, berbagai badan dan komite dalam ASEAN, serta antara ASEAN dengan negara-negara (Mitra Wicara ASEAN) maupun organisasi lainnya.

Selanjutnya, untuk memperkuat Sekretariat ASEAN, para Menteri Luar Negeri ASEAN mengamandemen *Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat* melalui sebuah protokol di Manila, tahun 1992. Protokol tersebut menaikkan status Sekretaris Jenderal ASEAN sebagai pejabat setingkat menteri dan memberikan mandat tambahan untuk memprakarsai, memberikan nasihat, melakukan koordinasi, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ASEAN. Sekretaris Jenderal ASEAN ditunjuk untuk jangka waktu 5 tahun dan bertanggung jawab kepada KTT ASEAN, AMM, dan membantu ASC.

Mengingat makin luasnya lingkup tugas Sekretariat ASEAN, Protokol tersebut juga menambah jumlah pos jabatan Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN yang semula 1 menjadi 2 orang Wakil untuk membantu kerja Sekretaris Jenderal. Selain itu, di tahun-tahun selanjutnya jumlah staf Sekretariat ASEAN juga ditambah secara signifikan, dan dilakukan melalui perekrutan terbuka.

Berikut adalah nama-nama Sekretaris Jenderal ASEAN hingga saat ini:

1. Hartono Dharsono (Indonesia), 7 Juni 1976 - 18 Pebruari 1978;
2. Umarjadi Notowijono (Indonesia), 19 Pebruari 1978 - 30 Juni 1978;
3. Datuk Ali Bin Abdullah (Malaysia), 10 Juli 1978 - 30 Juni 1980;
4. Narciso G. Reyes (Filipina), 1 Juli 1980 - 1 Juli 1982;
5. Chan Kai Yau (Singapura), 18 Juli 1982 - 15 Juli 1984;
6. Phan Wannamethee (Thailand), 16 Juli 1984 - 15 Juli 1986;
7. Roderick Yong (Brunei Darussalam), 16 Juli 1986 - 16 Juli 1989;
8. Rusli Noor (Indonesia), 17 Juli 1989 - 1 Januari 1993;
9. Datuk Ajit Singh (Malaysia), 1 Januari 1993 - 31 Desember 1997;
10. Rodolfo C. Severino (Filipina), 1 Januari 1998 - 31 Desember 2002; dan
11. Ong Keng Yong (Singapura), 1 Januari 2003 – saat ini.

Dalam rangka menyongsong era globalisasi khususnya di bidang informasi, Sekretariat ASEAN menyediakan jaringan informasi ASEAN atau ASEANWEB yang dapat diakses melalui internet dengan alamat <http://www.aseansec.org>. ASEANWEB dimaksudkan untuk menyediakan informasi mengenai berbagai hal yang menyangkut ASEAN bagi masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, juga untuk lebih memperkenalkan ASEAN kepada masyarakat luas, baik di dalam maupun di luar lingkungan ASEAN.

G. KEUANGAN ASEAN

Sidang ASEAN *Budget Committee* merupakan agenda tahunan ASEAN untuk membahas anggaran operasional Sekretariat ASEAN (ASEAN *Secretariat*) yang berkedudukan di Jakarta. Sidang telah terselenggara sebanyak 29 kali pertemuan. Sidang diketuai secara bergiliran oleh wakil dari masing-masing negara anggota ASEAN, dan dihadiri oleh seluruh delegasi negara-negara anggota ASEAN serta ASEAN *Secretariat*.

Sidang ASEAN *Budget Committee* membahas berbagai masalah anggaran operasional Sekretariat ASEAN yang meliputi penyesuaian kenaikan anggaran dengan kenaikan barang dan jasa, disamping jumlah kegiatan ASEAN yang semakin meningkat dan diikuti oleh meningkatnya biaya perjalanan dan penyelenggaraan pertemuan.

Meskipun anggaran rutin tahunan ASEAN selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun ASEAN *Secretariat* sering menghadapi permasalahan dilematis berkaitan dengan defisit anggaran yang selalu terjadi setiap akhir tahun anggaran. Hal tersebut tidak sepenuhnya merupakan kelemahan perencanaan kegiatan oleh Sekretariat ASEAN, tetapi dipengaruhi juga oleh banyaknya pertemuan-pertemuan ASEAN yang tidak terprogram sebelumnya.

ASEAN *Fund* dibentuk pada 17 Desember 1969 oleh 5 (lima) negara pendiri ASEAN sebagai salah satu bentuk kerja sama ekonomi untuk mendukung pelaksanaan tujuan pembentukan ASEAN. Kewajiban setiap anggota adalah membayar kontribusi ASEAN *Fund* yang ditetapkan sebesar US\$ 1 juta. Penggunaannya dibedakan antara penggunaan untuk operasional Sekretariat ASEAN dan untuk tujuan sektoralnya.



Penandatanganan Deklarasi ASEAN (Bangkok Declaration), 8 Agustus 1967

Sedangkan ASEAN *Cultural Fund* dibentuk tahun 1978 untuk mendukung kegiatan ASEAN dalam pelestarian warisan budaya dari anggota-anggota ASEAN. ASEAN *Cultural Fund* berasal dari kontribusi negara-negara ASEAN, Mitra Wicara, badan internasional maupun organisasi lainnya yang penggunaannya dibedakan antara *Capital Fund* dan untuk operasional Sekretariat ASEAN.

Pada Juli 1984 ditandatangani *Agreement for the Establishment of a Fund for ASEAN* oleh 6 negara, setelah Brunei Darussalam bergabung pada 1984. Selanjutnya berturut-turut bergabung Vietnam setelah diterima menjadi anggota ASEAN pada 1985, Myanmar dan Laos pada 1987 dan Kamboja pada 1999.

Melalui ASEAN *Fund* yang bertujuan membiayai berbagai proyek dari hasil bunga kontribusi negara anggota ASEAN yang terkumpul sebagai dana abadi (*endowment fund*), maka disepakati untuk merubah ASEAN *Fund* menjadi ASEAN *Development Fund* (ADF), yang telah disetujui oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN pada pertemuan informal AMM di New York, 28 September 2004 dan para pemimpin ASEAN dalam KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, 29 Nopember 2004.

BAB II

PERKEMBANGAN KERJASAMA ASEAN

A. ASEAN SEBAGAI SEBUAH KOMUNITAS

Sejalan dengan perkembangan konstelasi global, ASEAN pun mengalami perkembangan pesat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada awal berdirinya, ASEAN mencurahkan sebagian besar perhatiannya untuk membangun rasa saling percaya (*confidence building measures*), itikad baik dan mengembangkan kebiasaan untuk bekerjasama secara terbuka dan dinamis diantara sesama anggotanya. Menjelang usianya yang ke-40, ASEAN telah mencapai tingkat kohesivitas dan memiliki rasa saling percaya yang cukup tinggi diantara para anggotanya serta mulai menyentuh kerjasama di bidang-bidang yang sebelumnya dianggap sensitif.

Perkembangan ASEAN yang pesat tersebut tidak terlepas dari pengaruh lingkungan baik di dalam maupun luar kawasan yang turut membentuk dan memperkaya pola-pola kerjasama diantara negara anggota ASEAN. Pengalaman kawasan Asia Tenggara semasa krisis keuangan dan ekonomi pada tahun 1997–1998 memicu kesadaran ASEAN mengenai pentingnya peningkatan dan penguatan kerjasama intra kawasan. Pentingnya peningkatan dan penguatan kerjasama dipicu pula oleh munculnya isu-isu dan peristiwa global seperti masalah terorisme, lingkungan hidup, meningkatnya situasi persaingan dan ketegangan diantara negara-negara besar di kawasan, isu persenjataan nuklir dan sebagainya.

Perkembangan ASEAN memasuki babak baru dengan diadopsinya Visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpur tahun 1997 yang mencita-citakan ASEAN sebagai komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020. Selanjutnya ASEAN juga mengadopsi *Bali Concord II* pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yang menyetujui pembentukan Komunitas ASEAN (ASEAN *Community*). Pembentukan Komunitas ASEAN ini

merupakan bagian dari upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasi ASEAN. Selain itu, juga merupakan upaya evolutif ASEAN untuk menyesuaikan cara pandang agar dapat lebih terbuka dalam membahas permasalahan domestik yang berdampak kepada kawasan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama ASEAN yaitu saling menghormati (*mutual respect*), tidak mencampuri urusan dalam negeri (*non-interference*), konsensus, dialog dan konsultasi.

Komunitas ASEAN terdiri atas 3 (tiga) pilar yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community/ASC*), Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*) dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC*). Indonesia menjadi penggagas pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN dan memainkan peran penting dalam perumusan dua pilar lainnya.

Pada saat berlangsungnya KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Laos, tahun 2004, konsep Komunitas ASEAN mengalami kemajuan dengan disetujuinya tiga Rencana Aksi (*Plan of Action/PoA*) untuk masing-masing pilar yang merupakan program jangka panjang untuk merealisasikan konsep Komunitas ASEAN. KTT ke-10 ASEAN juga mengintegrasikan ketiga Rencana Aksi Komunitas ASEAN ke dalam *Vientiane Action Programme* (VAP) sebagai landasan program jangka pendek–menengah untuk periode 2004-2010.

Pencapaian Komunitas ASEAN semakin kuat dengan ditandatanganinya “*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*” oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, 13 Januari 2007. Dengan ditandatanganinya deklarasi ini, para Pemimpin ASEAN menyepakati percepatan pembentukan Komunitas ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 2015.

B. KERJASAMA TERKAIT DENGAN PILAR KOMUNITAS KEAMANAN ASEAN

Selama 40 tahun pendiriannya, ASEAN telah berhasil

mengembangkan dan mempertahankan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, serta menumbuhkan saling percaya di antara sesama anggotanya dan para Mitra Wicara ASEAN. ASEAN juga telah berkontribusi kepada keamanan dan kestabilan kawasan secara lebih luas di Asia Pasifik melalui Forum Regional ASEAN (*ASEAN Regional Forum/ARF*) sejak 1994. ARF mewadahi dialog dan pertukaran informasi mengenai masalah-masalah keamanan di Asia Pasifik.

Walaupun terdapat keberagaman kondisi politik, ekonomi, dan kultural di antara negara-negara anggotanya, ASEAN telah menumbuhkan tujuan dan arah kerjasama, khususnya dalam mempercepat integrasi kawasan. Hal ini terlihat semakin jelas dengan disepakatinya Visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpur, tahun 1997, dan Deklarasi Bali *Concord II* di Bali, tahun 2003 mengenai upaya perwujudan Komunitas ASEAN dengan ketiga pilarnya (politik-keamanan, ekonomi, dan sosial budaya).

1. Komunitas Keamanan ASEAN

Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community/ASC*), ditujukan untuk mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasan, termasuk dengan masyarakat internasional. Komunitas Keamanan ASEAN bersifat terbuka, berdasarkan pendekatan keamanan komprehensif, dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu pakta pertahanan / aliansi militer, maupun kebijakan luar negeri bersama (*common foreign policy*). Komunitas Keamanan ASEAN juga mengacu kepada berbagai instrumen politik ASEAN yang telah ada seperti *Zone Of Peace, Freedom And Neutrality* (ZOPFAN), *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC), dan *Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone* (SEANWFZ) selain menaati Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional terkait lainnya.

Indonesia, selaku pemrakarsa Komunitas Keamanan ASEAN, memelopori penyusunan Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN, yang disahkan pada KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Lao

PDR, Nopember 2004. Dalam Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN, telah ditetapkan rencana kegiatan untuk mewujudkan Komunitas Keamanan ASEAN yang terdiri atas 6 komponen: *Political Development, Shaping and Sharing of Norms, Conflict Prevention, Conflict Resolution, Post-Conflict Peace Building, dan Implementing Mechanism*. Rencana Aksi tersebut telah diintegrasikan ke dalam Program Aksi Vientiane (*Vientiane Action Programme/VAP*) yang ditandatangani para Kepala Negara ASEAN dalam KTT ke-10 ASEAN. VAP merupakan acuan pencapaian Komunitas ASEAN untuk kurun waktu 2004-2010.

Mekanisme koordinasi antar badan-badan sektoral ASEAN yang menangani Komunitas Keamanan ASEAN dilakukan melalui ASEAN *Security Community Coordinating Conference* (ASCCO). Pertemuan ke-1 ASCCO pada bulan September 2006, menekankan percepatan implementasi Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN di bidang *conflict resolution, post conflict peace building, good governance, combating corruption* serta promosi dan perlindungan HAM. Selain itu, disepakati perlunya memperhatikan isu *human security*.

Beberapa perkembangan mengenai implementasi Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN adalah sebagai berikut:

a. Piagam ASEAN (ASEAN Charter)

Penyusunan Piagam ASEAN bertujuan untuk mentransformasikan ASEAN dari sebuah asosiasi politik yang longgar menjadi organisasi internasional yang memiliki *legal personality*, berdasarkan aturan yang profesional (*rule-based organization*), serta memiliki struktur organisasi yang efektif dan efisien. Piagam ini diharapkan dapat diselesaikan dan ditandatangani pada KTT ke-13 di Singapura, tahun 2007;

b. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLAT*)

MLAT telah ditandatangani oleh semua negara anggota ASEAN di Kuala Lumpur, Januari 2006. Traktat ini melandasi kerjasama ASEAN di bidang hukum pidana;

c. Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme (*ASEAN Convention on Counter Terrorism/ACCT*)

ACCT ditandatangani pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, Januari 2007. Indonesia sebagai *Lead Shepherd* di bidang pemberantasan terorisme telah memelopori proses perumusan ACCT. Konvensi ini memberikan dasar hukum yang kuat guna peningkatan kerjasama ASEAN di bidang pemberantasan terorisme. Selain memiliki karakter regional, ACCT bersifat komprehensif (meliputi aspek pencegahan, penindakan, dan program rehabilitasi) sehingga memiliki nilai tambah bila dibandingkan dengan konvensi sejenis;

d. ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM)

Pembentukan ADMM merupakan inisiatif Indonesia dan bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan, melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. ADMM telah mengadakan pertemuan pertamanya pada bulan Mei 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia. ADMM bersifat *outward looking*, terbuka, transparan dan melibatkan Mitra Wicara ASEAN, sehingga di masa mendatang dimungkinkan adanya mekanisme ADMM *Plus*;

e. Rencana Pembentukan Traktat Ekstradisi ASEAN

Rencana pembentukan traktat ekstradisi ASEAN merupakan amanat Bali Concord 1976 dan Rencana Aksi Komunitas

Keamanan ASEAN. Para pejabat tinggi ASEAN di bidang hukum dalam pertemuan ASEAN *Senior Law Officials Meeting* (ASLOM) Ke-11 di Siem Reap, Kamboja, 29-30 Januari 2007, menyepakati untuk membentuk kelompok kerja untuk memulai proses perumusan traktat ekstradisi ASEAN; dan

f. Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan

ASEAN telah berhasil mengelola potensi konflik di Laut China Selatan menjadi potensi kerjasama yang melibatkan beberapa negara ASEAN dan China. ASEAN dan China telah berhasil menyepakati *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) yang ditujukan untuk menyelesaikan persengketaan secara damai. DOC akan diimplementasikan melalui suatu *code of conduct in the South China Sea*. Dalam kaitan ini, ASEAN-China *Working Group on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* menyepakati 6 proyek kerjasama dalam rangka *confidence building measures* guna mendukung implementasi DOC.

2. Kawasan Damai, Bebas Dan Netral (Zone Of Peace, Freedom And Neutrality Declaration/ZOPFAN)

Deklarasi ZOPFAN yang ditandatangani di Kuala Lumpur tahun 1971 merupakan upaya ASEAN untuk menciptakan kawasan yang damai, bebas, dan netral dari segala bentuk campur tangan pihak luar di Asia Tenggara. Pada KTT ke-1 ASEAN tahun 1976, ZOPFAN secara resmi diangkat oleh negara-negara anggota sebagai kerangka bagi kerja sama politik ASEAN.

ZOPFAN tidak hanya merupakan kerangka perdamaian dan kerjasama di Asia Tenggara melainkan juga mencakup kawasan Asia Pasifik yang lebih luas termasuk *major powers* dalam bentuk serangkaian tindak pengekangan diri secara sukarela (*voluntary self-restraints*). Dengan demikian, ZOPFAN tidak mengesampingkan peranan *major powers*, tetapi justru memungkinkan keterlibatan

mereka secara konstruktif dalam penanganan masalah-masalah keamanan kawasan.

Pedoman pelaksanaan ZOPFAN dirumuskan lebih lanjut pada April 1972, sebagai berikut:

- a. *Observance of the Charter of the United Nations, the Declaration on the Promotion of World Peace and Cooperation of the Bandung Declaration of 1955, the Bangkok Declaration of 1967 and the Kuala Lumpur Declaration of 1971;*
- b. *Mutual respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity of all nations within and without the region;*
- c. *The right of every state to lead its national existence free from external interference, subversion or coercion;*
- d. *Non-interference in the internal affairs of zonal states;*
- e. *Refraining from inviting or giving consent to intervention by external powers in domestic or regional affairs of zonal states;*
- f. *Settlement of differences or disputes by peaceful means in accordance with the Charter of the United Nations;*
- g. *Renunciation of the threat, or use of force in the conduct of international relations;*
- h. *Refraining from the use of armed forces for any purposes in the conduct of international relations except for individual or collective self-defence in accordance with the Charter of the United Nations;*
- i. *Abstention from involvement in any conflict of powers outside the zone from entering into any agreement which would be inconsistent with the objectives of the zone;*
- j. *The absence of foreign military bases in the territories of zonal states;*
- k. *Prohibition of the use, storage, passage or testing of nuclear weapons and their components within the zone;*
- l. *The right to trade freely with any country or international agency irrespective of differences in socio-political systems;*
- m. *The right to receive aid freely for the purpose of strengthening national resilience except when the aid is subject to conditions inconsistent with the objectives of the zone; and*
- n. *Effective regional cooperation among the zonal states.*

3. Traktat Persahabatan dan Kerjasama (*Treaty Of Amity And Cooperation/TAC*)

Salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan ZOPFAN dan menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara adalah TAC. Pada dasarnya prinsip-prinsip yang terkandung di dalam TAC juga tercermin di dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) antara lain prinsip '*non-interference*' dan penggunaan cara-cara damai dalam menyelesaikan konflik yang timbul diantara negara-negara penandatangan TAC.

Protokol ke-2 Amandemen TAC yang ditandatangani para Menteri Luar Negeri ASEAN dan Papua New Guinea di Manila, 25 Juli 1998 menjadi titik awal perluasan TAC ke luar ASEAN. Upaya ASEAN untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas regional mengalami kemajuan pesat pada bulan Oktober 2003 dengan aksesinya China dan India pada TAC, pada KTT ke-9 ASEAN di Bali, 2003. Jepang dan Pakistan mengaksesi TAC tanggal 2 Juli 2004 saat AMM ke-37 di Jakarta. Sedangkan Rusia dan Korea Selatan mengaksesi pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ASEAN-Rusia dan PTM ASEAN-Korsel, pada Nopember 2004 di Vientiane, Laos. Selandia Baru dan Mongolia pada AMM ke-38 mengaksesi TAC pada bulan Juli 2005 di Vientiane. Australia mengaksesi TAC pada bulan Desember 2005 di Kuala Lumpur sebelum penyelenggaraan KTT ke-11 ASEAN.

Pada KTT ke-12 ASEAN, Perancis dan Timor Leste mengaksesi TAC. Aksesinya Perancis kedalam TAC merupakan pengakuan penting salah satu negara Uni Eropa (UE) terhadap eksistensi ASEAN dan pentingnya pengembangan kerjasama dengan ASEAN. UE juga telah menyatakan niatnya untuk mengaksesi TAC yang menandakan kemajuan ASEAN sebagai organisasi regional yang signifikan, khususnya bagi perkembangan kerjasama kedua kawasan. Proses lebih lanjut menyusul aksesinya ini masih berkembang.

Aksesinya China, Rusia dan Perancis, yang merupakan negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, menandakan dukungan yang signifikan terhadap TAC sebagai suatu tata tertib (*code of conduct*)

dalam menjalankan hubungan antar negara di dalam dan luar kawasan ASEAN. ASEAN terus mendorong negara-negara lain di luar kawasan untuk mengaksesi TAC.

4. Kawasan Bebas Senjata Nuklir Di Asia Tenggara (*South-East Asia Nuclear Weapon Free Zone/SEANWFZ*)

South-East Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) Treaty ditandatangani di Bangkok pada tanggal 15 Desember 1995 dan telah diratifikasi oleh seluruh negara ASEAN. Traktat ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 1997. Pembentukan SEANWFZ menunjukkan upaya negara-negara di Asia Tenggara untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas kawasan baik regional maupun global, dan dalam rangka turut serta mendukung upaya tercapainya suatu pelucutan dan pelarangan senjata nuklir secara umum dan menyeluruh.

Traktat SEANWFZ ini disertai protokol yang merupakan suatu *legal instrument* mengenai komitmen negara ASEAN dalam upayanya memperoleh jaminan dari negara yang memiliki senjata nuklir (*Nuclear Weapon State/NWS*) bahwa mereka akan menghormati Traktat SEANWFZ dan tidak akan menyerang negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Saat ini, negara-negara ASEAN dan NWS masih mengupayakan finalisasi formulasi beberapa masalah yang diatur dalam Protokol dimaksud. Penandatanganan Traktat SEANWFZ merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi ASEAN dalam upaya mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang aman dan stabil, serta bagi usaha mewujudkan perdamaian dunia.

Pada Pertemuan AMM ke-32 bulan Juli 1999 di Singapura, para Menlu ASEAN untuk pertama kalinya mengadakan Sidang Komisi SEANWFZ. Hal ini merupakan langkah pertama yang penting ke arah diterapkannya Traktat tersebut. Komisi menunjuk Komite Eksekutif untuk menyiapkan konsep "*rules of procedure*" dan memulai langkah-langkah yang perlu untuk menjamin ketaatan terhadap Traktat, termasuk konsultasi dengan *International Atomic Energy Agency* (IAEA) dan badan-badan lain yang terkait.

Implementasi SEANWFZ perlu untuk segera dilaksanakan guna mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang aman dan stabil serta upaya mewujudkan perdamaian dunia. Dalam rangka implementasi tersebut, negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan finalisasi Protokol, dan menjajagi langkah yang lebih konstruktif berupa kerjasama dengan IAEA. Setelah 10 tahun Traktat ini berlaku (*enter into force*), Komisi SEANWFZ di tahun 2007 melakukan *major review* terhadap SEANWFZ.

5. Forum Regional ASEAN (ASEAN Regional Forum/ARF)

ASEAN *Regional Forum* (ARF) diprakarsai oleh ASEAN pada tahun 1994, sebagai forum untuk saling tukar pandangan dan informasi bagi negara-negara Asia-Pasifik mengenai masalah-masalah politik dan keamanan, baik regional maupun internasional. Sasaran yang hendak dicapai melalui ARF adalah mendorong saling percaya (*confidence building measures*) melalui transparansi dan mencegah kemungkinan timbulnya ketegangan maupun konflik di kawasan Asia Pasifik.

Sebagai satu-satunya forum dialog keamanan di luar PBB, yang dihadiri kekuatan besar dunia antara lain: Amerika Serikat, China, Rusia, Uni Eropa dan Jepang, pembahasan dan tukar pandangan dalam ARF memiliki makna penting dan strategis. Proses ARF lebih mencerminkan “ASEAN Way” yaitu menjalin hubungan untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan kebiasaan berdialog serta berkonsultasi dalam masalah-masalah keamanan.

ARF telah berhasil meningkatkan kenyamanan (*comfortability*) diantara para peserta dalam membicarakan isu keamanan. Sebagai contoh, China telah bersedia untuk membicarakan masalah Laut China Selatan dalam ARF, yang sebelumnya sulit dilakukan. Oleh karena itu, di masa depan ARF perlu tetap mempertahankan prinsip “*at a pace comfortable to all*” dan konsensus. Akan tetapi hal tersebut tidak menutup terjadinya perdebatan dalam suasana informal untuk mendukung berlangsungnya pertukaran pandangan yang bersifat terbuka.

Kegiatan-kegiatan antar-sesi yang dilakukan di antara pertemuan-pertemuan ARF, dibagi atas Jalur Satu (*Track I*) yang dihadiri oleh wakil-wakil pemerintahan negara-negara ARF, dan Jalur Dua (*Track II*) yang diadakan dan dihadiri oleh lembaga-lembaga penelitian (*think tank*) dari negara-negara ARF. Dalam Jalur Satu, dua jenis kegiatan utama adalah *Intersessional Support Group* (ISG) dan beberapa *Intersessional Meeting* (ISM) yang lebih bersifat teknis. Kegiatan ISM saat ini berupa ISM on *Counter-Terrorism and Transnational Crime* (ISM on CT-TC) dan ISM on *Disaster Relief* (ISM-DR).

Proses kerjasama ARF terbagi atas 3 tahap yaitu tahap *Confidence Building Measures* (CBMs), *Preventive Diplomacy* (PD) dan *Conflict Resolution* (CR). Saat ini, ARF melangkah ke tahap kedua sambil tetap melaksanakan tahap pertama. Dalam kaitan tersebut pertemuan ISG, berubah nama menjadi ISG CBMs and PD.

6. Kerjasama di Bidang Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara

Kerjasama ASEAN dalam rangka memberantas kejahatan lintas negara (*transnational crime*) pertama kali diangkat pada pertemuan para Menteri Dalam Negeri ASEAN di Manila tahun 1997 yang mengeluarkan ASEAN *Declaration on Transnational Crimes*. Sebagai tindak lanjut dari deklarasi di atas, kerjasama ASEAN dalam memerangi kejahatan lintas negara dilaksanakan melalui pembentukan Pertemuan Para Menteri ASEAN terkait dengan Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara (ASEAN *Ministerial Meeting on Transnational Crime/AMMTC*). Beberapa perjanjian yang telah dihasilkan ASEAN terkait dengan pemberantasan kejahatan lintas negara yaitu:

- a. ASEAN *Plan of Action to Combat Transnational Crimes* yang mencakup kerjasama pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet dan kejahatan ekonomi internasional;
- b. *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLAT) ditandatangani tahun 2006;

- c. *Agreement of Information Exchange and Establishment of Communication Procedures* ditandatangani tahun 2002, merupakan perjanjian di tingkat sub regional guna penanganan kejahatan lintas batas melalui pertukaran informasi;
- d. *ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism* ditandatangani tahun 2001 dalam penanganan terorisme; dan
- e. *ASEAN Convention on Counter Terrorism* ditandatangani tahun 2007 sebagai instrumen hukum dalam penanganan terorisme.

7. Kerjasama di Bidang Hukum

Kerjasama ASEAN di bidang hukum dilaksanakan melalui mekanisme pertemuan para Pejabat Tinggi ASEAN di bidang hukum (*ASEAN Senior Law Officials' Meeting /ASLOM*) yang dilaksanakan setiap tahun dan pertemuan para Menteri Hukum ASEAN (*ASEAN Law Ministerial Meeting/ALAWMM*) yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun.

Pada ASLOM ke-11 di Siem Reap, Kamboja, Januari 2007, disepakati: (a) merekomendasikan pengadopsian *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLAT) yang telah ditandatangani oleh semua negara anggota ASEAN kepada ALAWMM ke-7 di Brunei Darussalam, tahun 2008; (b) pembentukan *Working Group on ASEAN Extradition Treaty* untuk merumuskan sebuah traktat ekstradisi ASEAN. Pembentukan traktat ekstradisi ASEAN telah diamanatkan dalam *Declaration of ASEAN Concord* tahun 1976 dan Rencana Kerja Komunitas Keamanan ASEAN. Pertemuan pertama *working group* ini direncanakan untuk dilaksanakan di Indonesia di tahun 2007.

8. Kerjasama di Bidang Imigrasi dan Kekonsuleran

Kerjasama ASEAN di bidang imigrasi dan konsuleran dilaksanakan melalui pertemuan para Direktur Jenderal Imigrasi dan

Kepala Divisi Konsuler ASEAN (*The Meeting of the ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs/DGICM*).

Para Menteri Luar Negeri ASEAN telah menandatangani Perjanjian Kerangka ASEAN mengenai Bebas Visa (*ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption*) ditandatangani pada AMM ke-39 di Kuala Lumpur, 25 Juli 2006. Persetujuan ini memberlakukan bebas visa kunjungan singkat bagi warga negara anggota ASEAN yang melakukan perjalanan di wilayah ASEAN selama 14 hari. Perjanjian dimaksud diharapkan dapat mendorong pencapaian Komunitas ASEAN melalui peningkatan perjalanan intra-ASEAN dan *people-to-people contact*.

AMM ke-39 juga mengeluarkan pernyataan mengenai perlunya kerjasama ASEAN di bidang bantuan konsuleran perwakilan-perwakilan negara anggota ASEAN bagi warga negara ASEAN di daerah konflik dan situasi krisis di negara ketiga, terutama bagi warga negara anggota ASEAN di negara ketiga di mana tidak terdapat perwakilan negaranya. Hal ini dilatarbelakangi oleh krisis di Lebanon pada saat operasi militer Israel di tahun 2006, di mana tidak terdapat perwakilan dari semua negara anggota ASEAN. Saat ini, negara-negara anggota ASEAN sedang membahas *standard operating procedures* (SOPs) untuk bantuan konsuleran dimaksud.

9. Kerjasama Kelembagaan Antar Parlemen

Kerjasama antar parlemen di ASEAN diselenggarakan melalui mekanisme ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) yang dipelopori oleh Indonesia. Semula organisasi ini bernama ASEAN *Inter-Parliamentary Organization* (AIPO) didirikan pada tahun 1977, beranggotakan parlemen-parlemen dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini keanggotaannya telah pula mencakup parlemen-parlemen dari Kamboja, Laos, dan Vietnam, sementara Brunei Darussalam dan Myanmar masih sebagai *Special Observers*.

Berdasarkan usulan dari Parlemen Indonesia dalam Sidang Umum AIPO ke-27 di Cebu, Filipina, 10-15 September 2006, AIPO

berganti nama menjadi ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA). Pergantian nama ini dimaksudkan untuk mendorong proses transformasi AIPA dalam mendukung upaya perwujudan Komunitas ASEAN.

Meskipun AIPA bukan badan ASEAN karena ASEAN merupakan organisasi antar-pemerintah, namun AIPA memiliki status konsultatif dengan ASEAN. AIPA melakukan dialog dengan anggota parlemen dari negara-negara Mitra Wicara ASEAN yang bertindak sebagai *Observers* seperti Australia, Kanada, China, Uni Eropa, Jepang, Selandia Baru, Papua New Guinea, Rusia, dan Korea Selatan.

10. Upaya Pembentukan Mekanisme HAM ASEAN

Para Menteri Luar Negeri ASEAN pada AMM Ke-26 di Singapura, Juli 1993 menyepakati perlunya mempertimbangkan pendirian mekanisme HAM regional yang sesuai di ASEAN. Hal ini merupakan tanggapan ASEAN terhadap *Vienna Declaration and Programme of Action* (1993) mengenai antara lain pendirian mekanisme HAM regional untuk mendukung promosi dan perlindungan HAM global. AIPA di tahun yang sama mengeluarkan *Human Rights Declaration* yang mencantumkan himbauan kepada pemerintah negara-negara ASEAN untuk membentuk mekanisme HAM ASEAN.

Mekanisme HAM, pada umumnya terdiri atas 2 (dua) komponen, yaitu; instrumen hukum (deklarasi atau konvensi) dan badan (komisi atau pengadilan HAM). Pada saat ini, Asia Pasifik (termasuk ASEAN) merupakan satu-satunya kawasan yang belum memiliki mekanisme HAM regional.

Walaupun hingga saat ini pembentukan mekanisme HAM ASEAN belum terwujud, tercatat beberapa perkembangan sebagai berikut:

- a. Pembentukan *Working Group on ASEAN Human Rights Mechanism* (WGAHRM) yang beranggotakan tokoh-tokoh Asia Tenggara baik dari sektor pemerintahan maupun *civil society*. WGAHRM terdiri dari beberapa kelompok kerja nasional di Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja, Singapura, dan Filipina. Walaupun bukan merupakan badan

resmi ASEAN, WGAHRM telah bekerjasama dengan pemerintah beberapa negara anggota ASEAN dan menyelenggarakan beberapa *workshop* dan *roundtable discussion* untuk mempelajari kemungkinan pembentukan mekanisme HAM ASEAN dan memberikan rekomendasi ke pemerintah negara-negara ASEAN; dan

- b. Ditandatanganinya ASEAN *Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* pada KTT Ke-12 ASEAN.

C. KERJASAMA TERKAIT DENGAN PILAR KOMUNITAS EKONOMI ASEAN

Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya kerjasama ekonomi difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan (*preferential trade*), usaha patungan (*joint ventures*), dan skema saling melengkapi (*complementation scheme*) antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN, seperti ASEAN *Industrial Projects Plan* (1976), *Preferential Trading Arrangement* (1977), ASEAN *Industrial Complementation scheme* (1981), ASEAN *Industrial Joint-Ventures scheme* (1983), dan *Enhanced Preferential Trading arrangement* (1987). Pada dekade 80-an dan 90-an, ketika negara-negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa cara terbaik untuk bekerjasama adalah dengan saling membuka perekonomian mereka, guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan.

Pada KTT ke-5 ASEAN di Singapura tahun 1992 telah ditandatangani *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation* sekaligus menandai dicanangkannya ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) pada tanggal 1 Januari 1993 dengan *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) sebagai mekanisme utama. Pendirian AFTA memberikan impikasi dalam bentuk pengurangan dan eliminasi tarif, penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, dan perbaikan terhadap

kebijakan-kebijakan fasilitasi perdagangan. Dalam perkembangannya, AFTA tidak hanya difokuskan pada liberalisasi perdagangan barang, tetapi juga perdagangan jasa dan investasi.

KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 menyepakati pembentukan komunitas ASEAN yang salah satu pilarnya adalah Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC). AEC bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas. KTT juga menetapkan sektor-sektor prioritas yang akan diintegrasikan, yaitu: produk-produk pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, produk-produk turunan dari karet, tekstil dan pakaian, produk-produk turunan dari kayu, transportasi udara, e-ASEAN (ITC), kesehatan, dan pariwisata. Dalam perkembangannya, pada tahun 2006 jasa logistik dijadikan sektor prioritas yang ke-12.

KTT ke-10 ASEAN di Vientiane tahun 2004 antara lain menyepakati *Vientiane Action Program* (VAP) yang merupakan panduan untuk mendukung implementasi pencapaian AEC di tahun 2020.

ASEAN *Economic Ministers Meeting* (AEM) di Kuala Lumpur bulan Agustus 2006 menyetujui untuk membuat suatu cetak biru (*blueprint*) untuk menindaklanjuti pembentukan AEC dengan mengidentifikasi sifat-sifat dan elemen-elemen AEC pada tahun 2015 yang konsisten dengan Bali Concord II dan dengan target-target dan *timelines* yang jelas serta *pre-agreed flexibility* untuk mengakomodir kepentingan negara-negara anggota ASEAN.

KTT ke-12 ASEAN di Cebu bulan Januari 2007 telah menyepakati "*Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*". Dalam konteks tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN telah menginstruksikan Sekretariat ASEAN untuk menyusun "Cetak Biru ASEAN *Economic Community* (AEC)". Cetak Biru AEC tersebut berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN, yaitu:

- a. Menuju *single market* dan *production base* (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal);

- b. Menuju penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (*regional competition policy, IPRs action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation, taxation, dan pengembangan UKM*);
- c. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (*region of equitable economic development*) melalui pengembangan UKM dan program-program *Initiative for ASEAN Integration* (IAI); dan
- d. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam *global supply network*).

Pelaksanaan rencana kerja strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui *priority actions* yang pencapaiannya dievaluasi dan dimonitor dengan menggunakan *score card*. Disamping itu, diperlukan dukungan berupa kemauan politik, koordinasi dan mobilisasi sumber daya, pengaturan pelaksanaan, peningkatan kemampuan (*capacity building*) dan penguatan institusi, serta peningkatan konsultasi antara pemerintah dan sektor swasta. Pelaksanaan rencana kerja strategis tersebut juga akan didukung dengan program pengembangan sumber daya manusia dan kegiatan penelitian serta pengembangan di masing-masing negara.

1. Kerjasama di Sektor Industri

Kerjasama di sektor industri merupakan salah satu sektor utama yang dikembangkan dalam kerjasama ekonomi ASEAN. Kerjasama tersebut ditujukan untuk meningkatkan arus investasi, mendorong proses alih teknologi dan meningkatkan keterampilan negara-negara ASEAN, termasuk dalam bentuk pertukaran informasi tentang kebijaksanaan perencanaan industri nasional masing-masing. Kerjasama ASEAN di sektor perindustrian diarahkan untuk menciptakan fasilitas produksi baru dalam rangka mendorong perdagangan intra-ASEAN melalui berbagai skema kerjasama yang dikembangkan berdasarkan konsep *resource pooling* dan *market sharing*.

ASEAN Industrial Cooperation (AICO) yang ditandatangani pada bulan April 1996 dan berlaku efektif pada bulan Nopember 1999 merupakan inisiatif kerjasama di sektor industri yang saat ini terus dikembangkan. AICO merupakan skema kerjasama antara dua atau lebih perusahaan di kawasan ASEAN dalam pemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan, dalam rangka memproduksi suatu barang yang bertujuan meningkatkan daya saing perusahaan ASEAN. AICO menyediakan prasarana untuk menerapkan prinsip *economic of scale and scope* yang didukung oleh pajak yang rendah untuk meningkatkan transaksi di ASEAN, menumbuhkan kesempatan investasi dari dalam dan luar ASEAN, serta menciptakan pasar regional yang lebih besar. Perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan skema kerjasama ini antara lain akan mendapatkan preferensi berupa pengenaan bea masuk hingga 5%.

AICO diharapkan akan mendorong kerjasama industri antar negara ASEAN dan mendorong investasi pada industri berbasis teknologi dan kegiatan yang memberikan nilai tambah pada produk industri. AICO juga memberikan kesempatan luas kepada perusahaan di negara ASEAN untuk saling bekerjasama guna menghasilkan produk dengan menikmati preferensi tarif. Insentif lain yang juga diberikan kepada perusahaan yang bekerjasama dalam payung AICO berupa akreditasi kandungan lokal serta insentif non-tarif lainnya yang dapat diberikan oleh masing-masing negara anggota.

AICO tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan industri, tetapi juga untuk *trading companies* yang membantu pemasaran produk-produk industri kecil. Pada 21 April 2004 para Menteri Ekonomi ASEAN telah menandatangani *Protocol to Amend the AICO Agreement* yang mengatur perubahan/penurunan tarif preferensi yang diberikan untuk proyek-proyek AICO yang disetujui.

2. Kerjasama di Sektor Perdagangan

Kerjasama di sektor perdagangan barang diawali dengan ditandatanganinya *Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangement* (ASEAN PTA) tahun 1977 di Manila yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1978. Dalam pelaksanaannya, kerjasama di sektor perdagangan dinilai masih memerlukan berbagai

upaya peningkatan, terutama untuk mata dagangan yang secara nyata diperdagangkan tetapi belum dapat diberikan tingkat preferensi yang memadai. Selain itu, masih diperlukan pula pendekatan yang lebih efisien, baik dalam prosedur administrasi maupun berbagai upaya untuk mengurangi berbagai hambatan non-tarif, meningkatkan komplementaritas dan untuk mengurangi kebijakan substitusi impor yang bersifat *inward-looking*.

Pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) ke-22 di Bali bulan Oktober 1990 telah meluncurkan *Enhanced PTA* yang memberlakukan Tingkat Tarif Efektif Bersama (*Common Effective Preferential Tariff* - CEPT) antara 5-10% atas dasar produk per produk, baik produk ekspor maupun impor guna menghilangkan kendala-kendala perdagangan di antara negara-negara ASEAN. Konsep CEPT ini juga diterapkan pada pengaturan kerjasama ASEAN di bidang industri.

2.1. ASEAN Free Trade Area (AFTA)

Momen penting pengembangan kerjasama di bidang ekonomi dicapai pada 1992 ketika ASEAN menyepakati Kerangka Persetujuan mengenai Peningkatan Kerjasama Ekonomi ASEAN (*Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation*) yang berfungsi sebagai payung bagi semua bentuk kerjasama ekonomi ASEAN di masa mendatang. Pada tahun yang sama, ASEAN juga menyepakati pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA).

Pembentukan AFTA ditujukan untuk meningkatkan daya tarik ASEAN sebagai basis produksi melalui pengembangan pasar regional. AFTA diwujudkan dengan cara menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan, berupa tarif maupun non tarif dalam waktu 15 tahun kedepan terhitung tanggal 1 Januari 1993 dengan menggunakan skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) sebagai mekanisme utamanya. Pembentukan AFTA sebagai kelompok ekonomi regional tidak bertentangan dengan sistem perdagangan global (sistem GATT) yang ada, tetapi justru akan menunjang secara komplementer sistem global tersebut. Berdasarkan pasal XXIV GATT, negara anggota GATT

diperkenankan membentuk suatu wilayah perdagangan bebas (*free trade area*) dan suatu *customs union* atas dasar aturan-aturan khusus yang tidak merugikan negara-negara di luar wilayah tersebut.

Di tingkat regional, pelaksanaan CEPT-AFTA diawasi, dikoordinir dan dikaji ulang oleh Dewan AFTA (*AFTA Council*) yang anggotanya terdiri dari para Menteri Perdagangan ASEAN yang dalam tugasnya dibantu oleh Pejabat Senior Ekonomi ASEAN (SEOM). Dewan AFTA diserahi tugas untuk membantu mencari penyelesaian terhadap berbagai sengketa perdagangan yang terjadi di antara negara-negara ASEAN dan bertanggung jawab kepada Pertemuan ASEAN *Economic Ministers* (AEM).

Dalam rangka memperlancar implementasi Skema CEPT-AFTA, khususnya untuk menggerakkan sektor swasta, telah dibentuk Unit AFTA di Sekretariat ASEAN. Sementara itu, di bawah SEOM dibentuk Kelompok Kerja CEPT-AFTA yang menangani aspek-aspek teknis CEPT-AFTA seperti: jadwal penurunan tarif, pemindahan produk-produk dari *Temporary Exclusion List* (TEL) ke dalam *Inclusion List* (IL), serta piranti hukum untuk pemberlakuannya (*Legal Enactment*). Kelompok Kerja tersebut kemudian diubah namanya menjadi *Coordinating Committee on CEPT for AFTA* (CCCCA) guna menangani masalah-masalah implementasi CEPT, terutama dari segi kepabeanan.

Di tingkat nasional, Unit AFTA dipegang oleh Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan RI yang mempunyai fungsi:

- a. Mempersiapkan produk-produk yang akan dimasukkan dalam *Inclusion List* (IL), *Temporary Exclusion List* (TEL), *Sensitive List* (SL) dan *General Exception Lists* (GEL), Jadwal Penurunan Tarif dan Penyusunan CCEM (*CEPT Concessions Exchange Manual*) dalam rangka implementasi CEPT-AFTA. Unit ini juga menjamin pelaksanaan langkah-langkah yang diperlukan untuk pengesahan dan implementasi penurunan tarif; dan

- b. Menampung pertanyaan dan keluhan yang muncul dari masyarakat terutama kalangan swasta dan sebagai saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga pemerintah di masing-masing negara.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan AFTA telah mengalami beberapa kali percepatan. Pada tahun 1995 disepakati *Agenda of Greater Economic Integration* yang antara lain berisi komitmen untuk mempercepat pemberlakuan AFTA dari 15 tahun menjadi 10 tahun, atau yang semula tahun 2008 menjadi 2003. Pada KTT ke-6 ASEAN di Hanoi, para Pemimpin ASEAN menetapkan *Statement of Bold Measures* yang juga berisikan komitmen mereka terhadap AFTA dan kesepakatan untuk mempercepat pemberlakuan AFTA dari tahun 2003 menjadi tahun 2002 bagi enam negara penandatangan skema CEPT, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand.

Disamping itu, disepakati juga untuk mengurangi tarif menjadi 0-5% bagi 90% produk pada tahun 2000 serta untuk mempercepat pemberlakuan tarif 0% dan memindahkan produk-produk yang tidak termasuk dalam pengurangan tarif ke dalam *Inclusion List*. Negara-negara anggota baru ASEAN (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam / CLMV) akan memaksimalkan jumlah produk dengan tarif 0-5 persen mereka masing-masing pada tahun 2003 bagi Vietnam, 2005 bagi Laos dan Myanmar, serta 2007 bagi Kamboja. Mereka juga akan memperluas jumlah cakupan produk dengan tarif 0-5 persen pada 2006 bagi Vietnam, 2008 bagi Laos dan Myanmar, serta 2010 bagi Kamboja.

Pada tahun 1999, para Pemimpin ASEAN memutuskan untuk melakukan percepatan dalam pencapaian tarif nol persen dalam kerangka AFTA bagi ASEAN-6 yang dijadwalkan pada tahun 2010. Sementara keempat negara anggota baru (CLMV) dijadwalkan pada tahun 2015 dengan fleksibilitas. Proses perwujudan AFTA memperoleh dorongan yang kuat dari para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-7 ASEAN di Bandar Seri Begawan, 4-5 Nopember 2001, dengan disepakatinya suatu peta jalan (*road map*) untuk memberikan

arahan bagi suatu integrasi ekonomi ASEAN yang koheren. Disamping itu, negara anggota ASEAN secara individu juga melaksanakan studi mengenai daya saing ASEAN secara menyeluruh guna menentukan arah kerjasama di masa mendatang.

AFTA saat ini telah terbentuk secara virtual, dimana negara-negara anggota ASEAN telah membuat langkah-langkah maju dalam menurunkan tarif intra-regional melalui mekanisme *CEPT for AFTA*. Sampai saat ini tercatat lebih dari 99 persen produk yang masuk dalam daftar IL untuk negara-negara ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) telah diturunkan menjadi sekitar 0-5%. Negara-negara CLMV juga tidak ketinggalan jauh dalam pelaksanaan komitmen CEPT dimana hampir 80% produk mereka telah masuk dalam IL dan 66% dari produk-produk tersebut telah memiliki tarif antara 0-5%. Hingga tahun 2006, rata-rata CEPT ASEAN-6 adalah 1,74%, CLMV 4,65% dan ASEAN secara keseluruhan 2,82%.

Untuk memperbaiki dan memperkuat aturan-aturan pelaksanaan skema CEPT menjadi lebih menarik bagi para pebisnis dan investor potensial di kawasan, *CEPT Rules of Origin* serta *Operational Certification Procedures* telah direvisi dan mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2004. Hal-hal yang disempurnakan adalah: (a) metode standar penghitungan *local/ASEAN content*; (b) prinsip-prinsip penentuan biaya dari ASEAN serta pedoman untuk metodologi penghitungan biaya; (c) perlakuan terhadap barang-barang atau material lokal (*locally-procured*); serta (d) perbaikan terhadap proses verifikasi, termasuk verifikasi langsung (*on-site verification*).

Sidang AEM ke-38 bulan Agustus 2006 telah menyepakati untuk memberlakukan penghapusan hambatan non-tarif (*non tariff barriers*), mulai tanggal 1 Januari 2008 bagi ASEAN-5 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand), dan mulai tanggal 1 Januari 2010 bagi Filipina, serta tanggal 1 Januari 2013 bagi CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam).

Di bidang fasilitasi perdagangan, pada tahun 2006 ASEAN menyepakati beberapa kebijakan, yaitu: harmonisasi "*tariff nomenclature*" dengan penyeragaman sistem klasifikasi tarif; penyederhanaan dan penyelarasan prosedur pemeriksaan kepabeanan melalui ASEAN *e-custom*, ASEAN *Single Window*, pengimplementasian *Green Lane System* untuk produk-produk CEPT yang akan dilaksanakan pada tahun 2006 dan 2007, serta persetujuan ASEAN *Customs Declaration Documents*; dan perkembangan terakhir pelaksanaan AFTA ditandai dengan konversi dari ASEAN *Harmonized Tariff Nomenclature* (AHTN) 2002 ke AHTN tahun 2007, yang untuk sementara prosesnya telah diselesaikan oleh Indonesia dan Thailand.

2.2. Perdagangan Bebas dengan Mitra Wicara (FTA)

Disamping berupaya mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, negara-negara anggota ASEAN juga tetap mempertahankan sifat terbuka terhadap negara-negara lain dengan menjalin kerjasama di berbagai bidang. KTT ASEAN+3 (China, Jepang, Korea) yang diselenggarakan bersamaan dengan penyelenggaraan KTT Informal ke-3 ASEAN di Manila tanggal 27-28 Nopember 1999 menghasilkan *Joint Statement on Cooperation in East Asia* sebagai wujud komitmen ASEAN dalam mengembangkan kerjasama dengan Mitra Wicara.

Upaya untuk tetap mempertahankan sifat terbuka tersebut, dilakukan ASEAN dengan negara-negara Mitra Wicara yang mengarah pada upaya pembentukan suatu *Free Trade Area* (FTA). Beberapa kesepakatan pembentukan FTA antara ASEAN dengan Mitra Wicara telah dicapai. Sejauh ini, ASEAN telah menandatangani beberapa perjanjian perdagangan bebas dengan Mitra Wicara-nya dalam bentuk perjanjian kemitraan ekonomi yang komprehensif, yaitu :

- a. Perjanjian dengan China ditandatangani di Phnom Penh pada bulan Nopember 2002 yaitu *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between ASEAN and the People's Republic of China*;

- b. Perjanjian dengan Jepang ditandatangani di Bali pada bulan Oktober 2003, berupa *Framework for Comprehensive Economic Partnership Between the Association of South East Asian Nations and Japan*;
- c. Perjanjian dengan India ditandatangani di Bali pada bulan Oktober 2003, berupa *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Republic of India and the Association of South East Asian Nations*;
- d. Perjanjian dengan Korea ditandatangani di Vientiane pada bulan Nopember 2004 berupa *Joint Declaration on Comprehensive Cooperation Partnership Between the Association of South East Asian Nations and the Republic of Korea*;
- e. Perjanjian dengan CER (Australia dan Selandia Baru) ditandatangani di Bandar Seri Begawan pada bulan September 2002 dalam bentuk *Ministerial Declaration on the AFTA-CER Closer Economic Partnership*; dan
- f. Perjanjian dengan US berupa USTR-TIFA (*Trade and Investment Framework Agreement*) ditandatangani pada AEM ke-38 di Kuala Lumpur, Agustus 2006.

Jadwal pencapaian FTA masing-masing adalah: dengan China (ASEAN-6 tahun 2010, CLMV tahun 2015), India (Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapore dan Thailand tahun 2011, CLMV dan Philippines tahun 2016), Jepang (2012), Korea (ASEAN-6 tahun 2010, Vietnam tahun 2016, dan CLM tahun 2018).

3. Kerjasama di Sektor Jasa

Untuk meningkatkan daya saing para penyedia jasa di ASEAN, kerjasama regional di sektor jasa terus ditingkatkan dengan disepakatinya ASEAN *Framework Agreement on Services* (AFAS) yang ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN pada saat pelaksanaan KTT ASEAN ke-5 di Bangkok bulan Desember 1995. AFAS antara lain berisi kesepakatan untuk:

- a. Meningkatkan kerjasama di bidang jasa antar negara anggota ASEAN dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, diversifikasi kapasitas produksi dan pasokan serta distribusi jasa baik antar para penyedia jasa di ASEAN maupun di luar ASEAN;
- b. Menghapus hambatan-hambatan perdagangan jasa yang substansial antar negara anggota; dan
- c. Meliberalisasi perdagangan jasa dengan memperdalam dan memperluas cakupan liberalisasi yang telah dilakukan oleh negara-negara anggota dalam kerangka GATS/WTO dengan tujuan mewujudkan perdagangan bebas sektor jasa.

Dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan KTT ke-5 ASEAN di Bangkok tersebut, telah dibentuk *Coordinating Committee on Services* (CCS) yang berfungsi sebagai badan ASEAN yang melaksanakan perundingan liberalisasi jasa dalam kerangka AFAS. CCS diberi tugas menyusun modalitas untuk mengelola negosiasi tujuh sektor jasa yang menjadi prioritas, yaitu pariwisata, jasa bisnis, jasa keuangan, jasa konstruksi, telekomunikasi, angkutan udara dan angkutan laut. Dalam melaksanakan tugasnya, CCS membentuk tujuh *Sectoral Working Groups* yang masing-masing akan bertanggung jawab mengelola perundingan di tiap-tiap sektor.

Negara-negara anggota membuat komitmen yang disusun dalam suatu paket komitmen yang dibuat secara bertahap untuk menunjukkan perkembangan dari perundingan menuju liberalisasi jasa penuh pada 2020. Sektor jasa tersebut meliputi 7 subsektor yaitu perhubungan udara, bisnis, konstruksi, keuangan, perhubungan laut, telekomunikasi dan pariwisata. Paket Komitmen Pertama Liberalisasi Bidang Jasa ASEAN disepakati pada Pertemuan Para Menteri Ekonomi ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 16 Oktober 1997. Dalam Paket ini belum ada negara anggota yang siap meliberalisasikan seluruh subsektor dimaksud. Liberalisasi subsektor perhubungan udara baru disepakati 3 negara anggota (Brunei, Malaysia dan Singapura), subsektor perhubungan laut disepakati 4 negara anggota (Brunei, Indonesia, Malaysia dan Thailand), subsektor bisnis disepakati Filipina, subsektor telekomunikasi disepakati Vietnam dan subsektor pariwisata disepakati oleh 9 negara anggota (Brunei,

Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam).

Sidang Para Menteri Ekonomi ASEAN di Makati City, tanggal 7 Oktober 1998, menyepakati Paket Komitmen Kedua, serta menandatangani *Protocol to Implement the Second Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services*. Dengan disepakatinya Paket Komitmen Kedua tersebut, maka komitmen negara-negara anggota telah mencakup 7 subsektor jasa sesuai dengan kesepakatan KTT ke-5 ASEAN di Bangkok. Dalam Paket ini, terdapat 5 subsektor jasa yang belum disepakati untuk diliberalisasikan oleh 6 negara anggota yaitu perhubungan udara (Brunei, Malaysia dan Singapura), perhubungan laut (Brunei, Kamboja, Indonesia dan Malaysia), konstruksi (Kamboja), telekomunikasi (Kamboja) dan pariwisata (Brunei, Malaysia dan Singapura).

Paket Komitmen Ketiga berhasil disepakati oleh para Menteri Ekonomi ASEAN di Bandar Seri Begawan pada bulan September 2001. Protokol pelaksanaannya, yakni *Protocol to Implement the Third Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services* kemudian ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN pada 31 Desember 2001. Dalam Paket Ketiga ini, terdapat 2 subsektor jasa yang belum disepakati untuk diliberalisasi oleh 4 negara anggota yaitu perhubungan laut (Brunei, Malaysia, Filipina dan Laos) dan perhubungan udara (Laos).

Paket Komitmen Keempat beserta protokol pelaksanaannya disepakati dan ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN pada pertemuan di Jakarta, 3 September 2004. Pertemuan tersebut juga menyepakati untuk melaksanakan perundingan putaran keempat yang dimulai awal tahun 2005 yang diharapkan dapat mencakup seluruh sektor jasa di luar 7 sektor jasa yang selama ini telah dinegosiasikan.

Di sela KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina pada tanggal 8 Desember 2006, para Menteri Ekonomi ASEAN menyepakati Paket Komitmen Kelima dan menandatangani protokol pelaksanaannya. Dalam Paket kelima tersebut terdapat 8 subsektor jasa yang ditawarkan untuk diliberalisasi yaitu kesehatan, pariwisata (*tourism and travel related*

services), komputer (*computer and related services*), telekomunikasi, bisnis, distribusi, konstruksi dan perhubungan laut.

Dalam rangka mempercepat proses negosiasi, ASEAN telah menerapkan suatu pendekatan yang disebut ASEAN-X *formula*. ASEAN-X *formula* merupakan pendekatan yang diambil dalam rangka mempercepat proses liberalisasi sektor jasa yang dianggap berjalan cukup lambat. Melalui pendekatan ini, dua atau lebih negara anggota dapat melakukan negosiasi dan menyepakati untuk melakukan liberalisasi perdagangan pada sektor atau sub sektor jasa tertentu, sementara negara lainnya dapat bergabung kemudian dengan tingkat liberalisasi sesuai dengan yang disepakati. Guna penerapan pendekatan ini, CCS telah menyusun protokol perubahan terhadap AFAS untuk mengakomodir penerapan ASEAN-X *formula* dalam negosiasi liberalisasi jasa sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan oleh para Menteri Ekonomi ASEAN.

Pelaksanaan AFAS masih memerlukan upaya yang lebih optimal, terutama dalam meningkatkan kesiapan negara-negara anggota serta mengatasi sensitifitas sebagian besar negara anggota dalam memberikan akses pasar dalam perdagangan jasa. Pada tanggal 1 Januari 2008, diharapkan dapat disetujui penghapusan hambatan-hambatan pada moda 1 (*cross border supply*) dan moda 2 (*consumption abroad*) untuk seluruh sub-sektor bidang jasa. Untuk moda 3 (*commercial presence*), partisipasi modal asing ditargetkan sekitar 70% dapat dicapai pada tahun 2010. Sedangkan target dan jadwal liberalisasi moda 4 (*movement of natural person*) dan hambatan-hambatan pada moda 3 diharapkan dapat dicapai pada tahun 2007.

Dalam mewujudkan bebasnya perpindahan tenaga kerja terampil antar negara anggota sesuai dengan moda 4 (*movement of natural person*), ASEAN telah mempercepat penyelesaian *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) untuk memfasilitasi bebasnya perpindahan tenaga ahli (*experts*), profesional dan tenaga kerja terampil. Pada tahun 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia, para Menteri Ekonomi ASEAN telah menandatangani *MRA on Engineering* dan pada tanggal 8 Desember 2006 di Cebu City, Filipina para Menteri Ekonomi ASEAN menandatangani *MRA on Nursing Services*. Sementara *MRA on Architecture, Accountancy, Land Surveying, Medical Practitioners* dan

Professional in Tourism sedang dalam pembahasan dan diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

3.1. Kerjasama di Sektor Transportasi dan Telekomunikasi

Pada awalnya, kerjasama ASEAN di sektor transportasi dan telekomunikasi ditangani oleh komite-komite yang beranggotakan para spesialis dan pejabat yang menangani bidang-bidang spesifik, baik yang sifatnya permanen maupun *ad-hoc* yang dibentuk pada tahun 1968. Komite-komite tersebut menangani isu-isu *Civil Air Transportation, Communication/Air Traffic Service/Meteorology*, dan *Shipping*.

Para Pemimpin ASEAN di tahun 1992 telah mengeluarkan keputusan untuk menghapus seluruh komite ekonomi, dan melimpahkan tugas-tugas yang ditangani oleh komite-komite tersebut kepada Pertemuan Para Pejabat Senior Ekonomi (SEOM). Untuk sektor transportasi dan telekomunikasi, pada pertemuan di Jakarta bulan April 1994, SEOM sepakat untuk membentuk *ad-hoc working group* guna membantu Sekretariat ASEAN dalam mengkoordinasikan pelaksanaan proyek-proyek kerjasama di sektor transportasi dan telekomunikasi yang sedang berjalan atau yang masih menunggu keputusan pelaksanaannya.

Pertemuan *Working Group on Transport and Communication* bulan Desember 1994 di Jakarta menghasilkan *Draft ASEAN Plan of Action in Transport and Communication 1994-1996*. *Ad-hoc Working Group on Transport and Telecommunication* secara resmi dibentuk pada bulan Juni 1994. Sidang AEM ke-27 di Brunei Darussalam tanggal 7-9 September 1995, memutuskan untuk memberikan dorongan bagi diselenggarakannya Pertemuan Tingkat Menteri di Sektor Transportasi dan Telekomunikasi serta menyarankan agar dalam *ASEAN Plan of Action on Transport and Communication 1994-1996* dapat dimasukkan kebijakan Lalu-lintas Udara Terbuka (*Open Sky Policy*) bagi negara-negara ASEAN.

3.1.1. Transportasi

Dalam rangka meningkatkan kerjasama ASEAN di bidang transportasi, Pertemuan Informal Pertama Menteri Transportasi ASEAN pada bulan Desember 1995 di Langkawi menyepakati penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri setiap dua tahun yang didahului oleh Pertemuan Para Pejabat Tinggi di Bidang Transportasi (*Senior Transport Officials Meeting/STOM*). Pertemuan juga menilai pentingnya peningkatan kerjasama di sektor transportasi dalam mendukung perdagangan intra-ASEAN (AFTA) dan mengantisipasi perkembangan ekonomi dunia pada umumnya.

Sidang Para Menteri Transportasi ASEAN (ATM) I di Bali, Maret 1996 telah menyepakati *Ministerial Understanding on ASEAN's Cooperation in Transportation* yang mengidentifikasi prioritas bidang kerjasama, mekanisme koordinasi dan pelaksanaan kerjasama di sektor transportasi serta menetapkan STOM sebagai badan eksekutif yang melaksanakan keputusan-keputusan ATM dan program-program di sektor transportasi.

Dalam perkembangannya, ASEAN telah menyepakati berbagai persetujuan kerjasama di sektor transportasi, antara lain dengan ditandatanganinya *ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit* dan menandatangani *Agreement on the Recognition of Commercial Vehicle Inspection Certificates of Goods Vehicles and Public Services Vehicles Issued by ASEAN Member Countries* pada tahun 1998. Kedua perjanjian tersebut disusun dalam rangka menindaklanjuti instruksi para Pemimpin ASEAN mengenai fasilitasi transit barang-barang dalam rangka AFTA.

ASEAN juga telah berhasil melaksanakan *Integrated Implementation programme for the ASEAN Plan of Action in Transport* (1996-1998) yang dilanjutkan dengan disahkannya rencana aksi pengganti yang diberi nama *Successor Plan of*

Action in Transport 1999-2004 pada September 1999. Rencana aksi ini merupakan langkah tindak lanjut yang diambil sektor transportasi dalam melaksanakan rencana aksi dan program-program mewujudkan ASEAN *Vision 2020* yang ditetapkan oleh para Pemimpin ASEAN dalam *Ha Noi Plan of Action* (HPA). Selain itu, pada 1999 juga ditandatangani *Ministerial Understanding on the Development of the ASEAN Highway Network Project* yang merupakan kesepakatan untuk membangun jejaring transportasi darat yang akan menghubungkan semua negara ASEAN.

Di sektor transportasi udara, ASEAN telah menandatangani ASEAN *Memorandum of Understanding on Air Freight Services* di Jakarta pada September 2002. MoU tersebut merupakan langkah awal dalam upaya meliberalisasikan sektor transportasi udara di ASEAN. Dengan MOU tersebut, perusahaan-perusahaan penerbangan negara-negara ASEAN dimungkinkan untuk melakukan pelayanan kargo sampai dengan 100 ton per minggu tanpa ada batasan dalam hal jenis pesawat pengangkut dan frekuensi penerbangan. Pada tahun 2002 juga telah disahkan ASEAN *Transport Roadmap for the Land Transport Infrastructure Integration and Transport Facilitation of Goods*. Peta jalan tersebut berisi langkah-langkah pembangunan yang akan dilakukan ASEAN untuk mewujudkan ASEAN *Highway Network* dan *Singapore Kunming Railway Link* dalam rangka meningkatkan inter-konektivitas dan aksesibilitas di kawasan.

ASEAN telah menyusun ASEAN *Transport Action Plan 2005-2010* yang mencakup kesepakatan untuk meningkatkan kualitas sistem angkutan dan jasa logistik serta mengurangi biaya transaksi. *Action Plan on Air Services Liberalisation* in ASEAN yang disusun guna melaksanakan program kerjasama di sektor transportasi, dalam rangka menindaklanjuti keputusan para Pemimpin ASEAN di Bali pada bulan Oktober 2003 mengenai pembentukan ASEAN *Community* pada 2020 khususnya dalam hal pencapaian *Open Sky Policy* juga disahkan pada 2004.

Kerjasama ASEAN di sektor transportasi juga telah berkembang dengan melibatkan Mitra Wicara, terutama China, Jepang dan Korea. Dengan China telah ditandatangani *Memorandum of Understanding Between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China on Transport Cooperation* yang mencakup kerjasama pembangunan infrastruktur transportasi dan konstruksi, fasilitasi angkutan, keselamatan maritim, pengembangan sumber daya manusia di sektor maritim, angkutan darat dan perairan daratan, penerbangan sipil, kerjasama perkeretaapian, serta pertukaran informasi. Dengan Jepang, antara lain disepakati kerjasama dalam bentuk dialog kebijakan, pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi angkutan kargo, keselamatan maritim, peningkatan efisiensi dan keselamatan dalam jasa angkutan udara internasional, serta penerapan teknologi angkutan untuk meningkatkan keselamatan dan perlindungan terhadap lingkungan.

Sidang ke-13 dan ke-14 ASEAN *Air Transport Working Group* (ATWG), masing-masing di Surabaya (April 2006) dan Bandung (Agustus 2006) antara lain menyetujui *Implementation of the 2002 ASEAN Memorandum of Understanding (MoU) on Air Freight Services, Implementation Measures for Integration of ASEAN Air Travel Sector*. Saat ini ASEAN sedang membahas dan berupaya untuk merampungkan *draft ASEAN Multilateral Agreement on Full Liberalization of Air Freight Services* dan *ASEAN Multilateral Agreement on Air Services*.

Sementara itu, Sidang ke-13 ASEAN *Maritime Working Group* (MTWG) di Bangkok (Mei 2007) antara lain menyetujui *draft akhir Roadmap Towards an Integrated and Competitive Maritime Transport in ASEAN*, menyambut baik keputusan *retreat* ASEAN *Economic Ministers* (AEM) di Bandar Seri Begawan (Mei 2007) untuk menandatangani *Roadmap for Integration of Logistics Services* pada Sidang ke-39 AEM di Filipina bulan Agustus 2007, menyambut baik keikutsertaan Korea untuk pertama kalinya pada MTWG dan

berkomitmen untuk menyegerakan penyelesaian ASEAN-China *Maritime Transport Agreement* (ACMTA).

3.1.2. Telekomunikasi

Kerjasama di sektor telekomunikasi pada awalnya ditangani oleh *Telecommunication Regulators' Council* (ATRC) yang dibentuk oleh forum ASEAN *Directors-General of Telecommunication* pada tahun 1995 yang bertanggung jawab dalam hal penyusunan kebijaksanaan, strategi dan masalah-masalah reguler di bidang telekomunikasi.

Para Menteri Telekomunikasi ASEAN pada bulan Juli 2001 di Kuala Lumpur telah menandatangani *Ministerial Understanding on ASEAN Cooperation in Telecommunications and Information Technology* yang memformalkan kerjasama ASEAN di sektor telekomunikasi. Kesepakatan bidang-bidang kerjasama yang akan dicapai antara lain kerjasama di sektor telekomunikasi dan teknologi informasi melalui pembentukan ASEAN *Information Infrastructure*, mengembangkan kerjasama dalam rangka insiatif e-ASEAN, melaksanakan program-program pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas dalam rangka mengurangi kesenjangan teknologi informasi, serta memfasilitasi perdagangan intra-ASEAN dan investasi di sektor telekomunikasi dan teknologi informasi. Kerjasama sektor telekomunikasi juga mencakup masalah keamanan internet.

Para Menteri Telekomunikasi ASEAN mengeluarkan *Manila Declaration 2002* yang berisi kesepakatan untuk mengembangkan sumber daya manusia di sektor IT, melibatkan swasta dalam membuat tata cara penagihan yang standar dalam jasa internet, mendirikan ASEAN *Network Security Coordination Council*, dan mempercepat pelaksanaan program pembentukan ASEAN *Information Infrastructure*. Para Menteri juga sepakat untuk menyatukan semua kemajuan-kemajuan di sektor teknologi informasi dan komunikasi yang telah dicapai guna menciptakan peluang

melalui sarana digital serta meningkatkan daya saing ASEAN secara keseluruhan.

Dengan negara Mitra Wicara, ASEAN juga telah menjalin kerjasama di bidang telekomunikasi, antara lain dengan China yang ditandai dengan ditandatanganinya ASEAN-China *Memorandum of Understanding on Cooperation in Information and Technology* yang intinya berupa komitmen China untuk menyediakan tempat-tempat pelatihannya guna melatih sumber-sumber daya manusia ASEAN di sektor ini.

Para Menteri Telekomunikasi ASEAN dalam Sidang ke-6 ASEAN *Telecommunications and Information Technology Ministers' Meeting* (TELMIN) di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam tanggal 18-19 September 2006, antara lain telah menyetujui prinsip-prinsip penggunaan ASEAN *ICT Fund* – dengan batas maksimal penggunaan dana untuk setiap proyek sebesar US\$ 100.000 – dan pendirian ASEAN *ICT Centre* (AICTC) yang sifatnya *virtual* dan tidak memerlukan kantor yang permanen. Indonesia, beserta Vietnam, ditunjuk sebagai Wakil Direktur AICTC yang masa tugasnya mulai pada tanggal 31 Maret 2007.

Dalam rangka kerjasama dengan negara Mitra Wicara, para Menteri ASEAN telah menyepakati konsep *Plan of Action on ASEAN+China ICT Cooperative Partnership for Common Development* dan Rencana Aksi untuk pelaksanaan *Beijing Declaration on ASEAN-China Cooperative Partnership for Common Development*. Dengan Jepang disepakati kerjasama di bidang pengembangan prasarana telekomunikasi dengan menggunakan teknologi tanpa kabel dan pengembangan sumber daya manusia; dengan Korea disepakati komitmen bagi pelaksanaan ASEAN *ICT Focus 2005-2010*; dan dengan India antara lain telah disahkan tiga proyek kerjasama di bidang ICT yaitu: India-ASEAN *Seminar on Shruti-Drishti* (suatu aplikasi ICT), India-ASEAN *IT Ministerial and Industry Forum*; dan *e-Network Project*.

3.2. Kerjasama di Sektor Pariwisata

Pertemuan Pertama para Menteri Pariwisata ASEAN di Cebu City tahun 1998 menghasilkan *Ministerial Understanding on ASEAN Cooperation in Tourism* untuk mengembangkan kerjasama pariwisata yang lebih fokus. Untuk mendukung pelaksanaan *ASEAN Vision 2020*, *Ministerial Understanding* ini dilengkapi dengan *Plan of Action on ASEAN Cooperation in Tourism* yang berisi rencana langkah-langkah kongkrit beberapa prioritas area kerjasama yang akan dilaksanakan.

Kerjasama ASEAN di sektor pariwisata mengalami peningkatan pada bulan Nopember 2001, saat para Kepala Negara ASEAN menyepakati percepatan proses integrasi regional melalui percepatan liberalisasi sektor-sektor jasa dan perdagangan ASEAN. Untuk itu, disepakati juga penyusunan perjanjian yang menjadi payung kerjasama ASEAN di sektor pariwisata yakni "*ASEAN Tourism Agreement*" (ATA). Untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, dibentuk *High Level Task Force* yang dipimpin oleh Menteri Pariwisata Kamboja dengan tugas menyusun *draft* ATA.

ATA ditandatangani pada tahun 2002 di Phnom Penh, Kamboja yang mencerminkan prioritas pengembangan pariwisata di negara-negara ASEAN. Diharapkan ATA akan menciptakan iklim kondusif bagi industri pariwisata ASEAN dan meningkatkan arus wisatawan di antara negara-negara anggota serta menjadikan ASEAN sebagai wilayah tujuan wisata tunggal.

Untuk menindaklanjuti penandatanganan ATA, disusun langkah-langkah restrukturisasi berbagai *task force* yang ada dan bekerjasama dengan badan ASEAN terkait lainnya dalam melaksanakan ATA. ATA yang berisi rencana langkah-langkah kongkrit kerjasama yang akan diambil telah disahkan oleh Menteri-menteri Pariwisata di Vientiane, Pebruari 2004 berupa *Vientiane Declaration* sebagai bentuk penegasan komitmen untuk pengembangan kerjasama pariwisata ASEAN. Indonesia telah meratifikasi ATA pada bulan Januari 2007.

Dalam upaya pengembangan kualitas pariwisata dan sumber daya manusia di bidang pariwisata, antara lain telah disepakati kriteria dan persyaratan *eco-tourism*, *home stay*, jasa makanan dan minuman. Sedangkan dalam kerangka kerjasama antara ASEAN dan Korea, telah dilaksanakan, antara lain, penyelenggaraan pelatihan bahasa Korea bagi pemandu wisata ASEAN dan penyelenggaraan pelatihan bagi para pejabat pariwisata ASEAN.

Dalam perkembangannya, kerjasama pariwisata ditandai antara lain dengan adanya kesepakatan para Menteri Pariwisata ASEAN pada *ASEAN Tourism Forum* (ATF) di Davao bulan Januari 2006 untuk mengedepankan upaya mendorong promosi wisata intra dan antar ASEAN serta pentingnya upaya menarik wisatawan muda sebagai segmen pasar yang potensial. Dalam hal ini, diperlukan strategi dan mekanisme yang efektif untuk mendorong promosi bersama ASEAN sebagai suatu tujuan tunggal (*single-destination*), termasuk pendirian pusat-pusat pariwisata ASEAN di pasar internasional. Upaya dimaksud dilaksanakan dalam rangka *Visit ASEAN Campaign* (VAC).

ATF di Singapura tanggal 26 Januari – 2 Pebruari 2007, telah memutuskan beberapa kesepakatan antara lain yaitu mendukung pengaktifan kembali *ASEAN Tourism Promotional Chapter* (APCT) yang melibatkan perwakilan pariwisata negara-negara ASEAN, seluruh Kedutaan dan Kosulat negara ASEAN di Sydney, Beijing dan Seoul; mengharapakan agar para Menteri Perhubungan negara anggota ASEAN dapat segera mengimplementasikan *Air Services Liberalisation Roadmap* pada tahun 2010; menyambut baik pengaktifan kembali *Cruise Working Group* untuk memperkuat kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN; mendukung upaya kerjasama sub-regional *Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area* (BIMP-EGA) dan *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle* (IMT-GT) dalam mempromosikan *single tourism investment destination* dan pembentukan ASEAN-China Centre dan ASEAN-RoK Centre bagi promosi perdagangan, investasi dan pariwisata ASEAN serta mendukung upaya ASEAN-Japan Centre dalam rangka promosi pariwisata ASEAN melalui produksi video dan pertukaran pemuda.

3.3. Kerjasama di Sektor Keuangan

Para Menteri Keuangan ASEAN telah menandatangani *Ministerial Understanding on ASEAN Cooperation in Finance* di Thailand tahun 1997. *Ministerial Understanding* tersebut menjadi kerangka peningkatan kerjasama di bidang keuangan yang mencakup keuangan dan perbankan, pasar uang dan modal, masalah-masalah pabean, asuransi, perpajakan dan pengembangan SDM di sektor keuangan. Para Menteri juga telah menandatangani *ASEAN Agreement on Customs* yang bertujuan untuk membantu mempercepat realisasi AFTA karena mencakup aturan-aturan yang memfasilitasi perdagangan intra-ASEAN dan arus investasi. Perjanjian ini mencakup kerjasama di bidang anti penyelundupan, kerjasama teknik, modernisasi pabean dan meningkatkan kemampuan pabean untuk memenuhi tuntutan dan tantangan yang akan datang.

Pertemuan Para Menteri Keuangan ASEAN ke-10 di Siem Reap, Kamboja, bulan April 2006 antara lain telah menyepakati untuk melakukan upaya mendorong investasi infrastruktur, peningkatan efisiensi dan peningkatan partisipasi sektor swasta serta terus meningkatkan kerjasama dan integrasi pasar modal seperti peluncuran *ASEAN Index*, pelaksanaan *ASEAN Finance Ministers' Investor Seminar* pertama tahun 2004 di New York, seminar kedua tahun 2005 di London dan seminar ketiga bulan September 2006 di Hongkong dan Singapura.

4. Kerjasama di Sektor Investasi

Di sektor investasi, kerjasama ASEAN diawali dengan dikemukakannya gagasan pembentukan suatu kawasan investasi ASEAN pada Pertemuan Pemimpin ASEAN di Bangkok pada tahun 1995. Untuk menindaklanjuti gagasan tersebut, pada tahun 1996, dibentuk Komite Kerja Kawasan Investasi ASEAN (WC-AIA), yang berada dibawah naungan SEOM, dengan mandat menyiapkan sebuah Persetujuan Dasar tentang Kawasan Investasi ASEAN (*Framework Agreement on ASEAN Investment Area/FA-AIA*).

Framework Agreement on ASEAN Investment Area ditandatangani di Makati City, Filipina, pada tahun 1998. Bersamaan dengan penandatanganan tersebut juga disahkan pembentukan AIA Council. FA-AIA mencakup seluruh kegiatan investasi, kecuali investasi *portfolio* dan kegiatan investasi lainnya yang sudah tercakup pada perjanjian ASEAN lainnya, seperti *the ASEAN Framework Agreement on Services*. Tujuan utama yang hendak dicapai adalah menciptakan suatu Kawasan Investasi ASEAN yang liberal dan transparan, sehingga dapat meningkatkan arus investasi ke kawasan. Liberalisasi investasi bagi negara anggota ASEAN disepakati untuk mulai berlaku pada tahun 2010, sedangkan dengan negara non-ASEAN disepakati untuk direalisasikan pada tahun 2020.

Kerangka kerja AIA mencakup semua arus investasi asing langsung (FDI) ke ASEAN maupun investasi langsung antar negara-negara ASEAN. Persetujuan tersebut antara lain akan mengikat negara-negara anggota untuk menghapus hambatan-hambatan investasi, meliberalisasi peraturan-peraturan dan kebijaksanaan investasi, memberi persamaan perlakuan nasional dan membuka investasi di industrinya terutama sektor manufaktur. Dengan menciptakan ASEAN sebagai suatu kawasan investasi yang lebih berdaya saing dan terbuka, AIA diharapkan dapat menarik arus investasi langsung ke ASEAN.

Sejak tahun 2003, ASEAN-6 telah memberikan *national treatment* untuk sektor manufaktur kepada investor ASEAN, sementara untuk CLMV akan dimulai pada tahun 2010. Sementara untuk sektor pertanian, perikanan, kehutanan, tambang, dan jasa, ASEAN-6 dan Kamboja menyetujui memberikan *national treatment* pada tahun 2010, Vietnam tahun 2010 sementara Laos dan Myanmar pada tahun 2015.

Foreign Direct Investment (FDI) ASEAN tahun 2005 mencapai US\$38 milyar, atau meningkat 48% dibandingkan tahun lalu. Sementara, total FDI ASEAN untuk caturwulan pertama tahun 2006 mengalami peningkatan (90%) menjadi US\$14 milyar bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Pertemuan ke-9 *ASEAN Investment Area Council*, disepakati kerjasama investasi difokuskan pada upaya meningkatkan investasi intra ASEAN dan menyusun buku statistik investasi negara anggota ASEAN yang komprehensif.

5. Kerjasama di Sektor Komoditi dan Sumber Daya Alam

Kerjasama ASEAN di sektor komoditi dan sumber daya alam secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua sub-sektor, yaitu kerjasama di sub-sektor pertanian dan kehutanan serta kerjasama di sub-sektor energi dan mineral.

5.1. Kerjasama di Sub-sektor Pertanian dan Kehutanan

Sektor pertanian dan kehutanan merupakan salah satu sub-sektor utama dalam perekonomian ASEAN mengingat hampir semua negara anggota ASEAN merupakan negara agraris yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas. Untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dan kehutanan ASEAN, telah disusun *Memorandum of Understanding on ASEAN Cooperation and Joint Approaches on Agriculture and Forest Products Promotion Scheme*.

Kerjasama di sektor pangan, pertanian dan kehutanan meliputi *food security, food handling, crops*, peternakan, perikanan, *agricultural training and extension, agricultural cooperatives, forestry* serta kerjasama di bidang skema promosi produk-produk pertanian dan kehutanan. Kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk-produk pangan, pertanian dan kehutanan ASEAN, serta meningkatkan *food security arrangement* dan kesamaan posisi ASEAN pada forum-forum internasional.

Forum kerjasama ASEAN di sub-sektor pertanian dan kehutanan terdiri dari ASEAN *Ministers on Agriculture and Forestry* (AMAF) yang didukung oleh *Senior Officials Meeting* (SOM) dan badan-badan pendukung lainnya, seperti *Sectoral Working Group* dan *Committee*. Selain itu AMAF didukung pula oleh *Task force* dan *expert groups* yang bertugas untuk menentukan rencana implementasi kegiatan dalam periode waktu tertentu.

Dalam rangka pengimplementasian Ha Noi Plan Action (HPA) di bidang pertanian, pangan dan kehutanan, para Pemimpin

negara-negara ASEAN pada tahun 1998 telah menyetujui dokumen *Strategic Plan of Action Cooperation in Food, Agriculture, and Forest for the 1999-2004*¹. Rencana aksi tersebut kemudian direview kembali pelaksanaannya pada 2004 sekaligus dilanjutkan dengan *Strategic Plan of Action Cooperation in Food, Agriculture, and Forest for the 2005-2010*.²

Perkembangan kerjasama sub-sektor pertanian dan kehutanan dapat digambarkan sebagai berikut:

5.1.1. Pangan

Mengingat beras merupakan bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat ASEAN, ASEAN terus berupaya meningkatkan produktivitas tanaman padi untuk meningkatkan ketahanan pangan. Sidang ke-24 AMAF menyetujui pelaksanaan ASEAN *Food Security Information System* (AFSIS) pada 2003 serta disetujui usul membentuk pilot proyek *East Asia Rice Reserve Management System* untuk kurun waktu 3 tahun mendatang. Di bidang makanan halal, ASEAN sedang menyelesaikan *draft ASEAN Scheme for the Accreditation of Halal Food Establishment* dan draf *Registration and compilation of Halal Food Additives Used in ASEAN*.

Untuk mengamankan suplai makanan di kawasan, Pertemuan AMAF ke-28 di tahun 2006 sepakat untuk segera merampungkan pembahasan ASEAN *Food Security Information System* (AFSIS). AFSIS merupakan suatu sistem yang dapat melakukan analisis dan menyebarkan data serta informasi mengenai *food security* diantara negara-negara ASEAN *Plus Three*.

1 *Strategic Plan of Action Cooperation in Food, Agriculture, and Forest for the 1999-2004* ditandatangani oleh pemimpin ASEAN pada KTT ke-6 di Hanoi- Vietnam, 15-16 Desember 1998.

2 Para menteri menyetujui rancangan *Strategic Plan of Action Cooperation in Food, Agriculture, and Forest for the 2005-2010* pada Sidang AMAF ke 26 di Yangon, Myanmar, 7 Oktober 2004.

Sebagai bagian dari upaya untuk mengharmonisasikan standar kualitas buah-buahan populer di kawasan dan untuk mengedepankan pemasarannya didalam dan diluar Asia Tenggara, Pertemuan AMAF ke-28 telah mengesahkan *ASEAN Harmonized Standards for Mango, Pineapple and Banana*. Sementara itu, guna meningkatkan kualitas dari produk sayur mayur di negara-negara anggota ASEAN, Pertemuan AMAF ke-28 telah menyepakati suatu manual standar yang mencakup *ASEAN Good Agricultural Practices (GAP)* untuk petani di kawasan.

5.1.2. Pertanian

Para Menteri Pertanian ASEAN, pada Sidang AMAF ke-25 di Kuala Lumpur bulan Agustus 2003 sepakat untuk mendirikan *ASEAN Plant Health Cooperation Network (APHCN)* dalam rangka melindungi kehidupan dan kesehatan tumbuh-tumbuhan di kawasan ASEAN.

Perkembangan lainnya dalam kerjasama pertanian ASEAN adalah perjanjian untuk melaksanakan program *East Asia Emergency Rice Reserve (EAERR)* sebelum implementasi penuh pada tahun 2008. Sebelumnya, telah diimplementasi proyek uji coba selama tiga tahun dibawah kerangka kolaborasi *ASEAN Plus Three* guna membentuk EAERR. Melalui kolaborasi dimaksud, disepakati bahwa negara-negara ASEAN *Plus Three* akan memberikan kontribusi secara sukarela dalam jumlah tertentu atau cadangan beras untuk keadaan darurat di negara-negara anggota ASEAN.

5.1.3. Peternakan

Pelaksanaan kerjasama ASEAN di sub-sektor peternakan meliputi kerjasama di bidang peraturan tentang produksi dan penggunaan vaksinasi hewan, promosi produk hewan, program peningkatan kerjasama penanggulangan penyakit hewan dan *Animal Health and Production Information System*

for ASEAN (AHIPSA). Selain itu, negara-negara anggota juga menyetujui kerjasama dalam bidang *Common Stand on Cocex Issues and Veterinary Drug Residues in Food*. Selanjutnya, dalam rangka menanggulangi penyakit flu burung yang menyerang beberapa negara anggota ASEAN, para menteri setuju untuk membentuk sebuah Pokja yang menangani isu tersebut di bawah *ASEAN Sectoral Working group on Livestock*.³

ASEAN Animal Health Trust Fund (AAHTF) yang merupakan perkembangan utama dari kerjasama ASEAN di bidang peternakan telah ditandatangani pada tahun 2006. AAHTF merupakan sumber dana khusus untuk kegiatan-kegiatan bersama kawasan guna menanggulangi penyakit-penyakit menular dari hewan ternak. Pada Pertemuan AMAF ke-28 di Singapura pada bulan Nopember 2006, para Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN menyamakan persepsi bahwa AAHTF dapat dimanfaatkan dalam mengajukan proyek-proyek untuk menghindari, mengendalikan dan memusnahkan penyakit-penyakit yang sangat membahayakan masyarakat dan hewan ternaknya.

Untuk keperluan pendanaan awal AAHTF, negara-negara anggota telah sepakat untuk memberikan kontribusi, dimana Indonesia memberikan kontribusi sebesar US\$ 300.000 yang akan dibayar dalam kurun waktu enam tahun mulai tahun 2007.

5.1.4. Kehutanan

Pembahasan kerjasama di sub-sektor kehutanan ASEAN pada awalnya dilakukan oleh *ASEAN Sectoral WG on Forestry*, sejak tahun 1998, yang kemudian diubah menjadi ASOF (*ASEAN Senior Officials on Forestry*). Di bawah ASOF terdapat badan-badan subsider yakni *Expert Group on Herbal and Medicinal Plant*; *Expert Group on Research and Development*; *Expert Group on Criteria and Indicator*, *Seminar on Forestry Issues* dan Pertemuan Kalangan Swasta.

3 Hasil Sidang AMAF ke 26, Yangoon, Myanmar, 7 October 2004.

Perkembangan terakhir kerjasama kehutanan ASEAN adalah hasil-hasil Sidang AMAF ke-28 tahun 2006, yang menyepakati untuk meneruskan upaya membentuk ASEAN *Social Forestry Network* (ASFN), yang bertujuan untuk menciptakan kesadaran masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan serta pemangku kepentingan lainnya untuk melestarikan atau melindungi hutan serta mengupayakan kesinambungan hutan.

Selain itu, Pertemuan AMAF ke-28 juga membahas suatu perjanjian yang ditujukan untuk mendukung jasa dari *National Focal Points Working Group on Forest Products Promotion Scheme* dengan mencari cara lebih baik untuk mempromosikan produk-produk hutan dari negara-negara anggota ASEAN di pasar kayu dunia. Dengan menggunakan standar internasional kualitas produk, ASEAN telah mengambil langkah kedepan dengan memulai suatu Pan-ASEAN *Timber Certification Scheme* atau skema sertifikasi kayu Pan-ASEAN. Disamping itu, disepakati juga upaya untuk merampungkan skema sertifikasi yang dilakukan secara terus menerus. Meskipun telah diadopsi di ASOF ke 28, masih diperlukan penyempurnaan lebih lanjut terhadap Pan-ASEAN *Timber Certification Scheme* agar skema tersebut tidak merugikan kepentingan anggota ASEAN, termasuk Indonesia.

5.1.5. Perikanan

Perkembangan kerjasama ASEAN di sub-sektor perikanan tidak terlepas dari perkembangan di sub-sektor kehutanan, dan diharapkan akan lebih fokus dan terarah. Pertemuan Tingkat Menteri Pertama ASEAN-SEAFDEC (*Southeast Asian Fisheries Development Center*), di Bangkok, 24 Nopember 2001 telah menghasilkan resolusi beserta rencana aksi untuk menangani masalah perikanan terpadu di kawasan. Disamping itu, telah dihasilkan pula 2 dokumen penting, yaitu *Resolution on Sustainable Fisheries for Food Security for the ASEAN Region* dan *Plan of Action on Sustainable Fisheries for Food Security for*

the ASEAN Region.

Sidang AMAF+3 ke-6 di Singapura bulan Nopember 2006, telah menandatangani *Letter of Understanding (LoU) between the Secretary-General of ASEAN and the Secretary-General of South East Asian Fisheries Development Centre (SEAFDEC)*, yang intinya mengedepankan kolaborasi dalam pengelolaan yang berkesinambungan terhadap sumber-sumber ikan.

Pada tahun 2006 ASEAN berhasil merampungkan proses pembuatan konsep ASEAN *Guidelines on Responsible Movement of Live Food Fin Fish*. Sebelumnya, ASEAN dan SEAFDEC telah sepakat untuk secara bersama mengimplementasikan 2 (dua) inisiatif baru, yaitu *Seafood Safety Network* serta *Chloramphenicol* dan *Nitrofurans Residues in Aquaculture Fish and Fish Products*.

5.2. Kerjasama Sektor Energi dan Mineral

Kerjasama ASEAN di sektor mineral dan energi diarahkan untuk membangun jaringan/interkoneksi di bidang energi dan utiliti untuk sub-sektor kelistrikan dan gas bumi di kawasan ASEAN melalui pembangunan ASEAN *Power Grid* dan jaringan pipa gas alam. Kerjasama juga diarahkan untuk mempromosikan pengembangan sumber daya energi yang dapat diperbaharui (*renewable*). Kerjasama sektor energi ini meliputi bidang minyak dan gas bumi, batubara, kelistrikan, energi baru dan yang dapat diperbaharui serta konservasi energi. Kegiatan masing-masing bidang dilaksanakan oleh suatu kelompok kerja (*working group*). Di samping kelompok-kelompok kerja tersebut, telah pula didirikan ASEAN-EC *Energy Management Training and Research Centre* yang kemudian ditransformasikan menjadi ASEAN *Centre for Energy* (ACE), yang berkedudukan di Jakarta.

ASEAN telah melakukan berbagai upaya kolektif untuk menjamin ketahanan energi melalui diversifikasi, pengembangan dan konservasi sumber daya, penggunaan energi secara efisien,

dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Sejalan dengan *Agreement on ASEAN Energy Cooperation* (1986), ASEAN telah pula menyelesaikan *Medium-Term Programme of Action on Energy Cooperation* 1995-1999 dan 1999-2004.

ASEAN *Plan of Action for Energy Cooperation* 2004-2009 sedang dilaksanakan di berbagai sektor, antara lain listrik, minyak dan gas, batubara, sumber energi baru dan terbarukan, efisiensi dan konservasi energi, energi dan lingkungan, serta kebijakan dan perencanaan energi. ASEAN juga memberlakukan skema ASEAN *emergency petroleum sharing*. Upaya-upaya kerjasama dititikberatkan pada pembentukan pengaturan regional yang saling terkait untuk listrik dan gas alam melalui ASEAN *Power Grid* dan *Trans-ASEAN Gas Pipeline Projects*. ASEAN-EC *Energy Management Research and Training Centre* (AEEMTRC) diubah menjadi ASEAN *Energy Centre* dan berkedudukan di Jakarta sejak 1998.

5.2.1. Energi

Kerjasama struktural ASEAN di sektor energi untuk tingkat menteri ditandai dengan dibentuknya ASEAN *Economic Ministers Meeting on Energy Cooperation* (AEMMEC), dan *Senior Officials Meeting on Energy Cooperation* (SOME). Pada perkembangannya, pada Sidang AEMMEC ke-13 di Denpasar, Indonesia, 26 Oktober 1995, disepakati untuk merubah AEMMEC menjadi ASEAN *Ministers on Energy Meeting* (AMEM). Demikian juga untuk sebutan pertemuan tingkat pejabat tinggi (SOME) dirubah menjadi *Senior Officials Meeting on Energy* (SOME).

Dalam AMEM terdapat 5 kelompok kerja (*Sectoral Working Group*), yaitu; Forum para pimpinan jaringan kelistrikan ASEAN, *Head of ASEAN Power Utilities/Authorities* (HAPUA), Dewan ASEAN di bidang perminyakan, ASEAN *Council on Petroleum* (ASCOPE), Forum ASEAN di bidang batubara, ASEAN *Forum on Coal* (AFOC), kelompok kerja bidang efisiensi energi dan

konservasi, *Energy Efficiency and Conservation - Sub Sector Network* (EE&C-SSN) dan kelompok kerja bidang energi baru dan terbarukan, *New and Renewable Sources of Energy -Sub Sector Network* (NRSE-SSN).

Para Menteri Energi ASEAN dalam Sidangnya ke-22 di Makati, Filipina, 9 Juni 2004, telah menyetujui ASEAN *Plan of Action for Energy Cooperation* (APAEC) 2004-2009. Rencana aksi ini mendukung *Energy Integration Roadmaps* yang telah disetujui sebelumnya pada sidang AMEM ke 20 di Bali.

Pada Sidang AMEM ke-23 di Siem Reap, Kamboja, bulan Juli 2005, telah disepakati pembaharuan ASEAN *Petroleum Security Agreement* (APSA) 1986. Pada Sidang AMEM ke-24 di Vientiane, Laos bulan Juli 2006, disepakati bahwa negara-negara ASEAN akan bekerjasama untuk merampungkan konsep APSA 2005 beserta dokumen lampirannya yaitu *Standard Operating Procedure* (SOP) dan *Coordinated Emergency Response Measures* (CERM). Direncanakan kedua dokumen tersebut akan ditandatangani para Menteri Energi ASEAN pada pertemuan AMEM ke-25 tahun 2007.

Selain memperkuat kerjasama intra-ASEAN, ASEAN juga berupaya pula memperkuat kerjasama di sektor energi dengan negara-negara Mitra Wicaranya. Sebagai upaya untuk menggalang kerjasama dalam meningkatkan efisiensi penggunaan energi, pada KTT ASEAN ke-12 di bulan Januari 2007, para Kepala Negara *East Asia Summit* (negara-negara ASEAN, China, Jepang, Republik Korea, India, Australia, Selandia Baru) telah menandatangani Cebu *Declaration on East Asia Energy Security*.

Perkembangan dan kemajuan-kemajuan sektoral yang telah dicapai antara lain :

5.2.1.1. Kelistrikan - ASEAN Power Grid (HAPUA-Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities)

ASEAN *Power Grid* merupakan proyek kerjasama ASEAN di bidang kelistrikan yang bertujuan untuk membangun jaringan interkoneksi listrik ke seluruh negara-negara anggota ASEAN. Sasaran dari pembangunan jaringan interkoneksi listrik tersebut adalah untuk memungkinkan penduduk yang tinggal di daerah-daerah terpencil atau belum terjangkau listrik dapat menikmati manfaat masuknya listrik ke wilayah mereka.

Sidang ke-22 *Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities* (HAPUA) di Kota Kinabalu, Malaysia, 15-16 Mei 2006, antara lain telah membahas draft MoU *on the ASEAN Power Grid*, khususnya menyangkut pasal-pasal terkait dengan interkoneksi listrik di daerah perbatasan. Sidang tersebut meminta ASEAN *Center for Energy* (ACE) untuk bekerjasama dengan *Working Group-Working Group* HAPUA menyangkut berbagai aktivitas mengenai isu energi terbarukan, pemanfaatan batubara untuk energi yang bersih dan ramah lingkungan, dan juga pembangunan ASEAN *Power Grid*.

5.2.1.2. Trans-ASEAN Gas Pipeline Project (TAGP)

Seperti halnya ASEAN *Power Grid*, pembangunan jaringan pipa gas ke seluruh negara anggota ASEAN mempunyai sasaran untuk memungkinkan penduduk yang berdomisili di wilayah-wilayah terpencil negara-negara anggota ASEAN dapat menikmati manfaat bahan bakar gas untuk memasak menggantikan kayu bakar.

Sidang ke-24 ASEAN *Ministers of Energy* (AMEM) di Vientiane, Laos, tanggal 26-27 Juli 2007 telah mengevaluasi implementasi dari proyek Trans-ASEAN *Gas Pipeline* dan meminta agar kemajuan yang telah dicapai dalam proyek pembangunannya dipertahankan dan bahkan agar ditingkatkan. Pertemuan ke-20 Trans-ASEAN *Gas Pipeline*

(TAGP) *Task Force* yang berlangsung di Hanoi, Vietnam, tanggal 7-8 September 2006 telah membahas perkembangan pembangunan jaringan pipa gas di tiap negara anggota ASEAN, jumlah produksi lapangan produksi gas di tiap negara anggota ASEAN, dan penyempurnaan *Master Plan* TAGP. Pertemuan tersebut meminta agar negara-negara anggota ASEAN melakukan verifikasi atas data-data produksi gas masing-masing negara yang tercantum dalam *Master Plan* TAGP, dan menyampaikan perkiraan pencadangan pasokan gas masing-masing negara tiap tahunnya hingga tahun 2020.

Pertemuan ke-13 ASEAN *Council on Petroleum's* (ASCOPE) *Joint Committees Meeting on the 20th TAGP Task Force* di Hanoi tanggal 9 September 2006 yang berlangsung *back-to-back* dengan Pertemuan ke-20 TAGP *Task Force* merupakan pertemuan dimana ASCOPE memberikan sumbang saran atas pembangunan Trans-ASEAN *Gas Pipeline*, termasuk dalam menyempurnakan *Master Plan* TAGP. ASCOPE cenderung menyarankan agar model jaringan gas ASEAN dapat meniru model jaringan pipa gas yang menghubungkan berbagai kota dan daerah di Norwegia (*Norwegian Gas Model*). ASCOPE menyampaikan 3 (tiga) faktor keberhasilan pembangunan jaringan pipa gas Norwegia tersebut, yakni adanya perangkat peraturan di bidang gas yang lengkap dan jelas, efisiensi pada operasionalisasi penyaluran gas, termasuk terkait dengan spesifikasi standar konstruksi pipa dan prosedur pemeliharaan pipa, serta struktur jaringan yang terpadu didukung infrastruktur yang memadai.

Adapun perkembangan kerjasama ASEAN di bidang gas ditandai dengan telah berlangsungnya secara reguler forum pertemuan antara negara-negara anggota ASEAN produsen gas dengan negara-negara anggota ASEAN dan Mitra Wicara konsumen gas yang berlangsung setiap tahun. Negara-negara ASEAN produsen gas seperti Indonesia, Malaysia dan Vietnam, serta negara-negara ASEAN dan Mitra Wicara seperti Singapura, Thailand, China dan Jepang telah melakukan pertemuan ASEAN+3 sebanyak 3

kali pada tingkat Pemerintah dan 2 kali pada tingkat pengusaha.

5.2.1.3. Coal (ASEAN Forum on Coal/AFOC)

Batubara merupakan sumber energi alternatif pengganti minyak bumi yang persediaannya di muka dan dalam kandungan tanah sudah semakin terbatas dengan makin jaranginya temuan baru sumber-sumber minyak. Pertemuan ke-3 ASEAN+3 *Energy Security Forum* di Singapura tanggal 17 Februari 2007 mencatat semakin jaranginya sumber-sumber energi berbasis fosil menuntut langkah-langkah antisipatif dalam mengamankan pasokan energi di negara-negara ASEAN dan *Plus Three*. Batubara sebagai sumber energi alternatif yang dapat diandalkan perlu diperluas pemanfaatannya di seluruh lapisan masyarakat negara-negara ASEAN. Untuk itu dibutuhkan kemitraan Pemerintah-Swasta dalam upaya memperluas pemanfaatan batubara sebagai sumber energi baru menggantikan minyak bumi.

Pertemuan ASEAN+3 *Energy Security Forum* tersebut menyambut baik hasil-hasil Pertemuan ASEAN Forum on Coal yang telah berlangsung di Filipina tanggal 16-17 Nopember 2005, dimana berhasil diidentifikasi berbagai strategi promosi penggunaan batubara sebagai sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan.

5.2.2 Mineral

Untuk membahas kerjasama di sub-sektor mineral, ASEAN telah membentuk forum komunikasi yang dinamakan ASEAN *Senior Officials Meeting on Minerals* (ASOMM). Maksud dan tujuan pembentukan ASOMM adalah sebagai wadah untuk membahas isu-isu penting bidang mineral di negara-negara ASEAN yang meliputi semua aspek teknis dan kebijakan serta pengaturan bidang sumber daya mineral termasuk aspek geologi dan pertambangan yang dimulai dari survey umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, transportasi termasuk pengembangan sumber

daya manusia/tenaga kerja, lingkungan, perdagangan dan investasi.

Sidang ASOMM ke-5 di Yogyakarta tanggal 29 April - 1 Mei 2003, telah mencatat berbagai kemajuan yang dicapai antara lain penyusunan Program Aksi 2001-2005, TOR, *Rule of Procedures* (ROP) dan *Vision of ASEAN Cooperation on Minerals* oleh *Mineral Task Force Team* ASEAN; pembahasan mengenai masalah perdagangan dan investasi mineral di kawasan ASEAN; dan pembentukan empat *Working Groups* yaitu *Working Group on Trade and Investment in Minerals* (WGTIM); *Working Group on Training in Mineral* (WGTM); *Working Group on Mineral Data Base* (WGMD) yang diketuai oleh Indonesia; *Working Group on Environment-Friendly Mining and Mineral Processing* (WGEFMP).

Sidang ke-7 ASOMM di Kuching, Malaysia bulan Juni 2005 antara lain menyepakati untuk mengadakan forum ASOMM+3 dengan mengundang kehadiran dan kerjasama China, Jepang dan Korea Selatan. Hal ini sebagaimana dimandatkan pula oleh para Menteri bidang Mineral negara-negara ASEAN pada Pertemuan ASEAN *Ministerial Meeting on Minerals* di Kuala Lumpur tanggal 4 Agustus 2005. Dalam Sidang Pertama ASOMM+3 diharapkan dapat diadakan dialog dan kerjasama ASEAN dan negara-negara *Plus Three* dalam mengembangkan sumber daya mineral dan meningkatkan program kerjasama yang saling menguntungkan dalam kerangka Rencana Aksi Kerjasama Mineral ASEAN tahun 2005-2010.

ASOMM+3 diharapkan dapat memfasilitasi investasi dan perdagangan di sektor mineral untuk keuntungan bersama, meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan untuk pembangunan berkelanjutan di sektor mineral, serta mendorong partisipasi sektor swasta dan kerjasama sektor swasta umum dalam pengembangan dan/atau pelaksanaan kerjasama ASEAN+3 dalam program dan kegiatan yang berkelanjutan di berbagai daerah di Asia Tenggara yang mengandung atau berpotensi sumber daya mineral.

6. Kerjasama ASEAN di Sektor Usaha Kecil dan Menengah

Kerjasama ASEAN di sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah dirintis sejak tahun 1995, yang ditandai dengan dibentuknya Kelompok Kerja Badan-Badan UKM ASEAN (*ASEAN Working Group on Small and Medium-size Enterprises Agencies*). Dalam pertemuan pertamanya di Jakarta tanggal 24 April 1995 telah disahkan Rencana Aksi ASEAN bagi pengembangan UKM. Pertemuan ini juga menyepakati bahwa pada tahap awal kerjasama ASEAN di bidang UKM akan terfokus pada sektor manufaktur.

Sidang ASEAN *Economic Minister Meeting* (AEM) ke-31 di Singapura tanggal 27 September–2 Oktober 1999 telah menyepakati kerangka kerjasama yang melibatkan UKM dalam ASEAN *Industrial Cooperation* (AICO). Kerangka kerjasama ini didasari oleh pemahaman bahwa UKM sebagian besar melaksanakan fungsinya sebagai industri pendukung bagi perusahaan-perusahaan besar, disamping untuk memberikan kesempatan kepada UKM untuk berpartisipasi secara langsung dalam perdagangan intra ASEAN.

ASEAN *Policy Blueprint for SMEs Development* (APBSD) 2004-2014 telah disahkan pada Sidang AEM ke-36 di Jakarta, 3 September 2004. *Policy blueprint* tersebut bertujuan untuk menjamin adanya transformasi UKM ASEAN yang memiliki daya saing, dinamis, inovatif dalam rangka menuju integrasi ekonomi ASEAN. Hal ini dapat diwujudkan melalui suatu *cooperative framework* yang melibatkan secara aktif peran sektor swasta di ASEAN disamping meningkatkan budaya wirausaha, inovasi dan *networking* di kalangan UKM, memberikan fasilitas kepada UKM untuk memperoleh akses informasi, pasar, SDM, kredit dan keuangan serta teknologi modern. Berdasarkan cetak biru tersebut telah dipilih lima bidang kerjasama strategis dalam pengembangan UKM ASEAN, yaitu: Pembangunan Sumber Daya Manusia; Dukungan dalam Bidang Pemasaran; Bantuan dalam Bidang Keuangan; Pengembangan Teknologi; dan Penerapan Kebijakan yang Kondusif.

Dalam perkembangannya, kerjasama ASEAN di sektor UKM lebih difokuskan pada tindak lanjut proyek-proyek peningkatan kapasitas

dan daya saing UKM di bawah payung *Vientiane Action Plan* dan ASEAN *Policy Blueprint for SMEs Development* (APBSD) 2004-2014; kerjasama dengan negara-negara Mitra Wicara; serta hal-hal berkaitan dengan prospek pengembangan UKM di tengah kemajuan kerjasama ekonomi ASEAN. Dari 20 proyek yang disepakati dalam APBSD, sembilan proyek diantaranya telah selesai, tiga sedang berjalan, tujuh dalam persiapan dan satu tidak dapat dilaksanakan. Proyek-proyek APBSD 2004-2014 yang belum dapat dilaksanakan pada umumnya disebabkan oleh belum jelasnya pendanaan bagi proposal yang telah masuk serta adanya permintaan sejumlah Mitra Wicara agar usulan proyek-proyek baru dapat dikaitkan dalam kerangka FTA dengan ASEAN.

7. Kerjasama Ekonomi Sub-Regional ASEAN

Pelaksanaan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR) dilakukan untuk mengambil manfaat dan saling melengkapi dalam mempercepat pembangunan ekonomi melalui peningkatan arus investasi, pengembangan infrastruktur, pengembangan sumber daya alam dan manusia, serta pengembangan industri. Tujuan utama pembentukan sub-wilayah pertumbuhan adalah untuk memadukan kekuatan dan potensi-potensi tiap-tiap wilayah yang berbatasan sehingga menjadi wilayah pertumbuhan yang dinamis. Kerjasama ekonomi sub-regional, sering juga disebut sebagai segitiga pertumbuhan (*growth triangle*) atau wilayah pertumbuhan (*growth area*), merupakan salah satu bentuk keterkaitan (*linkage*) ekonomi antar daerah dengan memiliki unsur internasional. Daerah anggota kerjasama tersebut lebih dari satu negara.

Dalam konteks ASEAN, sesuai dengan *Agenda for Greater Economic Integration*, pembentukan KESR didasarkan pada prinsip keterbukaan dalam pembangunan wilayah (*open regionalism*) dan bukan pada pembentukan blok kawasan yang tertutup (*building block*). Berbagai kendala yang muncul dalam perkembangan kerjasama *growth areas* ini menjadi *feed back* bagi kemajuan skema pertumbuhan wilayah ini dan ASEAN terus mengupayakan inisiatif-inisiatif baru dalam kerangka pengembangan kerjasama tersebut seperti pembentukan ASEAN *Mekong Basin Development Cooperation*.

7.1. Kawasan Pertumbuhan ASEAN Bagian Timur: Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Filipina (BIMP-EAGA)

Ide pembentukan Wilayah Pertumbuhan ASEAN Timur (BIMP-EAGA) pertama kali disampaikan oleh Presiden Filipina, Fidel Ramos pada bulan Oktober 1992 untuk menghubungkan daerah Filipina Selatan dengan Wilayah Timur Indonesia dan Wilayah Timur Malaysia. Ide tersebut kemudian disampaikan kepada PM Malaysia Mahathir Muhamad dan Presiden Soeharto. Kerjasama BIMP-EAGA secara resmi dibentuk melalui penandatanganan *Agreed Minutes* pada pertemuan tingkat menteri di Davao City, Filipina, 26 Maret 1994. BIMP EAGA tersebut diikuti oleh empat negara di kawasan timur ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Indonesia (Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara), Malaysia (Sabah, Serawak, dan Labuan), dan Filipina (Mindanao dan Palawan).

Kerjasama BIMP-EAGA dibentuk untuk menarik minat para investor lokal dan asing untuk melakukan investasi dan meningkatkan perdagangan di kawasan timur ASEAN. Tujuan pembentukan BIMP-EAGA adalah mengembangkan kerjasama sub-regional antara negara-negara anggota dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sub-kawasan tersebut. Sektor kerjasama yang diprioritaskan adalah transportasi udara dan laut, perikanan, pariwisata, energi, kehutanan, pengembangan sumber daya manusia dan mobilitas tenaga kerja. Untuk melibatkan pihak swasta secara aktif telah dibentuk forum khusus *East ASEAN Business Council* (EABC) di Davao City 15-19 Nopember 1994.

Pembagian area kerja BIMP-EAGA digolongkan dalam beberapa *cluster*, yaitu: *cluster* bidang transportasi dan pembangunan infrastruktur yang membawahi *air linkages*, *sea linkages*, telekomunikasi dan konstruksi dengan Brunei Darussalam sebagai koordinator; *Cluster* bidang sumber daya alam yang terdiri atas *agro-industry*, perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup serta energi, dengan Indonesia sebagai koordinator; *cluster* pariwisata, dengan Malaysia sebagai

koordinator; dan *cluster* UKM dan finansial dengan Filipina sebagai koordinator.

Pertemuan *BIMP-EAGA Summit* ke-3 di Cebu pada tanggal 12 Januari 2007 menghasilkan sebuah *Joint Statement for 3rd BIMP-EAGA Summit* yang intinya antara lain menyepakati BIMP-EAGA *Roadmap to Development* yang meliputi percepatan penerapan *flagship projects*, pembuatan *database* perdagangan, investasi & pariwisata. Hal tersebut akan selaras dengan inisiatif AEC dan bertujuan untuk memajukan proses integrasi ASEAN; menyepakati peningkatan keterlibatan pihak swasta untuk berpartisipasi pada BIMP-EAGA *Business Council*; menggerakkan sektor UKM bekerjasama dengan ADB serta meningkatkan peran pemuda dalam kerjasama sosial budaya, riset, olahraga, dan pendidikan.

7.2. Segitiga Pertumbuhan: Indonesia, Malaysia dan Thailand (IMT-GT)

Pembentukan Segitiga Pertumbuhan (*Growth Triangle*) IMT-GT dimulai dengan pertemuan bilateral tingkat menteri dan pejabat tinggi di Pulau Langkawi, Malaysia, 20 Juli 1993. Kerjasama segi tiga pertumbuhan tersebut melibatkan tiga provinsi Indonesia yakni Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat; empat negara bagian Malaysia yaitu Perak, Penang, Kedah, Perlis dan empat belas provinsi Thailand Selatan.

Kerjasama pertumbuhan tersebut diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperlancar arus perdagangan, investasi, pariwisata, dan jasa, serta membuka peluang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal. Secara struktural mekanisme kerjasama IMT-GT terbagi atas dua tingkatan, yaitu Sidang Pejabat Tinggi (*Senior Officials Meeting-SOM*) dan *Business Council Meeting* (BCM). SOM terdiri dari pejabat-pejabat tinggi pemerintah dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian dan beberapa anggota teras BCM. Sedangkan BCM terdiri dari pengusaha-pengusaha yang terlibat dalam kegiatan IMT-GT. SOM melakukan

pertemuan setahun sekali dengan didahului pertemuan BCM. Hasil pertemuan BCM kemudian diajukan ke SOM.

Pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu telah diadakan pula KTT ke-2 IMT-GT yang menyepakati sebuah *Joint Statement of the 2nd IMT-GT Summit* yang intinya antara lain penetapan IMT-GT *Roadmap for Development 2007-2011* dan penetapan empat IMT-GT *Economic Corridors (extended)* Songkhla-Penang-Medan, *Straits of Malacca*, Banda Aceh-Palembang, Dumai-Melaka); mendorong penguatan peran Swasta dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kerjasama IMT-GT; dukungan penguatan institusional IMT-GT; dan dukungan peran ADB dalam IMT-GT.

8. Kerjasama Pembangunan ASEAN

Upaya peningkatan kerjasama ASEAN di bidang pembangunan mulai dirintis sejak tahun 1996 melalui Pertemuan Pejabat Senior Badan-Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ASEAN (*Senior Officials Meeting on Development Planning* (SOM-DP)). Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menjalin kerjasama antar badan-badan perencanaan pembangunan di negara-negara anggota ASEAN agar lebih mensinergikan kebijakan dan program pembangunan dari masing-masing negara ASEAN dengan rencana pembangunan regional yang tertuang dalam *Vision 2020*.

Sidang ke-4 SOM-DP di Bali tanggal 14-15 Juli 2005 antara lain bertujuan untuk membangun jejaring dan kerjasama di antara badan-badan perencanaan pembangunan negara-negara anggota ASEAN. Jejaring dan kerjasama ASEAN tersebut diharapkan dapat mensinergikan kebijakan pembangunan nasional masing-masing negara dengan rencana pembangunan dan integrasi kawasan sebagaimana tertuang dalam ASEAN *Vision 2020*, *Bali Concord II*, dan *Vientiane Action Programme* (VAP). Salah satu keputusan Sidang SOM DP ke-4 adalah SOM-DP akan diselenggarakan secara regular (1 tahun sekali) guna memfasilitasi integrasi perencanaan pembangunan ASEAN, seperti VAP, ke dalam kegiatan pembangunan nasional serta untuk membahas isu-isu pembangunan lainnya.

D. KERJASAMA TERKAIT DENGAN PILAR KOMUNITAS SOSIAL BUDAYA ASEAN

Pelaksanaan kerjasama fungsional ASEAN dalam upaya mencapai Komunitas Sosial Budaya ASEAN disesuaikan dengan VAP 2004-2010. Pelaksanaan dan pemantauan implementasi Rencana Aksi Komunitas Sosial Budaya ASEAN dilakukan oleh badan-badan ASEAN terkait serta dicerminkan dalam laporan Sekretaris Jenderal ASEAN kepada KTT ASEAN.

Kerjasama sosial budaya mencakup bidang-bidang kebudayaan, penerangan, pendidikan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, penanganan bencana alam, kesehatan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, kepemudaan, penanggulangan narkoba, peningkatan administrasi dan kepegawaian publik, serta Yayasan ASEAN.

1. Kerjasama Kebudayaan, Penerangan, dan Pendidikan

1.1. Kerjasama Bidang Kebudayaan dan Penerangan

Kerjasama ASEAN di bidang kebudayaan dan penerangan/informasi berada di bawah mekanisme:

a. Committee on Culture and Information (COCI)

COCI terbentuk pada tahun 1978 dan bertujuan untuk mempromosikan kerjasama yang efektif di bidang kebudayaan dan informasi, meningkatkan saling pengertian (*mutual understanding*) dan solidaritas diantara masyarakat ASEAN. COCI bersidang sekali dalam setahun dan memiliki dua *Sub-Committee* yaitu *Sub-Committee on Culture* (SCC) dan *Sub-Committee on Information* (SCI) yang masing-masing bersidang dua kali dalam setahun. Pertemuan dalam kerangka COCI membahas proposal proyek kerjasama dan evaluasi pelaksanaan proyek kerjasama. Pertemuan ke-41 COCI dilaksanakan di Vientiane, Laos pada Juni 2006.

b. ASEAN Ministers Responsible for Information (AMRI)

AMRI merupakan pertemuan setingkat menteri yang bertugas membahas masalah kebijakan di tingkat regional dan melakukan evaluasi umum terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Sidang-sidang setingkat menteri tersebut diadakan setiap dua tahun dan didahului oleh sidang setingkat pejabat tinggi (SOM).

Pertemuan AMRI ke-9 di Jakarta, Mei 2007 bertema “*Staying Connected to Advance A Sharing and Caring Community in ASEAN through Media*” menegaskan peran penting informasi dan media dalam mendukung upaya integrasi ASEAN dan mencapai tujuan ASEAN sebagaimana terkandung dalam VAP. Kerjasama informasi ini dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran dan saling pengertian antara masyarakat di negara-negara ASEAN di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, kebudayaan, dan sejarah. Pertemuan juga membahas perluasan kerjasama ASEAN di bidang penerangan di masa depan dengan melibatkan negara-negara “*Plus Three*” (China, Republik Korea dan Jepang).

Dalam kaitan perluasan kerjasama penerangan ASEAN tersebut, pada tanggal 16-19 Mei 2006 di Yogyakarta telah diadakan pula *Workshop on Enhancing ASEAN-China Cooperation through Information and Media*. Lokakarya tersebut berhasil menyepakati *ASEAN-China Work Plan to Enhance ASEAN-China Cooperation through Information and Media 2006-2010*. Wilayah kerjasama dan isu-isu yang mengemuka dalam lokakarya tersebut juga diolah menjadi masukan bagi Nota Kesepahaman Kerjasama Informasi dan Media antara ASEAN dan Cina, yang saat ini sedang dibahas.

ASEAN Tagline

Pada Pertemuan Menteri-menteri Penerangan ASEAN ke-8 di Kamboja, para Menteri sepakat untuk memilih “*Ten Nations One Community*” sebagai slogan ASEAN yang dipakai dalam berbagai terbitan dan kegiatan promosi ASEAN.

Sementara itu, dalam rangka 40 tahun ASEAN, selama tahun 2007 slogan yang dipakai adalah “*One ASEAN at the Heart of Dynamic Asia*”.

c. ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts (AMCA)

Pertemuan AMCA dilaksanakan setiap dua tahun. Pada Pertemuan AMCA pertama di Kuala Lumpur, Malaysia, 13-14 Oktober 2003 telah ditetapkan wilayah prioritas kerjasama, antara lain pengembangan sumber daya manusia di bidang kebudayaan dan pengembangan UKM yang bergerak di bidang budaya dan seni. Selanjutnya pada Pertemuan ke-2 AMCA di Bangkok, tahun 2005, dibahas tindak lanjut hasil Pertemuan AMCA pertama. Pada kesempatan tersebut telah diadakan pertemuan dengan China, Jepang dan Korea Selatan dalam kerangka Sidang AMCA+3.

Proyek-proyek kerjasama dan kegiatan di bidang kebudayaan dan penerangan didanai dari ASEAN *Cultural Fund* (ACF) yang dibentuk sejak tahun 1978. Jepang merupakan negara Mitra Wicara pertama yang memberikan kontribusi kepada ACF sebesar ¥5 milyar yang menjadi dana abadi ACF. ACF bersifat *endowment fund*, yang berarti hanya bunga pengelolaan dana tersebut yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan COCI. Penggunaan dana ACF dimonitor oleh *advisory committee* yang beranggotakan pejabat-pejabat dari negara-negara anggota ASEAN. ACF juga menerima sumbangan dari negara-negara anggota ASEAN, negara-negara Mitra Wicara lainnya dan organisasi internasional.

Sesuai dengan amanat Rencana Aksi Sosial Budaya VAP, kerjasama kebudayaan dan penerangan ASEAN diarahkan pada program "*Promoting an ASEAN Identity*". Program dimaksud meliputi langkah-langkah promosi kesadaran ASEAN dan identitas regional ASEAN; pelestarian dan promosi warisan budaya ASEAN; pemeliharaan dialog bagi terciptanya suatu pengertian yang lebih mendalam akan peradaban, kebudayaan, dan agama-agama di ASEAN; serta promosi peran ASEAN dalam komunitas internasional.

Berbagai kegiatan di bidang kebudayaan antara lain: *workshop* dan simposium di bidang seni dan budaya; ASEAN *Culture Week*; ASEAN *Youth Camp*; ASEAN *Quiz*; serta pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Sedangkan kegiatan di bidang informasi dilakukan antara lain melalui pertukaran berita di antara negara-negara ASEAN yang ditayangkan pada televisi nasional di masing-masing negara ASEAN (ASEAN TV News) dan penyiaran berita dan informasi mengenai ASEAN melalui radio-radio nasional (ASEAN in Action).

ASEAN juga melakukan kerjasama di bidang kebudayaan dan penerangan yang erat dengan negara-negara Mitra Wicara. Kerjasama dengan Korea Selatan di bawah *Future Oriented Cooperation Projects* (FOCP) meliputi pertukaran kunjungan antar seniman, insan media, pemuda dan pejabat pemerintah ASEAN dan Republik Korea yang secara teratur dilakukan setiap tahunnya. Kerjasama dengan India meliputi pertukaran kunjungan antar jurnalis ASEAN dan India. Selain itu juga telah ditandatangani *Memorandum of Understanding* (MOU) on ASEAN-China *Cultural Cooperation* yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ASEAN dan China di bidang kebudayaan.

1.2. Kerjasama Bidang Pendidikan

Kerjasama bidang pendidikan di wilayah Asia Tenggara berawal pada saat pembentukan *South East Asian Ministers of Education Organization* (SEAMEO) tanggal 30 Nopember 1965.

Sedangkan kerjasama pendidikan ASEAN, dilakukan oleh ASEAN *Sub-Committee on Education* (ASCOE), sebelumnya bernama ASEAN *Committee on Social Development* (COSD). Pada Sidang ke-9 ASCOE di Vientiane, Laos, tanggal 26 – 27 September 2001, disepakati mengubah ASCOE menjadi ASEAN *Committee on Education* (mempergunakan akronim yang sama ASCOE). Sejak Sidang ASCOE bulan Agustus 2004 di Kuala Lumpur-Malaysia, fokus pengembangan pendidikan ASEAN adalah peningkatan kesadaran tentang ASEAN di kalangan para pelajar sekolah menengah di negara-negara ASEAN.

Pada pertemuan Menteri-menteri Pendidikan ASEAN di Bangkok tahun 2005, Thailand mengusulkan untuk mengadakan pertemuan ASEAN *Ministers of Education* (ASED) secara *back-to-back* dengan pertemuan *South East Asian Ministers of Education Organization* (SEAMEO). Pertemuan pertama ASED di Singapura pada bulan Maret 2006 menyepakati 5 (lima) strategi dasar dalam upaya mewujudkan Komunitas ASEAN melalui kerjasama pendidikan. Tujuan akhir dari kegiatan-kegiatan strategis tersebut antara lain untuk meningkatkan kesadaran (*promoting awareness*) dan saling pengertian (*understanding*) melalui pertukaran mahasiswa dan peningkatan kapasitas (*capacity building*) tenaga pengajar.

Pada pertemuan Pejabat Tinggi Pendidikan ASEAN (SOM-ED) tanggal 24 Nopember 2006 di Bangkok, pertemuan sepakat agar Sekretariat ASEAN, Sekretariat SEAMEO dan Sekretariat AUN bekerjasama untuk mengembangkan jejaring regional (*regional framework*) guna mendukung ASEAN *Community Building*, melalui pertukaran pelajar/mahasiswa dan akademisi, serta kerjasama penelitian antara peneliti dengan akademisi. Jejaring regional (*regional framework*) dimaksud akan difokuskan pada kegiatan-kegiatan untuk memajukan ASEAN *awareness* di sekolah-sekolah, termasuk mempromosikan ASEAN *Studies* di sekolah-sekolah dasar dan menengah.

Pada pertemuan ASEAN *Education Ministers Meeting* (ASED) kedua di Bali tanggal 16 Maret 2007 telah dibahas antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Menghidupkan kembali ASEAN *Student Exchange Programme* pada tahun 2008 dan seterusnya sampai 2013;
- b. Menegaskan pentingnya peran dunia pendidikan di ASEAN, membangun identitas ASEAN dan lingkungan yang multi-kultural; dan
- c. Mengupayakan substansi pendidikan terefleksi dalam ASEAN *Charter*, yang tidak hanya berada pada pilar sosial budaya melainkan mencakup ketiga pilar Komunitas ASEAN, yang dapat meningkatkan *competitiveness* masing-masing negara anggota maupun ASEAN sebagai organisasi regional.

ASEAN University Network (AUN)

Ide untuk membentuk sebuah jaringan antar universitas terkemuka di ASEAN muncul pada KTT ke-4 ASEAN di Singapura, bulan Januari 1992. Untuk mewujudkan hal ini, Sekretariat ASEAN dan ASCOE merancang *draft Charter AUN* dan Perjanjian Pendirian AUN. Sidang ASCOE ke-3 di Manila, Filipina, 20-22 Juni 1995 menyepakati *Charter AUN*. Sementara itu, Perjanjian Pendirian AUN ditandatangani pada bulan Nopember 1995.

Struktur AUN terdiri dari *Board of Trustees (BOT)*, *participating universities*, dan sebuah Sekretariat yang berpusat di Bangkok, Thailand. BOT terdiri dari wakil masing-masing negara anggota ASEAN yang ditunjuk oleh pemerintah masing-masing, Sekjen ASEAN, Ketua ASCOE, dan Direktur Eksekutif AUN.

Universitas-universitas yang tergabung dalam ASEAN *University Network* adalah University Brunei Darussalam (Brunei Darussalam), Royal University of Phnom Penh (Kamboja), Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada (Indonesia), National University of Lao (Laos), Universiti Sains Malaya, Universiti Malaya (Malaysia), Institute of Economics, University of Yangon (Myanmar), University of the Philippines, De La Salle University (Filipina), National University of Singapore, Nanyang Technological University (Singapura), Chulalongkorn University, Burapha University (Thailand), Vietnam National University-Ha Noi dan Vietnam National

University-Ho Chi Minh City (Vietnam).

AUN juga memiliki kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan di luar ASEAN, yaitu China, Uni Eropa, India, dan Republik Korea. Pertukaran mahasiswa dan staf akademis dilaksanakan melalui dua program, yaitu *AUN Educational Forum* dan *AUN Distinguished Scholars Programme*, dengan pembiayaan bersama (*cost-sharing*) diantara negara-negara anggota AUN. Universitas-universitas yang tergabung dalam AUN juga secara berkesinambungan menawarkan beasiswa untuk para mahasiswa ASEAN. Selain itu, AUN juga menyelenggarakan beberapa forum, seperti *ASEAN Youth Cultural Forum* dan *ASEAN Young Speakers Forum*.

2. Kerjasama Bidang Pembangunan Pedesaan dan Pengentasan Kemiskinan

Kerjasama ASEAN di bidang pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan didasari oleh Dokumen *Ministerial Understanding on Rural Development and Poverty Eradication (RDPE)*. Kerjasama ini menekankan penanggulangan masalah kemiskinan, kelaparan, penyakit dan buta huruf, serta meningkatkan kerjasama di bidang pembangunan sosial dan ekonomi.

Kerjasama RDPE makin dirasakan penting sejak terjadi krisis ekonomi di Asia Tenggara. Dalam pembahasan mengenai dampak sosial dari krisis ekonomi, para Menteri telah memberikan perhatian khusus pada ASEAN *Action Plan on Social Safety Nets* dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka ASEAN *Plan of Action on Rural Development and Poverty Eradication*.

Pada Sidang ke-5 ASEAN *Senior Officials Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (AMRDPE)* di Yangon, Myanmar, 29-31 Januari 2007, telah disahkan *Term of Reference (TOR) The ASEAN Plus Three Senior Officials Meeting On Rural Development and Poverty Eradication (SOMRDPE+3)* sebagai pedoman kerjasama yang akan meliputi sejumlah prioritas yang mencakup:

- a. Pembentukan *People's Forum*;

- b. *People's Exchange* termasuk *leadership development* para pemangku kepentingan baik dari kalangan pemerintah maupun LSM serta tokoh masyarakat dan para relawan;
- c. SME's dan *social enterprises development*;
- d. Program-program untuk mengatasi perdagangan bebas; dan
- e. *Micro financing*.

3. Kerjasama Bidang Kesehatan

Kerjasama yang paling menonjol di bidang kesehatan adalah penanggulangan masalah penyakit menular. Terkait dengan hal ini, ASEAN telah memiliki *ASEAN Work Programme on HIV dan AIDS III 2006-2010 (AWP III)* dan *Operational Work Plan of the Third ASEAN Work Programme on HIV and AIDS (AWP III)*.

Kerjasama penanganan HIV dan AIDS dipertegas kembali dalam KTT ke-12 ASEAN di Cebu melalui *ASEAN Commitments on HIV and AIDS*. Inti dari komitmen bersama itu antara lain kesepahaman untuk memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan, menghilangkan stigma dan diskriminasi serta meningkatkan kerjasama pemerintah dengan *civil society* dan swasta.

Dalam penanganan flu burung, ASEAN telah mencapai suatu kemajuan dengan adanya bantuan *stockpile tamiflu* dan *Personel Protective Equipment (PPE)* yang berlokasi di Singapura. *Stockpile* tersebut merupakan bentuk tindakan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya pandemi flu burung dalam kawasan. Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari KTT ke-9 ASEAN-Jepang pada Desember 2005.

4. Kerjasama Bidang Ketenagakerjaan

Kerjasama ASEAN di bidang ketenagakerjaan dilakukan melalui pembentukan pusat pelatihan dan informasi mengenai perbaikan lingkungan kerja, yang dikenal dengan *ASEAN Occupational Safety and Health Network (ASEAN-OSHNET)* pada bulan Agustus 2000.

ASEAN-OSHNET bertujuan meningkatkan daya saing dan kompetensi tenaga kerja ASEAN, serta menciptakan jaringan kelembagaan yang kuat. Sekretariat ASEAN-OSHNET yang pertama kali bertempat di Indonesia untuk tahun 2000-2004. Selanjutnya Sekretariat ASEAN-OSHNET digilir setiap 3 tahun sekali untuk masing-masing negara anggota ASEAN.

Pada ASEAN *Labor Ministerial Meeting (ALMM)* ke-19 Mei 2006 di Singapura disepakati antara lain peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja (*occupational safety and health*) dengan memasukkannya sebagai area prioritas pada *ALMM Work Programme*. ALMM juga menegaskan dukungan pada penguatan ASEAN-OSHNET, arah pengembangan ketenagakerjaan ASEAN, dan peningkatan kerjasama dengan *International Labour Organisation (ILO)*.

KTT ke-12 di Cebu menghasilkan ASEAN *Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*. Deklarasi memuat kewajiban bagi negara pengirim, negara penerima maupun ASEAN untuk memberikan perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran. Deklarasi mewajibkan dibentuknya instrumen hukum yang lebih mengikat negara-negara ASEAN guna memberikan jaminan dan perlindungan hak-hak pekerja migran. Deklarasi ini merupakan komitmen ASEAN menuju terwujudnya *a caring and sharing community*.

5. Kerjasama Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial

Kerjasama di bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial dilakukan melalui ASEAN *Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development (SOMSWD)*. SOMSWD memfokuskan pada program-program kesejahteraan sosial yang meliputi antara lain kependudukan, anak-anak, penyandang cacat, lansia dan keluarga.

Pada pertemuan ke-4 SOMSWD di Mandalay, Myanmar, tanggal 12-15 Desember 2006, telah disepakati ASEAN *Strategic Framework and Plan of Action for Social Welfare, Family and Children 2007-2010*. *Framework* ini antara lain mencakup kerjasama mengenai pemajuan dan perlindungan anak, yang menjadi komitmen ASEAN dalam mendorong *right-base approach* dalam pelaksanaan kerjasama

regional. Selain itu, *Framework* juga memberi perhatian pada program-program bagi para penyandang cacat.

6. Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Lingkungan Hidup dan Bencana Alam

6.1. Kerjasama Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kerjasama ilmu pengetahuan, riset dan teknologi dalam kerangka ASEAN telah terbentuk sejak tahun 1967 sebagai bagian dari program ASEAN-*help*-ASEAN Initiative.

Kerjasama Iptek ASEAN ditangani oleh ASEAN Committee on Science and Technology (COST). COST memiliki sembilan Sub-Komite sektoral yaitu:

- a. Sub-Committee on Meteorology & Geophysics (SCMG);
- b. Sub-Committee on Microelectronic and Information Technology (SCMIT);
- c. Sub-Committee on Non Conventional Energy Research (SCNCER);
- d. Sub-Committee on Materials Science & Technology (SCMST);
- e. Sub-Committee on Food, Science & Technology (SCFST);
- f. Sub-Committee on Biotechnology (SCB);
- g. Sub-Committee on S&T Infrastructure and Resources Development (SCIRD);
- h. Sub-Committee on Marine Sciences and Technology (SCMSAT); dan
- i. Sub-Committee on Space Technology and Application (SCOSA).

Kerjasama Iptek untuk saat ini diarahkan terutama pada upaya memasyarakatkan Iptek dengan mendorong partisipasi sektor swasta dan *civil society*. Selain itu, kerjasama juga diarahkan pada upaya peningkatan pemanfaatan Iptek terapan terutama pada sektor-sektor relevan yang diharapkan dapat membawa manfaat bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Untuk itu, dibentuk *Advisory Body on the ASEAN Plan of Action on Science and Technology* (ABAPAST) dan disusun Rencana Aksi Iptek ASEAN periode 2007-2011 yang terintegrasi dengan VAP 2004-2010.

Beberapa bentuk kerjasama yang saat ini sedang dikembangkan ASEAN antara lain:

- a. Rencana pendirian ASEAN Centre for Infectious Disease,
- b. Pengembangan jaringan pusat penelitian untuk penanganan penyakit menular, lingkungan hidup, bencana, SDM, *biofuel*, pengembangan energi terbarukan dan alternatif; serta
- c. Pengembangan teknologi dan keamanan pangan.

6.2 Kerjasama Lingkungan Hidup

Secara formal kerjasama ASEAN di bidang lingkungan hidup dimulai sejak tahun 1978, ditandai dengan dibentuknya ASEAN Experts Group on the Environment (AEGE) di bawah Committee on Science and Technology (COST). Pembentukan wadah tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kerjasama yang sudah dirintis sejak tahun 1971 melalui *Permanent Committee on Science and Technology*. Ketika itu, AEGE diberi mandat untuk mempersiapkan ASEAN Environmental Programme (ASEP) yaitu program kegiatan ASEAN di bidang lingkungan hidup.

Seiring dengan makin meluasnya lingkup kerjasama lingkungan hidup di kawasan ASEAN, pada tahun 1990 dibentuk ASEAN Senior Officials on the Environment (ASOEN), mencakup 6 Kelompok Kerja:

- a. Penanganan Polusi Lintas-Batas;
- b. Konservasi Alam;
- c. Lingkungan Hidup Kelautan;
- d. Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. Ekonomi Lingkungan; dan
- f. Informasi Lingkungan, Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Publik.

Mekanisme konsultasi formal yang dipergunakan negara-negara ASEAN untuk membahas masalah-masalah lingkungan tidak hanya terbatas pada ASOEN saja tapi juga Pertemuan Tingkat Menteri Lingkungan (*ASEAN Ministerial Meeting on Environment/AMME*).

Misi utama yang ingin dicapai ASEAN di bidang lingkungan dalam rangka pembentukan Komunitas ASEAN tahun 2015 adalah menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang bersih dan hijau, dengan mengacu pada prinsip-prinsip mekanisme pembangunan yang berkelanjutan, ramah lingkungan serta melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lestari.

ASEAN telah mengidentifikasi 12 bidang kerjasama yang akan menjadi prioritas dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di kawasan, yaitu:

- a. Memperkuat kapasitas nasional dan kerjasama regional dalam menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan di bidang lingkungan, yang dicapai pada tingkat global seperti isu perubahan iklim (*climate change*) serta penanganan produk kimia dan limbah kimia;
- b. Memperkuat kerjasama dalam penanganan polusi asap lintas batas;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya lingkungan;
- d. Mempromosikan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan;
- e. Memperbaiki pengelolaan lingkungan perkotaan sekaligus memperkuat *good governance* di kawasan perkotaan;

- f. Memperkuat upaya pengawasan, pelaporan serta harmonisasi kegiatan antar sektor sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- g. Meningkatkan pengelolaan kawasan pantai yang ramah lingkungan (*coastal and marine environment*);
- h. Memperkuat konservasi alam dan keanekaragaman hayati;
- i. Mempromosikan tersedianya sumber air bersih bagi semua penduduk;
- j. Memperkuat kegiatan pertanian dan pemanfaatan lahan secara ramah lingkungan;
- k. Mempromosikan pengelolaan hutan secara lestari dan melakukan harmonisasi antara kebijakan ekonomi, sosial dan lingkungan; dan
- l. Memperkuat kerjasama dalam pemanfaatan sumber daya mineral secara lestari.

Salah satu kerjasama bidang lingkungan yang menjadi prioritas ASEAN untuk saat ini adalah memaksimalkan upaya bersama dalam penanganan polusi kabut asap (*haze*) lintas batas yang ditimbulkan oleh terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dalam kaitan ini, ASEAN telah menyepakati *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) yang telah ditandatangani di Kuala Lumpur, Juni 2002, dan mulai diberlakukan terhitung sejak bulan Nopember 2003. Dengan telah ditandatanganinya AATHP, sesuai mandat AATHP, akan dibentuk *ASEAN Coordinating Center for Transboundary Haze Pollution Control* (ACC), yang berfungsi mengkoordinasikan kerjasama penanggulangan polusi asap lintas batas. Negara-negara anggota ASEAN menyambut baik keinginan Indonesia untuk menjadi tuan rumah lokasi ACC.

Pada bulan Oktober 2006, atas inisiatif Pemerintah Indonesia, di Riau telah diselenggarakan pertemuan khusus negara anggota ASEAN untuk menuntaskan permasalahan polusi asap lintas batas yang selama ini membawa dampak sosial dan ekonomi cukup besar bagi masyarakat. Pertemuan Riau antara lain telah

menggulirkan pembentukan the ASEAN *Sub-Regional Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution* (MSC) yang beranggotakan 5 negara sub-regional ASEAN yang selain ini terkena dampak dari polusi asap lintas batas yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand.

Pertemuan Riau juga menghasilkan dokumen Rencana Aksi untuk mengatasi masalah kabut asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara yang meliputi aspek-aspek:

- a. Pencegahan, pemantauan dan penegakan hukum;
- b. Pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan (*peatland management*);
- c. Pemadaman dan tanggap darurat;
- d. *Early warning* dan pemantauan; serta
- e. Kerjasama dan bantuan regional dan internasional.

Rencana Aksi tersebut secara sinergi melibatkan tiga unsur yang berperan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yaitu Pemerintah, petani/peladang, masyarakat, serta pelaku bisnis (perkebunan, HTI/HPH).

Rencana aksi Indonesia untuk penanganan polusi asap lintas batas saat ini sudah memasuki tahap implementasi. Beberapa negara sahabat juga telah mengindikasikan keinginannya untuk mendukung suksesnya pelaksanaan dari Rancangan Aksi Komprehensif Indonesia tersebut.

6.3. Kerjasama Penanggulangan Bencana Alam

Kerjasama penanganan bencana alam dalam kerangka ASEAN sebenarnya sudah terbangun lebih dari tigapuluh tahun lamanya. Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang menandai berdirinya ASEAN merupakan landasan bagi negara anggotanya untuk saling memperkuat kerjasama regional guna meningkatkan kedamaian, stabilitas, kemajuan regional serta untuk saling memupuk persaudaraan dan solidaritas terutama di saat salah satu anggotanya tertimpa bencana.

Komitmen negara-negara anggota ASEAN untuk saling membantu pada saat terjadi bencana antara lain dimuat dalam *Declaration of ASEAN Concord* yang ditandatangani pada tanggal 24 Februari 1976. Deklarasi tersebut menyebutkan bahwa *natural disasters and other major calamities can retard the pace of development of member states, therefore they shall extend, within their capabilities, assistance for relief of member states in distress*. Para Pemimpin ASEAN ketika itu sepakat untuk menjadikan isu penanganan bencana sebagai salah satu bagian penting dari tujuan kerjasama ASEAN.

Babak baru dalam kerjasama ASEAN di bidang penanganan bencana dimulai ketika mekanisme pengelolaan kerjasamanya ditingkatkan dari tingkat kelompok ahli menjadi komite penuh ASEAN pada tingkat pejabat senior. Tahun 2003, Komite ASEAN untuk Penanganan Bencana (*ASEAN Committee on Disaster Management/ACDM*) secara resmi dibentuk dengan mandat mempersiapkan program kerja beserta prioritas kegiatan yang kemudian dikenal sebagai Program Regional ASEAN untuk Penanganan Bencana (*ASEAN Regional Programme on Disaster Management/ARPDM*).

ARPDM memuat kerangka kerjasama antar negara ASEAN dan juga dengan Mitra Wicara dan organisasi internasional untuk periode 2004 – 2011. Rangkaian program terpadu ARPDM, mencakup lima komponen inti dan mencakup lebih dari 29 kelompok kegiatan. Kelima komponen inti dimaksud adalah:

- a. Pembentukan Kerangka Penanganan Bencana Regional ASEAN;
- b. Peningkatan Kapasitas;
- c. Pertukaran Informasi dan Sumber Daya;
- d. Peningkatan Kolaborasi dan Penguatan Kemitraan; serta
- e. Peningkatan Pengetahuan, Kesadaran dan Advokasi Publik.

Tragedi tsunami tahun 2004 memberikan catatan bahwa ASEAN sebagai salah satu komunitas regional ternyata belum

sepenuhnya siap dalam menangani bencana alam dalam skala besar secara bersama-sama. Pada saat yang sama, bencana tsunami juga menyadarkan kita bahwa negara-negara anggota ASEAN ternyata memiliki ikatan persaudaraan yang kuat, memiliki kapasitas SDM serta aset yang sangat memadai untuk membantu negara tetangganya yang tertimpa musibah. Pada saat terjadi tsunami, tim SAR dan organisasi bantuan darurat dari negara-negara ASEAN merupakan salah satu yang pertama tiba di lapangan dan menyalurkan bantuan darurat kepada para korban bencana. Bahkan negara anggota ASEAN yang terkena musibah juga menyalurkan bantuan kepada negara anggota ASEAN lainnya yang tertimpa bencana.

Kejadian tsunami telah mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk menata kembali dan memperkuat kerjasamanya di bidang penanganan bencana. Masalah penanganan bencana, tidak dapat lagi hanya dilakukan di tingkat sektoral tetapi harus melibatkan seluruh sektor terkait, tidak hanya di tingkat nasional tapi juga regional, bahkan melalui kerjasama internasional, bila memang diperlukan.

Dalam kaitan ini, Pemerintah Indonesia telah mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan Pertemuan Khusus Para Pemimpin ASEAN Paska Gempa Bumi dan Tsunami (KTT Tsunami) di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2005. KTT Tsunami antara lain telah menghasilkan pernyataan bersama yang dikenal dengan nama Deklarasi Jakarta, yaitu "Deklarasi tentang Aksi untuk Memperkuat Bantuan Darurat, Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Pencegahan atas Dampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami" (Deklarasi Jakarta).

Adapun beberapa butir penting lain yang dicakup dalam Deklarasi Jakarta yang terkait dengan program ASEAN adalah:

- a. Pemanfaatan aset sipil dan militer dalam operasi bantuan bencana;
- b. Pembentukan Pusat Bantuan Kemanusiaan ASEAN (ASEAN Humanitarian Assistance Centre/AHA Centre); dan

- c. Pembentukan Jaringan Pemakaian Bersama Informasi dan Komunikasi ASEAN untuk Bencana.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan yang dicapai dalam KTT Tsunami di Jakarta, pada bulan Juni 2005, ASEAN berhasil menyelesaikan Persetujuan Penanganan Bencana dan Tanggap Darurat (ASEAN *Agreement on Disaster Management and Emergency Response/AADMER*). Persetujuan dimaksud kemudian ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN pada kesempatan Pertemuan ke-38 Para Menteri Luar Negeri ASEAN di Vientiane, Laos, tanggal 26 Juli 2005.

AADMER bersifat terpadu, komprehensif dan menyeluruh karena mencakup semua aspek dan siklus penanganan bencana sebagai berikut:

- a. Identifikasi resiko bencana, penilaian dan pemantauan (*disaster risk identification, assessment and monitoring*);
- b. Pencegahan dan mitigasi (*prevention and mitigation*);
- c. Peringatan dini (*early warning*);
- d. Kesiap-siagaan (*preparedness*);
- e. Tanggap darurat (*emergency response*); dan
- f. Rehabilitasi (*rehabilitation*).

7. Kerjasama Bidang Sumber Daya Manusia dan Yayasan ASEAN

7.1. Kerjasama Pemajuan Wanita

Isu mengenai wanita mulai diangkat pada ASEAN *Women Leaders Conference* di Jakarta pada bulan Desember 1975. Pertemuan pertama ASEAN *Standing Committee* di Manila tahun 1975 membentuk ASEAN *Sub-Committee on Women* (ASW). Selanjutnya pada Pertemuan ke-20 ASW tahun 2001, ASW ditingkatkan statusnya menjadi ASEAN *Committee on Women* (ACW).

Dari sisi perkembangan *regional policy framework*, terdapat tiga deklarasi penting ASEAN yang terkait dengan isu wanita dan telah disahkan, yakni:

- a. *Declaration on the Advancement of Women in ASEAN*, tahun 1988;
- b. *The Declaration on HIV and AIDS*, tahun 2001;
- c. *The Declaration against Trafficking in Persons Particularly Women and Children*, tahun 2004; dan
- d. *The Declaration on the Elimination of Violence against Women* (DEVAW), tahun 2004.

Sejauh ini, terdapat dua *Work Plan* yang telah disusun dan disahkan sebagai tindak lanjut dari deklarasi-deklarasi yang dihasilkan, antara lain:

- a. *Work Plan on Women's Advancement and Gender Equality (2005-2010)* sebagai tindak lanjut dari *1988 Declaration on the Advancement of Women in the ASEAN Region*; dan
- b. *Work Plan to Operationalize the Declaration on the Elimination of Violence against Women in ASEAN* sebagai tindak lanjut dari *Declaration on the Elimination of Violence against Women* (DEVAW) 2004.

Kerjasama ASEAN dalam bidang wanita menunjukkan perkembangan yang berarti. Pertemuan ke-5 ACW tahun 2006 di Singapura mengangkat tema "Membangun Kemitraan melalui Pemberdayaan Ekonomi Wanita di ASEAN". Hal ini menjadi perhatian utama negara-negara ASEAN dalam meningkatkan upaya peranan wanita pada usaha kecil menengah (UKM). Beberapa hal pokok yang dibahas antara lain: *Third Regional Report on the Advancement of Women in ASEAN*; *Gender Dimension of Globalisation and Regional Integration*; serta Pelaksanaan Rencana Kerja *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* (DEVAW).

Indonesia berinisiatif untuk menyelenggarakan *ASEAN High Level Meeting on Gender Mainstreaming within the Context of CEDAW, BPFA and MDGs* pada tanggal 15-16 Nopember 2006 di Jakarta. Pertemuan ini menghasilkan *Joint Statement* dan komitmen negara-negara ASEAN untuk menguatkan kapasitas institusi dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai konsep dan penerapan pengarusutamaan *gender* serta meningkatkan kerjasama regional dalam pengawasan dan evaluasi efektifitas pengarusutamaan *gender* sebagai salah satu strategi pembangunan.

Dalam upaya itu, pada tanggal 3-4 April 2007 di Bangkok telah dilaksanakan *Regional Consultative on the Establishment of ASEAN Commission on the Protection of the Rights of Women and Children* yang bertujuan untuk menghimpun masukan dari unsur pemerintah dan non pemerintah. Pelaksana dari pertemuan tersebut adalah Universitas Mahidol, Thailand bekerjasama dengan ASEAN Working Group for Human Rights Mechanism dan Canadian International Development Agency (CIDA).

7.2. Kerjasama Bidang Pemuda

Kerjasama ASEAN di bidang kepemudaan dimulai sejak diselenggarakannya Konferensi Pemuda tanggal 15-17 September 1975 dan pembentukan *Committee for ASEAN Youth Cooperation* (CAYC). Dalam perkembangannya, dibentuk *Expert Group on Youth* dan disepakati *Declaration of Principles to strengthen ASEAN Collaboration on Youth* pada tahun 1983. Tahun 1998 *Expert Group on Youth* berubah nama menjadi *ASEAN Sub-Committee on Youth* (ASY). Selanjutnya pada tahun 2001, status ASY ditingkatkan menjadi *ASEAN Senior Officials Meeting on Youth* (SOMY).

Pelaksanaan program kerjasama pemuda ASEAN diselaraskan dengan *Work Programme on Preparing ASEAN Youth for Sustainable Employment and Other Challenges of Globalisation*, yang merupakan tindak lanjut dari *Yangoon 2000 Declaration on Preparing ASEAN Youth for the Challenges of Globalisation*.

Terdapat 4 bidang prioritas yang diidentifikasi dalam Program Kerja:

- a. *Policy Development*;
- b. *Promoting ASEAN Awareness and Civic Responsibility / Youth Leadership*;
- c. *Promoting Employability of Youth*; dan
- d. *Other Issues (Information Exchange, Promoting NGO Involvement and Other non project activities)*.

Beberapa program yang dilaksanakan antara lain dalam bentuk *ASEAN Youth Exchange Programme*, *ASEAN Youth Camp*, Program Kapal Pemuda ASEAN-Jepang, *ASEAN Youth Volunteer Programme*, dan lain-lain. Program Pemuda yang baru-baru ini selesai dilaksanakan adalah:

- a. *Regional Capacity Building Workshop to Promote Youth-Initiated (ICT) Enterprises*, 7-9 Maret 2007, di Yangon. Tujuan pelaksanaan workshop ini adalah untuk meningkatkan kapasitas para pejabat dibidang kepemudaan, tokoh pemuda tentang bagaimana pemuda menggagas peluang usaha di bidang ICT; dan
- b. *ASEAN Youth Leadership Development Programme (AYLDP)*, 25-30 Maret 2007, di Kuala Lumpur, membahas konsep dan modul kepemimpinan pemuda, formulasi kebijakan dan *volunteer* pemuda.

ASEAN juga membina kerjasama dengan Mitra Wicara dalam upaya pemajuan pemuda di kawasan. Program pertukaran pemuda dilaksanakan dengan negara-negara Mitra Wicara seperti dengan China, Jepang dan *Republic of Korea (RoK)*. Pada tanggal 1-11 Februari 2007 telah dilaksanakan ASEAN-Korea *Youth Exchange Programme*: ASEAN Youth visit to Korea. Kerjasama Indonesia-RoK tersebut telah dirintis sejak tahun 2000 yang lalu. Program pertukaran pemuda tersebut merupakan program tahunan.

Sedangkan di tingkat nasional, dalam rangka 40 tahun ASEAN, telah diselenggarakan Forum Diskusi dengan tema

"Peningkatan Peran Pemuda Indonesia dalam Pengembangan Kerjasama ASEAN" tanggal 21-22 Maret 2007 di Jakarta. Diskusi diadakan sebagai upaya untuk mensosialisasikan perkembangan terkini ASEAN, menggalang masukan (*input*) dari pemuda Indonesia bagi pengembangan prioritas kerjasama pemuda ASEAN sebagai bagian dari upaya mewujudkan Komunitas ASEAN 2015 serta membangun jejaring para pemuda khususnya mereka yang pernah berpartisipasi langsung dalam program kerjasama ASEAN.

Para Menteri Pemuda se-ASEAN dalam Sidangnya yang ke-5 di Singapura, 25-26 April 2007, telah sepakat untuk senantiasa mempertimbangkan aspirasi para pemuda dalam pengambilan kebijakan dan keputusan guna mencapai visi ASEAN, perlu terus melibatkan para pemuda, memanfaatkan kemampuan, potensi dan bakat para pemuda. Tema yang telah diangkat dalam Sidang ke-5 Para Menteri Pemuda se-ASEAN adalah : "*Youth: Creating Our Future Together*". Pemuda mempunyai peranan penting menentukan masa depan kawasan ASEAN. Oleh karena itu sudah waktunya bagi para pemuda untuk menampilkan peranannya mulai dari sekarang.

Untuk pertamakalinya pada Sidang ke-5 Para Menteri Pemuda se-ASEAN diselenggarakan Kaukus Pemuda. Para pemuda ASEAN yang tergabung dalam Kaukus Pemuda tersebut mengadakan diskusi secara khusus, mengenai isu pendidikan, kewirausahaan, lingkungan hidup serta keterlibatan pemuda dalam masyarakat. Rekomendasi Kaukus Pemuda disampaikan secara langsung kepada Para Menteri Pemuda se ASEAN pada Sidang tersebut.

7.3. Kerjasama Bidang Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Obat-obat Terlarang (P4GN)

Secara umum, inti dari kerjasama penanggulangan masalah narkoba (P4GN) di tingkat regional ASEAN diarahkan pada upaya realisasi komitmen *A Drug Free ASEAN 2015* (Kawasan Bebas Narkoba ASEAN 2015), yang dipertegas dalam Rencana Aksi

Komunitas Sosial-Budaya. Upaya di tingkat regional tersebut diselaraskan dengan langkah-langkah di tingkat nasional yang menetapkan pencapaian Kawasan Bebas Narkoba Indonesia 2015.

Penanganan kejahatan lintas negara di bidang narkoba dibahas dalam ASEAN *Senior Officials on Drugs Matters* (ASOD), *Senior Officials Meeting on Transnational Crimes* (SOMTC), *ASEAN and China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs* (ACCORD), dan ASEAN-EU *Sub-Committee on Narcotics*.

Pada Pertemuan ke-27 ASOD di Chiang Mai, Thailand, tahun 2006 menyepakati bahwa ASOD harus bersinergi dengan ACCORD *Comprehensive Plan of Action*. Terkait kerjasama antara ASOD dengan *Senior Officials Meeting on Transnational Crime* (SOMTC) khususnya menyangkut bidang penegakan hukum, disepakati agar terdapat mekanisme koordinasi antara SOMTC dan ASOD. Terkait dengan hal ini, ASOD *Working Group on Law Enforcement* diharapkan menjadi *operational arm* dari kegiatan-kegiatan SOMTC di bidang *illicit drug trafficking*.

Beberapa rekomendasi dihasilkan dalam pertemuan *working group*, antara lain:

- a. Penyusunan ASOD *Work Plan* yang selaras dengan ACCORD *Plan of Action* dan SOMTC *Work Programme on illicit drug trafficking*;
- b. Memberikan perhatian kepada *preventive drug education*;
- c. Mengadakan pelatihan mengenai *controlled delivery* yang akan dikembangkan pada penyusunan suatu *standard operating procedures*;
- d. Pertukaran data melalui mekanisme yang telah ada yaitu *Drug Abuse Information Network for Asia and Pacific* (DAINAP); serta
- e. Kerjasama *sustainable alternative development* guna mengurangi tanaman terlarang seperti opium dan ganja.

Proyek kerjasama ASEAN-China di bidang *anti money laundering related to drug crimes* dan *compulsory drug treatment and rehabilitation* disepakati pada Pertemuan *Third ACCORD Joint Task Forces Meeting* yang dilaksanakan bersamaan dengan Pertemuan ke-27 ASOD tahun 2006. Pada Pertemuan tersebut Indonesia telah melaporkan pelaksanaan *Training on Undercover and Tactical Operation* bulan Juli 2006.

7.4. Kerjasama Bidang Yayasan ASEAN (ASEAN Foundation)

Pembentukan Yayasan ASEAN merupakan usulan Indonesia dan tindak lanjut dari keputusan para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-5 di Bangkok tahun 1995. Maksud pembentukan Yayasan ASEAN adalah untuk meningkatkan posisi kerjasama sosial budaya yang diharapkan dapat memberikan kemakmuran bagi ASEAN, melalui pembangunan SDM, peningkatan iptek dan kesadaran sosial. MoU pendirian Yayasan ASEAN, ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN, pada 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur.

Untuk dapat melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatannya, Yayasan didukung dengan dana abadi dan dana operasional (*endowment fund and operational fund*) yang didapat dari kontribusi negara-negara anggota ASEAN, Mitra Wicara ASEAN, sektor swasta, yayasan-yayasan perorangan ataupun donatur lainnya.

Yayasan ASEAN mempunyai tiga organ penting, yaitu Dewan Penyantun (*Board of Trustees/BOT*), Dewan Penasehat (*Council of Advisor*), dan Direktur Eksekutif (*Executive Director*). Setiap negara anggota mempunyai seorang wakil di Dewan Penyantun yang bertugas membuat kebijakan, menentukan prioritas-prioritas dan mengesahkan anggaran tahunan serta persetujuan proyek. Dewan Penasehat bertugas memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Penyantun.

Direktur Eksekutif yang mengepalai Sekretariat bertanggung jawab kepada Dewan Penyantun, bertugas mewakili Yayasan ASEAN dalam segala kegiatan yang bersifat administratif maupun

operasional. Direktur Eksekutif sebelumnya dijabat oleh Dubes Wisber Loeis - Indonesia (1998-2001), Prof. Dr. Ruben C. Umaly - Filipina (2002-2005), dan Dr. Apichai Sunchindah – Thailand (2005-2007).

Dalam perkembangannya Yayasan ASEAN telah melakukan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mendorong adanya kepedulian dan partisipasi yang luas dari masyarakat ASEAN terhadap kegiatan-kegiatan ASEAN. Hal ini tercermin dari berbagai proyek kegiatan dan pelatihan-pelatihan yang bersifat regional bagi masyarakat (*grass root*) ASEAN. Selain itu Yayasan juga melakukan berbagai kolaborasi dengan organisasi internasional maupun negara-negara lain yang melihat manfaat dan pentingnya misi Yayasan ASEAN.

Tantangan yang dihadapi oleh Yayasan ASEAN adalah kemandirian dalam pembiayaan operasional Yayasan ASEAN. Yayasan ASEAN diharapkan lebih proaktif dalam mengadakan kegiatan-kegiatan penggalangan dana. Selain itu, Yayasan ASEAN memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan ASEAN *awareness* di masyarakat ASEAN.

7.5. Kerjasama Bidang Kepegawaian dan Administrasi

Dibentuknya ASEAN *Conference on Civil Service Matters* (ACCSM) pada tahun 1981 mempunyai tujuan untuk saling tukar menukar pengalaman kerja serta memperbaiki efisiensi dan efektivitas manajemen publik yang dalam fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun mekanisme ACCSM meliputi kegiatan-kegiatan antara lain: konferensi/seminar tingkat para pimpinan (pejabat tinggi pemerintahan) maupun pakar dibidang pelayanan umum, pertukaran kunjungan antara pejabat pemerintahan, pelatihan dan penelitian dibidang administrasi publik dan hal lain yang berhubungan dengan kebijakan pegawai di lingkungan ASEAN.

Tahun 2007 – 2008 Indonesia akan menjadi Ketua ACCSM ke-14. Sesuai usulan Indonesia, maka tema *the 14th* ASEAN

Conference on Civil Service Matters (ACCSM) adalah: “*Developing Corporate Culture in Public Service towards ASEAN Community 2015*”. Tema ini dipilih untuk menjawab tantangan di era globalisasi. Disamping itu tuntutan publik akan pelayanan birokrasi yang baik, cepat dan sederhana semakin besar sehingga perlu ditetapkan *ASEAN corporate culture values* melalui peningkatan kapasitas, pertukaran informasi, pengalaman dan *best practices*.

Menurut rencana Pertemuan ke-14 ACCSM akan diadakan di Bali pada bulan Oktober 2007, sedangkan *Technical Meeting* dan *Informal Meeting* akan diadakan pada bulan Oktober 2008 di Bukittinggi.

E. KERJASAMA EKSTERNAL ASEAN

Saat ini ASEAN memiliki 11 Mitra Wicara (*Dialogue Partners*) yakni Australia, Kanada, China, Uni Eropa, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, Amerika Serikat dan UNDP. Selain itu, ASEAN memiliki satu negara Mitra Wicara sektoral, yaitu Pakistan. ASEAN juga melakukan hubungan terbatas dengan berbagai organisasi regional dan internasional.

Dalam menjalin kerjasama dengan negara Mitra Wicara, ASEAN menetapkan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Kerjasama ASEAN dengan negara Mitra Wicara harus memperkuat ketahanan nasional negara-negara ASEAN yang selanjutnya dapat meningkatkan ketahanan regional ASEAN;
- b. Kerjasama ASEAN dengan negara Mitra Wicara tidak dimaksudkan untuk menggantikan kerjasama bilateral yang sudah ada;
- c. Kerjasama ASEAN dengan negara Mitra Wicara tidak boleh mengandung ikatan-ikatan politik yang merugikan kepentingan nasional;

- d. Kerjasama ASEAN dengan negara Mitra Wicara tidak boleh merugikan salah satu negara ASEAN; dan
- e. Proyek-proyek kerjasama sebaiknya dilaksanakan di kawasan ASEAN.

Untuk periode tahun 2006-2009, Indonesia menjadi negara koordinator hubungan kerjasama ASEAN-India. Sebelumnya Indonesia menjadi koordinator untuk kerjasama ASEAN-EU (2003-2006) yang semenjak tahun 2006 telah diserahkan kepada Kamboja.

1. ASEAN-Australia

Australia menjadi Mitra Wicara penuh ASEAN pada tahun 1974, yang ditandai dengan pembentukan ASEAN-Australia *Consultative Meetings* (AACM). Mekanisme dalam hubungan dialog ASEAN-Australia dilakukan pada berbagai tingkatan yaitu ASEAN *Regional Forum* (ARF), *Post Ministerial Conference* (PMC) 10+1, *Informal Consultations between AEM and Ministers from the CER Countries*, ASEAN-Australia *Forum*, ASEAN-Australia *Joint Planning Committee* (JPC), *Project Coordination Committees* (PCCs), ASEAN-*Canberra Committee*, dan berbagai kelompok kerja (dalam bidang perdagangan dan investasi, telekomunikasi, pendidikan dan pelatihan, industri dan teknologi, lingkungan hidup serta budaya dan informasi).

Di bidang kerjasama politik dan keamanan, capaian penting kerjasama ASEAN-Australia adalah akses Australia ke dalam TAC pada tahun 2005. Dalam kaitan dengan masalah kejahatan transnasional, telah diadakan dua kali pertemuan regional tingkat menteri mengenai *People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime* di Bali pada bulan Februari 2002 dan April 2003. Di bidang memerangi terorisme, Australia pun telah menandatangani ASEAN-Australia *Joint Declaration on Counter Terrorism* pada pertemuan AMM/PMC/ARF ke-37, Juli 2004 di Jakarta.

Selanjutnya berbagai hasil konkret telah dicapai antara lain kemajuan dalam model hukum untuk orang-orang yang melakukan penyelundupan dan perdagangan manusia, semakin eratnya kerjasama badan-badan hukum, dan kerjasama dalam mekanisme fasilitasi pertukaran informasi.

Saat ini ASEAN-Australia telah berhasil menyusun *draft Joint Declaration on ASEAN-Australia Comprehensive Partnership* yang akan ditandatangani tahun 2007. Konsep deklarasi ini merupakan payung bagi berbagai program kerjasama yang akan dimasukkan ke dalam *Plan of Action* (PoA). Indonesia berhasil memasukkan beberapa isu mengemuka untuk dituangkan dalam konsep PoA tersebut yaitu isu korupsi, *money laundering*, *disaster management* dan kerjasama penanggulangan terorisme.

Di bidang ekonomi dan pembangunan, para Menteri Ekonomi ASEAN telah membahas kemungkinan untuk menggabungkan ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) dengan *Australia New Zealand Closer Economic Relations* (CER).

Pada *Commemorative Summit* bulan Nopember 2004, telah disepakati agar perundingan pembentukan kawasan perdagangan bebas (AFTA-CER FTA) akan dimulai awal 2005, dan diharapkan selesai dalam dua tahun. FTA kemudian akan diimplementasikan secara penuh dalam jangka waktu 10 tahun. Diharapkan pengaitan AFTA-CER tersebut dapat memberikan manfaat yang nyata bagi sektor swasta dan pelaku bisnis serta menjadi "*building blocks*" bagi fasilitasi perdagangan antara ASEAN dan Australia.

Kerjasama pembangunan ASEAN-Australia tertuang dalam MoU ASEAN-Australia *Development Cooperation Programme* (AADCP) pada tanggal 1 Agustus 2002. Sasaran utama AADCP adalah untuk memberikan manfaat bagi negara-negara CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam) dalam kerangka *Initiative for ASEAN Integration* (IAI) untuk mempersempit jurang perbedaan dan proses percepatan integrasi CLMV. AADCP juga mencakup kerjasama ekonomi dan sosial, *capacity building*, kerjasama iptek dan lingkungan.

2. ASEAN-Kanada

Hubungan dialog ASEAN-Kanada secara resmi terbentuk dengan ditandatanganinya ASEAN-*Canada Economic Cooperation Agreement* (ACECA) di New York pada tanggal 25 September 1981. Persetujuan tersebut diikuti oleh pembentukan ASEAN-*Canada Joint Cooperation*

Committee (JCC) pada tanggal 1 Juni 1982. Komite ini berfungsi sebagai forum dialog bagi ASEAN dan Kanada untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kerjasama kedua belah pihak di bidang-bidang ekonomi, perdagangan, investasi, industri dan kerjasama pembangunan.

Hubungan Mitra Wicara ASEAN-Kanada telah mengalami berbagai pasang surut seiring dengan perkembangan isu penegakan HAM di beberapa negara ASEAN. Namun hubungan ASEAN-Kanada kembali meningkat dengan disepakatinya pelaksanaan dialog reguler *ASEAN-Canada Dialogue* pada tanggal 30 Maret 2004 di Bandar Seri Begawan. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan “*engagement*” Kanada terhadap ASEAN.

Pada tahun 2006, hubungan kerjasama ASEAN-Kanada telah mengalami pertumbuhan yang cukup prospektif. Hal ini dibuktikan dengan disepakatinya *ASEAN-Canada Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism* dan 2005-2007 *ASEAN-Canada Joint Cooperation Work Plan* yang ditandatangani pada *Post Ministerial Conference* (PMC) di Kuala Lumpur, Malaysia, 27 Juli 2006.

Beberapa isu mengemuka yang juga berhasil dituangkan dalam *Work Plan* tersebut adalah *health security*, *counter terrorism*, kejahatan lintas batas, pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*), dialog antar agama (*interfaith dialogue*) dan kesetaraan *gender*.

Di bidang kerjasama politik dan keamanan, pada tahun 2007 ASEAN dan Kanada akan menyelenggarakan *Workshop on Preventing Bio-Terrorism* dan *Workshop on Forging Cooperation among Anti-Terror Units* sebagai implementasi *ASEAN-Canada Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism*.

Di bidang ekonomi, ASEAN dan Kanada telah menyelenggarakan *ASEAN-Canada Business Forum* dan Pertemuan ASEAN-Canada *Senior Economic Officials Meetings* (SEOM) tanggal 2-3 Mei 2005 di Toronto. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pengusaha-pengusaha serta pejabat tinggi ekonomi ASEAN dan Kanada. Untuk meningkatkan hubungan ekonomi ASEAN-Kanada, ASEAN

mengharapkan agar kerjasama ASEAN-Kanada di bidang ekonomi dapat dipertegas dengan menyelesaikan perundingan *Trade and Investment Cooperation Arrangement* (TICA).

3. ASEAN – China

Hubungan kerjasama informal ASEAN-China dimulai pada tanggal 19 Juli 1991. China memperoleh status sebagai Mitra Wicara penuh ASEAN pada bulan Juli 1996 saat pertemuan AMM ke-29 di Jakarta. Mekanisme kerjasama ASEAN-China dilakukan melalui beberapa tingkatan yaitu KTT, Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN-China, *ASEAN-China Senior Officials’ Consultation* (ACSOC), *ASEAN-China Joint Cooperation Committee* (ACJCC), dan *ASEAN-China Working Group on Development Cooperation* (ACWGDC).

Dokumen dasar kerjasama ASEAN dan China adalah *Joint Declaration of the Heads of State/Government of the Association of the Southeast Asia Nations and the People’s Republic of China on Strategic Partnership for Peace and Prosperity* yang ditandatangani pada KTT ASEAN-China di Bali tanggal 8 Oktober 2003. Untuk melaksanakan Deklarasi Bersama tersebut, pada KTT ASEAN-China di Vientiane, 29 Nopember 2004, para Pemimpin ASEAN dan China mengadopsi *Plan of Action to implement the Joint Declaration on Strategic Partnership*.

Di bidang kerjasama politik dan keamanan, China telah mengaksesi TAC pada KTT ASEAN-China di Bali tanggal 8 Oktober 2003. Selain itu China telah menandatangani beberapa kesepakatan dengan ASEAN antara lain *MoU Between the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the Government of the People’s Republic of China on Cooperation in the Field of Non-traditional Security Issues* di Bangkok, 10 Januari 2003 dan *the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) sebagai *confidence-building measures* antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Di bidang ekonomi, para Menteri Ekonomi ASEAN dan China telah menjalin interaksi melalui Konsultasi AEM dengan China. Pada

KTT ASEAN-China di Phnom Penh, 4 Nopember 2002, para pemimpin ASEAN dan China telah menandatangani ASEAN-China *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation* yang merupakan landasan bagi perundingan ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA). Mengenai jangka waktu ACFTA, disepakati bagi ASEAN-6 pada tahun 2010 dengan fleksibilitas hingga 2012 bagi produk-produk sensitif, dan untuk negara-negara CLMV pada tahun 2015. Dalam *Framework Agreement* ini tercakup “*special and differential treatment and flexibility*” bagi negara-negara CLMV, serta pengaturan mengenai “*early harvest*” bagi barang-barang dan jasa-jasa tertentu.

Selanjutnya pada pertemuan tingkat menteri pada tanggal 27 Nopember 2004, ASEAN dan China telah menandatangani *Agreement on Trade and Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and China*; dan *Agreement on Dispute Settlement Mechanism between ASEAN and China*. Penandatanganan kedua dokumen tersebut menegaskan tekad ASEAN dan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.

Pada tahun 2006, ASEAN dan China telah merayakan peringatan 15 tahun hubungan ASEAN-China dengan puncak perayaan ASEAN-China *Commemorative Summit* di Nanning, China, 30-31 Oktober 2006. Pertemuan ini menghasilkan *Joint Statement of ASEAN-China Commemorative Summit: Towards an Enhanced ASEAN-China Cooperation*, yang memuat arah strategis bagi pengembangan kerjasama di bidang politik-keamanan, ekonomi dan sosial-budaya untuk 15 tahun ke depan. Dokumen tersebut juga memuat esensi pentingnya peningkatan kerjasama di bidang *post-disaster reconstruction and rehabilitation* dan bidang penegakan hukum.

Untuk meningkatkan *people-to-people contacts*, China telah menawarkan program pelatihan di berbagai bidang untuk 8000 tenaga profesional dari negara-negara ASEAN serta mengundang 1000 pemuda ASEAN berkunjung ke China selama 5 tahun ke depan. China juga secara konsisten mendukung upaya integrasi ASEAN dengan memberikan kontribusi dana sebesar USD 1 juta masing-masing kepada ASEAN-China *Cooperation Fund* dan pelaksanaan *Initiative for ASEAN-Integration*.

Raihan penting lainnya kerjasama ASEAN-China selama tahun 2006 adalah dibentuknya mekanisme pertemuan reguler para Menteri Kesehatan ASEAN-China yang bertujuan untuk memajukan kerjasama di bidang kesehatan masyarakat. Sementara itu ASEAN-China *Funds for Public Health* dibentuk pada tanggal 22 Juni 2006, di Yangon, Myanmar.

Bobot kerjasama ASEAN-China semakin meningkat pada KTT ke-10 ASEAN-China di Cebu, Filipina tanggal 14 Januari 2007. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN dan China telah menyepakati antara lain:

- a. Memperkuat rasa saling percaya secara politis (*Strengthening political mutual trust*);
- b. Upaya peningkatan hubungan kerjasama ekonomi ASEAN-China ke tataran yang lebih tinggi (*Bringing ASEAN-China economic relations and trade to a new level*);
- c. Mengembangkan kerjasama di bidang non-tradisional isu (*Carrying out cooperation in non-traditional security fields*); dan
- d. Secara aktif mendukung upaya pembangunan masyarakat ASEAN dan integrasi ASEAN (*Actively supporting ASEAN community building and integration*).

Pertemuan tersebut juga menghasilkan dokumen kerjasama ASEAN-China yaitu ASEAN-China *Agreement on Trade in Services (TIS) of the Framework on Comprehensive Economic Cooperation*, kerjasama di bidang ICT serta MoU ASEAN-China di bidang pertanian. Sedangkan dalam bidang perdagangan dan investasi, ASEAN dan China telah sepakat untuk mempercepat pembahasan pembentukan *Free Trade Agreement* serta pembentukan ASEAN-China *Centre for Promoting Trade, Investment and Tourism*.

Selain itu, pada KTT ke-10 ASEAN-China, telah disepakati untuk mempercepat penyusunan *code of conduct in the South China Sea* sebagai pedoman untuk mempertahankan perdamaian di Laut China Selatan. Dalam kaitan ini, Kepala Negara memberikan instruksi kepada pejabat senior untuk memfinalisasi *Guidelines for the*

Implementation of the DOC dan menyelenggarakan *the ASEAN-China Joint Working Group (ACJWG) on the DOC* dalam waktu yang tidak terlampaui lama.

4. ASEAN-Uni Eropa

Hubungan kerjasama ASEAN-Uni Eropa (UE) dirintis pada 1972 ketika ASEAN membentuk *Special Coordinating Committee of ASEAN Nations (SCCAN)*. Tujuannya adalah untuk mengadakan dialog dengan pihak Masyarakat Eropa (ME). ASEAN *Brussels Committee (ABC)* yang beranggotakan para Duta Besar negara-negara ASEAN di Brussels, berfungsi melaksanakan konsultasi-konsultasi antara kedua pihak. Selanjutnya ASEAN-EU membentuk *Joint Cooperation Committee (JCC)*. Komite ini mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan membahas serta mengawasi pelaksanaan kerjasama di bidang ekonomi dan pembangunan serta sosial budaya.

Pada tanggal 9 Juli 2003, UE telah mengesahkan *European Commission (EC)'s Communication: A New Partnership with Southeast Asia* yang menjadi landasan EU untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk dengan ASEAN. Komunikasi tersebut berisikan strategi komprehensif UE dalam mengembangkan kerjasama dengan ASEAN pada masa-masa yang akan datang.

Komunikasi tersebut memfokuskan enam prioritas strategi yaitu:

- a. *Supporting regional stability and the fight against terrorism;*
- b. *Human Rights, democratic principles and good governance;*
- c. *Mainstreaming Justice and Home Affairs issue;*
- d. *Injecting a new dynamism into regional trade and investment relations;*
- e. *Continuing to support the development of less prosperous countries; dan*
- f. *Intensifying dialogue and co-operation in specific policy areas.*

Komunikasi EC juga mendorong dibentuknya kerjasama yang terkait dengan perdagangan melalui *Trans-Regional EU-ASEAN Trade Initiative (TREATI)* dan mekanisme kerjasama pembangunan yaitu *Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument (READI)*.

Untuk membantu pencapaian integrasi ekonomi ASEAN, UE secara berkelanjutan melaksanakan ASEAN *Project for Regional Integration Support (APRIS)*. APRIS bertujuan meningkatkan iklim investasi dan perdagangan di ASEAN melalui liberalisasi ekonomi, fasilitasi perdagangan, jasa, stabilitas sektor keuangan, prosedur kepabeanan, promosi investasi, jaminan sosial, energi dan lingkungan hidup.

Pada tahun 2006, Indonesia telah menyelesaikan tugasnya sebagai Negara koordinator untuk ASEAN-Uni Eropa untuk periode 2003-2006. Selanjutnya Kamboja akan menjadi Negara koordinator untuk periode 2006-2009. Salah satu perkembangan yang telah tercapai selama tahun 2006 adalah pertemuan *Final Evaluation Mission for ASEAN-EU Programme for Regional Integration Support (APRIS) I for the Period of 2003-2006* yang telah memberikan kontribusi dalam merumuskan ASEAN *Demand Driven Needs*. EU juga telah menyatakan dukungan pada terwujudnya ASEAN *Single Window* sebagai bentuk harmonisasi bea cukai dalam proses integrasi ASEAN.

Dalam bidang politik dan keamanan, telah disepakati *Joint Co-Chairmen's Statement* dan *Joint Declaration on Cooperation to Combat Terrorism* pada tanggal 27-28 Januari 2003. Tujuan utama dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama regional di kawasan ASEAN dan mendukung peningkatan *capacity building* dalam kerangka ASEAN untuk memerangi aksi terorisme.

Sebagai implementasi, dalam *Regional Indicative Programme (RIP) 2005-2006* yang diusulkan oleh UE, terdapat anggaran dana sebesar 4-6 juta Euro bagi program *Fight Against Terrorism* yang terbagi dalam program pelatihan kewaspadaan (*awareness training*) dan pengamanan dokumen (*Regional Project on document security*) untuk jangka waktu 3 tahun mulai tahun 2006.

Selain itu, ASEAN dan EU juga telah merampungkan program ASEAN-EU *Cooperation Programme on Border Management and Document Security*, sebagai salah satu implementasi kesepakatan pada forum READI dan hasil pertemuan ASEAN-EU *Senior Officials' Meeting* tahun 2006.

5. ASEAN-India

India menjadi Mitra Wicara penuh ASEAN pada saat KTT ke-5 ASEAN di Bangkok tanggal 14-15 Desember 1995. Perkembangan hubungan ASEAN-India mencapai momentum penting dengan terselenggaranya KTT pertama ASEAN-India, tanggal 5 Nopember 2002 di Phnom Penh, Kamboja. Pada KTT tersebut, para Pemimpin ASEAN dan India menegaskan komitmen untuk meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan dan investasi, pengembangan sumber daya manusia, iptek, teknologi informasi dan *people to people contact*.

Selanjutnya komitmen ASEAN dan India tersebut kemudian dikukuhkan dengan ditandatanganinya ASEAN-India *Partnership for Peace, Progress and Shared Prosperity and Plan of Action* pada KTT ASEAN-India di Vientiane, tanggal 30 Nopember 2004.

Sejak tahun 2006, Indonesia telah menjadi negara koordinator untuk hubungan kerjasama ASEAN-India sampai tahun 2009. Dalam kaitan ini, Indonesia menekankan kerjasama ASEAN-India yang berorientasi pada upaya implementasi dari berbagai proyek kerjasama dalam segala bidang. Dalam kepemimpinan Indonesia, secara spesifik hubungan kerjasama ASEAN-India diarahkan pada upaya-upaya pengembangan kerjasama di bidang farmasi, khususnya menyangkut pengadaan obat generik dan obat tradisional, peningkatan kapasitas SDM dalam bidang teknologi dan *managerial capabilities*, peningkatan volume perdagangan hingga mencapai USD 30 milyar, kerjasama investasi, kerjasama bidang teknologi komunikasi dan informatika (ICT) serta pengembangan energi alternatif.

Di bidang kerjasama politik dan keamanan, ASEAN dan India terus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kerjasamanya. Beberapa kesepakatan penting antara lain adalah akses India

terhadap *Treaty of Amity and Cooperation in the Southeast Asia* (TAC) pada KTT ASEAN-India di Bali tanggal 8 Oktober 2003 dan *Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism* pada KTT ke-9 ASEAN di Bali, bulan Oktober 2003.

Sedangkan kemajuan di bidang ekonomi, ASEAN dan India telah menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and the Republic of India* pada KTT ke-2 ASEAN-India tanggal 8 Oktober 2003 di Bali. Sesuai dengan *Framework Agreement* tersebut, proses negosiasi pengurangan dan penghapusan tarif untuk perdagangan barang telah dimulai pada Januari 2004. Namun demikian, dalam perundingan terdapat berbagai kendala, yaitu perbedaan penerapan aturan untuk *Rules of Origin* (RoO) sehingga proses perundingan masih belum berjalan dengan baik.

Kerjasama pembangunan ASEAN-India selama tahun 2006 meliputi bidang transportasi dan infrastruktur, perdagangan dan investasi, bioteknologi, pengembangan SDM dan pariwisata. Proyek yang telah berhasil dilaksanakan antara lain kunjungan pengusaha kecil dan menengah ASEAN ke India. Kegiatan ini bertujuan menciptakan *inter-firm linkages* antar kalangan pengusaha di masa mendatang. Kegiatan lainnya adalah ASEAN-India *Workshop for System Administrators* yang berlangsung pada bulan Agustus 2006 dan ASEAN-India *Seminar on e-learning* pada bulan Nopember 2006. Kerjasama bidang bioteknologi juga dilaksanakan dalam bentuk ASEAN-India *Workshop on Bioinformatics* yang telah berlangsung untuk kedua kalinya pada bulan Desember 2006. Kerjasama pembangunan tersebut didanai oleh ASEAN-India *Cooperation Fund*.

Sejalan dengan kebijakan India "*Look East Policy*", pada KTT ke-5 ASEAN-India di Cebu tahun 2007, ASEAN dan India menyepakati untuk pengembangan kerjasama khususnya di bidang Iptek, SMEs, teknologi informasi dan pengembangan sumber daya manusia. Seperti halnya Mitra Wicara ASEAN lainnya, India juga menyatakan dukungannya untuk proses integrasi ASEAN.

Pada KTT tersebut, para Pemimpin ASEAN juga menegaskan komitmen untuk mempercepat finalisasi perundingan ASEAN-India

FTA dengan batas waktu bulan Juli 2007 guna penurunan tarif dari 0 sampai 5 persen sampai 2018.

Untuk meningkatkan kedekatan dan saling pengertian antar masyarakat ASEAN dan India, maka dalam KTT ke-5 ASEAN-India juga disepakati undangan kepada 100 pemuda ASEAN yang terdiri dari 10 orang dari masing-masing negara anggota ASEAN untuk berkunjung ke India dalam rangka memperingati 40 tahun ASEAN dan 60 tahun kemerdekaan India.

6. ASEAN-Jepang

Kerjasama ASEAN-Jepang dijamin sejak tahun 1973 dan diresmikan pada tahun 1977 dengan diselenggarakannya ASEAN-Japan Forum pertama, yang merupakan pertemuan antar pejabat tinggi ASEAN dan Jepang. Hingga saat ini, kerjasama ASEAN-Jepang terfokus pada pengembangan sumber daya manusia dan integrasi ASEAN.

Sejak dilembagakan pada 23 Maret 1977, kerjasama ASEAN-Jepang terus berkembang dengan menggunakan beberapa forum antara lain:

- a. ASEAN-Japan Forum yang merupakan pertemuan tingkat Pejabat Tinggi;
- b. Post Ministerial Conference (PMC);
- c. ASEAN Economic Ministers-Ministry of International Trade and Industry (MITI);
- d. KTT ASEAN-Jepang; dan
- e. Pertemuan-pertemuan antar swasta.

Jepang adalah salah satu Mitra Wicara yang aktif bagi ASEAN. Intensitas kerjasama yang tinggi terlihat melalui pelaksanaan berbagai proyek dengan pembiayaan Jepang dalam kerangka Japan-ASEAN General Exchange Fund (JAGEF), Japan-ASEAN Economic Partnership (JAEP) Fund, dan Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF).

Di bidang politik dan keamanan, Jepang juga telah mengaksesi TAC yang ditandatangani pada tanggal 2 Juli 2004 di Jakarta. ASEAN dan Jepang juga telah menandatangani *Joint Declaration for Cooperation on the Fight Against International Terrorism* pada KTT ASEAN-Jepang tanggal 30 Nopember 2004.

Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2003 di Tokyo, para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dan Jepang menandatangani *Tokyo Declaration for the Dynamic and Enduring ASEAN-Japan Partnership* dan *ASEAN-Japan Plan of Action*. *Plan of Action* tersebut mengidentifikasi bidang-bidang kerjasama yang penting dan memberikan arah bagi kerjasama di masa mendatang. Sebagai langkah konkrit, ASEAN dan Jepang telah memulai implementasi program-program yang tercantum dalam *Plan of Action* Deklarasi tersebut.

Pada bidang *capacity building*, Indonesia telah berpartisipasi pada Seminar "*People Building Peace: Human Resources Development in Asia*" dan mendukung diselenggarakannya pelatihan jangka pendek serta jangka panjang di bidang *peacekeeping*, *peacebuilding*, dan *conflict prevention* bagi warga sipil. Untuk itu, ASEAN-Jepang juga akan mendirikan lembaga pelatihan bernama *Terakoya* pada tahun 2007 di Jepang.

Di bidang *maritime security*, usulan Indonesia mengenai pembentukan ASEAN Maritime Forum telah ditanggapi secara positif oleh Jepang. Sementara itu, terkait isu *counter-terrorism*, Indonesia telah menjadi nara sumber dalam Pertemuan pertama ASEAN-Japan Counter Terrorism Dialogue di Tokyo tanggal 28-29 Juni 2006.

Di bidang *transnational crimes*, Indonesia telah menyelenggarakan *3rd Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Plus Japan Consultation* di Bali pada tanggal 9 Juni 2006. Pada pertemuan tersebut disepakati untuk meningkatkan kerjasama ASEAN dan Jepang dalam memberantas *transnational crimes*, terutama dalam upaya *capacity building*, pelatihan, dan pertukaran informasi mengenai tindak kejahatan lintas negara yang pernah terjadi atau berpotensi terjadi.

KTT ke-10 ASEAN-Jepang tahun 2007 mencatat komitmen Jepang untuk membantu Program *Narrowing Development Gap*

negara-negara ASEAN yang akan disampaikan melalui skema *the ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP) bernilai US\$ 52 juta. Para pemimpin ASEAN juga menghargai upaya Jepang mendukung terwujudnya ASEAN *Community* pada tahun 2015 serta implementasi VAP dan IAI. Di bidang kesehatan, Jepang juga akan memberikan kontribusi sebesar US\$67 juta untuk penanganan *avian influenza* dan penyakit menular.

KTJ juga menyepakati usulan Jepang membentuk *Eminent Persons' Group* (EPG). Tugas EPG adalah mengelaborasi *Joint Statement* ASEAN-Jepang mengenai *Deepening and Broadening of the Strategic Partnership* yang ditandatangani pada 9th ASEAN-Japan Summit di Kuala Lumpur untuk diwujudkan dalam kegiatan nyata. EPG akan melakukan pertemuan-pertemuan dan akan memberikan *Final Report* kepada Para Pemimpin ASEAN dan Jepang pada 12th ASEAN-Japan Summit di Thailand pada tahun 2008

7. ASEAN - Selandia Baru

Kerjasama ASEAN-Selandia Baru diawasi sejak 1974, ketika Pemerintah Selandia Baru menyampaikan keinginannya untuk menjalin hubungan kerjasama dengan ASEAN. Hubungan kerjasama kedua pihak berlangsung sejak tahun 1975 dengan dibentuknya ASEAN-New Zealand Dialogue Relations, di mana sejumlah program kerjasama dan kegiatan telah dilakukan, khususnya dalam kerangka bantuan luar negeri Selandia Baru untuk meningkatkan pembangunan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi ASEAN.

Di bidang kerjasama politik dan keamanan, Selandia Baru telah mengaksesi TAC pada kesempatan ASEAN Ministerial Meeting ke-38 di Vientiane, Laos, bulan Juli 2005. Selain itu, ASEAN-Selandia Baru telah menandatangani *Joint Declaration to Combat International Terrorism*.

Pada pertemuan *Post Ministerial Conference* (PMC) di Kuala Lumpur, 27 Juli 2006, ASEAN dan New Zealand telah menandatangani ASEAN-New Zealand Framework for Cooperation 2006-2010. Dokumen tersebut meliputi kerjasama di bidang ekonomi, politik dan keamanan dan *people-to-people education and cultural links*.

Adapun beberapa komitmen yang dihasilkan dalam *Framework* tersebut antara lain menyangkut *Work Programme* untuk mengimplementasikan *Joint Declaration to Combat International Terrorism* serta meningkatkan *capacity building* dalam pemberantasan terorisme dan aktivitas *transnational crimes* lainnya dengan dukungan dana dari *New Zealand's Asia Security Fund* yang telah dibentuk pada tahun 2006. Kerjasama dalam menanggulangi terorisme juga akan memanfaatkan mekanisme yang sudah ada di ASEAN seperti Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC).

Kerjasama ASEAN-Selandia Baru juga meliputi bidang mitigasi dan penanganan bencana, dan difokuskan pada penyelenggaraan pelatihan dan *capacity building*, termasuk peningkatan *public awareness*. Kerjasama pengembangan SDM antara ASEAN dan Selandia Baru mencakup pula sektor pendidikan, serta upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, seperti HIV/AIDS, SARS dan *avian influenza*.

Di bidang kerjasama ekonomi, ASEAN dan negara-negara yang tergabung dalam CER (Selandia Baru dan Australia) sepakat akan potensi ekonomi yang dapat tercipta melalui AFTA-CER linkage, terutama bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan arus perdagangan serta investasi antara dua kawasan.

Kerjasama pembangunan antara ASEAN-Selandia Baru yang telah dilaksanakan selama ini memberikan hasil cukup menggembirakan dan berjalan dengan lancar dengan menitikberatkan pada *Initiative for ASEAN Integration* (IAI) seperti *custom*, standar dan *conformance*. Selandia Baru juga mendukung program kerjasama pembangunan *Mekong River Basin*.

8. ASEAN-Republik Korea (RoK)

Sejak tahun 1989 RoK menjadi Mitra Wicara sektoral, kemudian menjadi Mitra Wicara penuh pada tahun 1991. Kerjasama ASEAN-RoK meliputi bidang ekonomi, perdagangan, investasi, pariwisata, kerjasama pembangunan, dan bidang politik-keamanan. Mekanisme kerjasama ASEAN-RoK dilakukan melalui beberapa tingkatan yaitu

KTT, Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri, ASEAN-RoK *Dialogue*, dan ASEAN-RoK *Joint Planning and Review Committee* (JPRC).

Dalam KTT ASEAN+Republik Korea di Vientiane, tanggal 30 Nopember 2004 telah ditandatangani *Joint Declaration on Comprehensive Cooperation Partnership*, yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kerjasama yang lebih erat dan lebih terarah di masa mendatang. Sebagai salah satu tindak lanjutnya, negosiasi menuju kawasan perdagangan bebas dimulai tahun 2005 dan diharapkan akan terwujud pada tahun 2009.

Kerjasama ASEAN-RoK telah memasuki babak baru dengan ditandatanganinya *Plan of Action to Implement Joint Declaration of the ASEAN-RoK Comprehensive Partnership* pada tanggal 11 Desember 2005 di Kuala Lumpur. Dokumen ini menjadi dasar pengembangan hubungan kerjasama ASEAN dan RoK. Salah satu langkah konkrit adalah pelaksanaan proyek-proyek kerjasama pembangunan yang didanai oleh *Special Cooperation Fund* (SCF) dan *Future Oriented Cooperation Project* (FOCP).

Kerjasama politik dan keamanan ASEAN-RoK telah ditandai dengan aksesi RoK terhadap TAC pada KTT ASEAN di Vientiane tanggal 27 Nopember 2004. Penandatanganan ini merupakan komitmen kuat RoK untuk menyumbang bagi perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal ini juga menjadikan RoK sebagai negara non-ASEAN ke-6 dan negara ASEAN+3 terakhir yang mengaksesi TAC.

Selain itu, ASEAN dan RoK juga berkerjasama dalam meningkatkan upaya bersama dalam menangani isu-isu kejahatan lintas batas. Pada bulan Juli 2006, Pertemuan pertama SOMTC plus RoK telah diselenggarakan di Indonesia dengan pembahasan yang mengemuka adalah kerjasama dalam menghentikan pengedaran gelap narkoba dan kejahatan dunia maya.

Di bidang ekonomi, ASEAN-RoK telah menandatangani *Framework Agreement on comprehensive Economic Cooperation and Agreement on Trade in Goods* pada tahun 2005. Selain itu dalam kerjasama di bidang *people-to-people exchange*, beberapa kegiatan

yang telah dilaksanakan antara lain saling kunjung para pegawai negeri, akademisi, aktivis media dan pemuda yang berlangsung secara reguler dengan dukungan dari FOCP.

Pada KTT ke-10 ASEAN-RoK, Korea Selatan telah menyampaikan komitmennya untuk melipatgandakan bantuan pembangunan kepada ASEAN pada tahun 2009, peningkatan kerjasama bidang teknologi informasi terkait *good governance*, pemberantasan korupsi dan penanganan bencana alam. Selain itu, juga menyepakati pendirian Pusat Promosi Perdagangan, Investasi dan Pariwisata RoK. Kedua pihak juga akan memperpanjang batas waktu penyelesaian pembahasan *Agreements on Trade in Services* sampai bulan Nopember 2007.

9. ASEAN-Rusia

Rusia menjadi Mitra Wicara penuh ASEAN pada Sidang AMM ke-29 di Jakarta bulan Juli 1996. Sebagai tindak lanjut, Sidang ASEAN *Standing Committee* (ASC) 4/30 di Bali bulan Mei 1997 sepakat untuk mewadahi kerjasama sosial budaya ASEAN-Rusia di bawah "ASEAN-Russia *Joint Cooperation Committee*" (ARJCC).

Dalam hubungan kerjasama ASEAN-Rusia, terdapat beberapa dokumen penting antara lain *Agreement between Governments of the Member Countries of ASEAN and the Government of the Russian Federation on Economic and Development Cooperation* (berlaku sejak tanggal 11 Agustus 2006), *Terms of Reference on ASEAN-Russia Joint Cooperation Committee* (ARJCC) dan *ASEAN-Russia Dialogue Partnership Financial Fund* (DPFF) yang dihasilkan pada pertemuan ke-5 ARJCC di Moskow, Russia, pada tanggal 2-3 Nopember 2006.

Peningkatan kerjasama politik ASEAN-Rusia ditandai dengan penandatanganan *Joint Declaration on the Ministers of Foreign Affairs of Russia and Member States of the Association of South East Asian Nations on Partnership for Peace, Stability and Security in the Asia-Pacific Region*, di Phnom Penh, Kamboja bulan Juni 2003 pada saat pertemuan ASEAN PMC+1 *Session with Russia*. Kerjasama politik ASEAN-Rusia juga terus meningkat sejalan dengan aksesi Rusia pada *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC), tanggal 29 Nopember 2004 di sela-sela KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Laos.

Sebagai upaya untuk memerangi terorisme, ASEAN dan Rusia telah menandatangani ASEAN-Russia *Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism* pada tanggal 2 Juli 2002 di Jakarta. *Joint Declaration* ini mencakup kerja sama:

- a. Memperkuat interaksi dengan AMMTC, SOMTC, ARF, PMC dan menjajaki kemungkinan dibentuknya ASEAN-Russia *Working Group on Counter-Terrorism*;
- b. Kerjasama antar lembaga penegak keamanan dan hukum;
- c. Meningkatkan pertukaran informasi intelijen dan masalah pendanaan teroris;
- d. Memperkuat kapasitas kelembagaan melalui pelatihan dan pendidikan, konsultasi antar pejabat dan pakar, serta
- e. Memberikan bantuan transportasi dan pengawasan imigrasi dan perbatasan.

Untuk meningkatkan kerjasama ekonomi ASEAN-Rusia membentuk ASEAN-Russia *Working Group on Trade and Economic Cooperation* (ARWTEC). Pertemuan pertama kelompok kerja tersebut diselenggarakan pada tanggal 19 September 2002 dengan tujuan untuk memfasilitasi usaha, pertukaran informasi mengenai perdagangan dan investasi serta sebagai forum interaksi yang diharapkan dapat meningkatkan kerjasama perdagangan dan ekonomi ASEAN-Rusia.

Beberapa bidang prioritas kerjasama yang memungkinkan dilaksanakan di bidang iptek telah diidentifikasi dalam pertemuan tersebut antara lain *biotechnology, new materials, information technology, microelectronics, meteorology* dan *geophysics*.

10. ASEAN - Amerika Serikat (AS)

Hubungan dialog ASEAN-Amerika Serikat (AS) telah berlangsung sejak tahun 1977 dengan prioritas pada kerjasama ekonomi dan kerjasama pembangunan. Kerjasama ekonomi meliputi komoditas, akses pasar, akses modal dan alih teknologi, sedangkan kerjasama pembangunan diprioritaskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat ASEAN dalam program-program yang diselenggarakan.

Mekanisme kerjasama ASEAN dan AS dilakukan antara lain melalui forum: ASEAN-US *Dialogue*, ASEAN *Regional Forum* (ARF), *Post Ministerial Conference 10+1*, ASEAN *Economic Minister-US Trade Representatives*, *Senior Economic Officials Meeting-USTR*, ASEAN-US SOM TC, ASEAN *Washington Committee* dan ASEAN-US *Business Council* (ABC) untuk sektor swasta.

Kemajuan kerjasama ASEAN-AS pada tahun 2006 ditandai dengan penandatanganan *Framework Document for the Plan of Action (PoA) to Implement the ASEAN-US Enhanced Partnership*. Dokumen ini adalah cetak biru kerjasama ASEAN-AS yang bersifat komprehensif dan memiliki periode implementasi selama 5 tahun. Isu yang mengemuka dalam dokumen tersebut antara lain konsep-konsep anti korupsi dan unsur-unsur dalam *root causes of terrorism*.

Dalam *Joint Press Statement on Follow-Up to the ASEAN-US Enhanced Partnership*, pada tanggal 17 Nopember 2006, disebutkan beberapa prioritas yang akan dilaksanakan untuk tahun 2007, antara lain:

- a. Upaya meningkatkan *good governance* dan memerangi korupsi;
- b. Perlindungan hak intelektual dan peningkatan transparansi;
- c. Kerjasama memajukan usaha menengah dan kecil;
- d. Meningkatkan kemampuan ASEAN dalam memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
- e. Kerjasama di bidang teknologi informasi, transportasi, energi, *disaster management*; dan
- f. *Environmental management*.

Untuk meningkatkan kerjasama politik dan keamanan, ASEAN menghimbau agar AS bersedia untuk mengaksesi TAC. Namun sejak peristiwa 11 September 2001, AS cenderung menitikberatkan kerjasama dengan ASEAN dalam penanganan masalah terorisme. Pada tanggal 1 Agustus 2002, ASEAN dan AS telah menandatangani "ASEAN-US *Declaration on Cooperation to Combat Terrorism*". Bagi ASEAN deklarasi ini lebih bersifat tindak lanjut dari keterikatan politis para pemimpin ASEAN untuk memerangi terorisme, dan untuk kerjasama nyata guna meningkatkan kemampuan ASEAN melalui pertukaran informasi intelijen dan *capacity building*.

Sementara itu, kerjasama di bidang terorisme juga dilakukan dalam kerangka ASEAN *Regional Forum*. ASEAN *Regional Forum Intersessional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Crime* (ARF ISM CT-TC) bertujuan memfasilitasi interaksi antar berbagai *stakeholders*, baik dari kalangan Intelijen, Imigrasi, Bea Cukai, Polisi maupun pengambil kebijakan untuk saling bertukar pengalaman dalam menanggulangi terorisme.

Dalam bidang ekonomi, program kerjasama ASEAN-AS yang saat ini tengah diupayakan adalah implementasi *Enterprise for ASEAN Initiative* (EAI). EAI merupakan inisiatif Presiden Bush yang disampaikan kepada para Pemimpin ASEAN di sela pertemuan APEC di Los Cabos, Meksiko, 26 Oktober 2002. EAI menawarkan peluang perdagangan bebas bilateral antara negara-negara anggota ASEAN dengan AS.

Untuk menindaklanjuti inisiatif EAI, ASEAN-AS telah menandatangani *US Trade and Investment Framework Arrangement* (TIFA) pada tahun 2006. Tujuan akhir EAI adalah terwujudnya berbagai *bilateral free trade* yang dapat lebih mendekatkan ASEAN dengan AS, termasuk membantu APEC menciptakan perdagangan dan investasi bebas di wilayah Asia Pasifik.

Selanjutnya kerjasama pembangunan ASEAN-AS dikemas dalam proyek ASEAN *Cooperation Plan*. Beberapa kegiatan yang telah selesai dan sedang berlangsung antara lain *International Business Linkage Programme*, *Capability Mature Model Programme*, *e-Marketing*, *e-Business Learning*, *IC Assessment*, *Workshop on Cyber-crime* dan *Workshop on Building Capacity to Combat Impacts of Aquatic Alien Species and Associated Transboundary Pathogens in ASEAN Countries*. AS juga aktif dalam membantu implementasi *Work Programme on HIV/AIDS* dan kerjasama penanganan bencana alam dan mitigasi.

11. ASEAN – UNDP

Hubungan ASEAN dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) telah dimulai hampir sejak dibentuknya ASEAN pada tahun 1967. Namun demikian hubungan keduanya baru terasa

sejak awal dasa warsa 70-an, ketika UNDP mensponsori suatu kegiatan pendidikan selama dua tahun dan melibatkan sebanyak 41 tenaga ahli internasional untuk membantu inisiatif pertama ASEAN dalam kerjasama ekonomi. Inisiatif ini pada tahun 1972 menghasilkan dasar-dasar kerjasama ASEAN dalam bidang pengembangan industri, pertanian dan kehutanan, transportasi, keuangan, moneter dan jasa-jasa asuransi.

Pada tahun 1977 UNDP resmi menjadi Mitra Wicara ASEAN dan merupakan satu-satunya badan multilateral yang mendapat status sebagai Mitra Wicara. Hubungan ASEAN dengan UNDP semakin dekat dengan diluncurkannya Program Sub-Regional ASEAN-UNDP pada tahun 1990 yang bertujuan untuk membantu ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mengadakan kerjasama regional. Mekanisme dialog disesuaikan dengan kerangka kerja regional atau *inter-country missions* dari UNDP untuk kawasan ASEAN.

Selanjutnya pada pertemuan ASEAN-UNDP *Working Breakfast* di Kuala Lumpur pada tanggal 28 Juli 2006, telah disepakati peningkatan kerjasama ASEAN-UNDP dengan memasukkan isu-isu baru sebagaimana termuat dalam *Vientiane Action Programme* (VAP), yakni: *disaster management*, pengungsi, bantuan teknis untuk negara-negara CLMV, *good governance* dan kegiatan lain terkait *Treaty of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*.

UNDP sebagai mitra ASEAN yang tertua banyak memberikan bantuan kepada ASEAN, khususnya penyaluran dana melalui *Partnership Facility*. Bantuan UNDP pada umumnya ditujukan untuk mendorong ASEAN dalam upaya menciptakan integrasi ekonomi regional dalam bentuk studi penelitian maupun program-program pembangunan.

12. ASEAN-Pakistan

Dialog sektoral ASEAN–Pakistan secara resmi terbentuk melalui *Exchange of Letters* mengenai pembentukan ASEAN–Pakistan *Joint Sectoral Cooperation Committee* (APJSCC) antara Sekjen ASEAN dan Menteri Luar Negeri Pakistan pada tanggal 29 Mei 1997.

Pertemuan peresmian pembentukan hubungan dialog sektoral ASEAN-Pakistan diselenggarakan di Islamabad pada tanggal 5-7 Nopember 1997 yang membahas modalitas hubungan dialog sektoral ASEAN-Pakistan meliputi APJSCC, ASEAN-Islamabad *Committee* (AIC) dan ASEAN-Pakistan *Business Council* (APBC).

AIC yang terdiri dari para Kepala Perwakilan negara-negara ASEAN di Islamabad, bertugas memfasilitasi hubungan dialog sektoral ASEAN-Pakistan. Adapun APBC yang terdiri dari ASEAN *Chamber of Commerce and Industry* (ASEAN-CCI) dan *Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry* (FPCCI), merupakan forum hubungan bisnis antara kalangan swasta kedua belah pihak khususnya kerjasama pengusaha kecil dan menengah.

Di bidang kerjasama politik dan keamanan, pada Pertemuan ke-36 Menteri Luar Negeri ASEAN di Phnom Penh, Juni 2003, para Menteri sepakat untuk menerima Pakistan sebagai anggota ARF. Pakistan juga telah menandatangani protokol akses terhadap TAC dan menjadi anggota ARF, pada rangkaian pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM/PMC) bulan Juli 2004.

Pada pertemuan ke-3 ASEAN-Pakistan *Joint Sectoral Cooperation Committee* di Islamabad, 5 Juni 2006, Pakistan telah menyampaikan komitmen untuk memberikan kontribusi sebesar US\$ 1 juta kepada ASEAN-Pakistan *Cooperation Fund*. Pemerintah Pakistan juga memberikan program beasiswa *Prime Minister's Scholarship for ASEAN Countries* di bidang studi Teknologi Informasi (S1) dan *Business Management* (S2).

13. ASEAN +3

Kerjasama ASEAN+3 (*ASEAN Plus Three*) dimulai dengan diselenggarakannya KTT Informal di Malaysia bulan Desember 1997, antara para Pemimpin ASEAN dan 3 negara Asia Timur: China, Jepang, dan Republik Korea. Munculnya kerjasama ASEAN+3 dipicu oleh adanya krisis ekonomi Asia yang telah menimbulkan kesadaran akan pentingnya menggalang kerjasama dengan negara-negara besar di wilayah Asia Timur.

ASEAN+3 kemudian dilembagakan dengan dikeluarkannya *Joint Statement on East Asia Cooperation* pada saat KTT ke-3 ASEAN+3 di Manila tahun 1999. ASEAN+3 menekankan komitmen untuk peningkatan kerjasama dalam berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi dan sosial (kerjasama ekonomi, keuangan, sumber daya manusia, iptek, budaya, informasi, pembangunan), dan bidang politik (termasuk isu-isu lintas batas negara).

Untuk memperkuat kerjasama ASEAN+3 telah dibentuk *the East Asia Vision Group* (EAVG) dan *the East Asia Study Group* (EASG) tahun 2002. Pada tahun 2001, EAVG, kelompok yang terdiri dari para intelektual dari negara-negara ASEAN+3, menghasilkan rekomendasi bagi kerjasama regional Asia Timur di masa datang. Selanjutnya pada tahun 2002, EASG, terdiri dari para pejabat pemerintah dan bertugas mengevaluasi rekomendasi EAVG, telah menghasilkan 17 rekomendasi jangka pendek, dan 9 rekomendasi jangka menengah-panjang sebagai langkah konkret yang perlu mendapat prioritas.

Indonesia sendiri telah menyatakan diri menjadi salah satu penggerak kegiatan *the promotion of East Asian studies* seperti yang direkomendasikan oleh EASG melalui program pelatihan bahasa Indonesia untuk para diplomat muda dari negara-negara ASEAN+3 yang telah diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 2005 dan di Bandung pada tahun 2006. Selain itu, Indonesia juga menyelenggarakan *Senior Diplomat Training Course* untuk negara ASEAN+3.

Di bidang politik dan keamanan, ASEAN+3 telah mengadakan berbagai kerjasama untuk menghadapi ancaman terorisme dan kejahatan lintas batas lainnya. Dalam kaitan ini, sejak tahun 2003 telah diselenggarakan ASEAN *SOM Plus Three Consultation on Transnational Crime* (SOMTC+3), yang diadakan di Ha Noi untuk pertama kalinya.

Selain itu, diselenggarakan pula ASEAN *Ministerial Meeting on Transnational Crime Plus Three* pertama di Bangkok, tanggal 10 Januari 2004. Pada pertemuan ini, para Menteri mengadopsi konsep untuk mengatasi kejahatan lintas batas negara seperti terorisme, perdagangan obat terlarang (*illicit drug trafficking*), perdagangan

manusia (*trafficking in persons*), pembajakan di laut (*sea piracy*), penyelundupan senjata (*arms smuggling*), pencucian uang (*money laundering*), kejahatan ekonomi internasional (*international economic crime*), dan *cyber crime*.

Kerjasama di bidang ekonomi diatur dalam *Chiang Mai Initiative* (CMI) yang terdiri dari *Bilateral Swap Arrangements* (BSAs) dan *ASEAN Swap Arrangement* (ASA). Pada KTT ke-10 ASEAN+3, para pemimpin ASEAN+3 sepakat untuk memperluas kerjasama bidang ekonomi, keuangan, perdagangan dan pembangunan termasuk pengembangan bilateral *swap arrangements* dari *Chiang Mai Initiative* sejumlah US\$ 75 milyar. Selain itu, *Asian Bond Market Initiative* diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi/keuangan jangka panjang di kawasan.

Pada KTT ke-10 ASEAN+3 juga menghasilkan kesepakatan dengan fokus kerjasama di bidang pemberdayaan perempuan, pengentasan kemiskinan, penanganan bencana alam, dan kerjasama di bidang sumber daya alam mineral. Dalam kesempatan yang sama, China dan Jepang bersedia menjadi penyelenggara kegiatan-kegiatan tersebut. China juga berinisiatif untuk mendirikan pusat *monitoring regional* bagi penyakit menular dan keinginan Jepang sebesar US\$ 67 juta untuk penanganan *Avian Influenza*.

14. ASEAN dengan organisasi regional lain

Sejak KTT ke-4 ASEAN tahun 1992 di Singapura, ASEAN telah mengembangkan mekanisme untuk menjalin kerjasama dengan organisasi regional lain, yaitu dengan ECO, SCO, SAARC, GCC, SADC, AASROC dan *Rio Group*. Bentuk hubungan kerjasama ASEAN dengan Organisasi-organisasi regional tersebut adalah pada tingkat antar Sekretariat.

a. ASEAN-ECO

Economic Cooperation Organization (ECO) didirikan bulan Januari 1985 sebagai pengganti *Regional Cooperation of Development* (RCD) yang didirikan tahun 1964 yang pada waktu

itu hanya beranggotakan Iran, Pakistan dan Turki. Pada tahun 1992, anggota ECO diperluas meliputi negara-negara Asia Tengah, yaitu Azerbaijan, Turkmenistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kirghizstan, Uzbekistan, dan Afghanistan. Tujuan ECO adalah pengembangan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan; infrastruktur transportasi dan komunikasi; liberalisasi ekonomi; lingkungan hidup dan memperkuat keterkaitan sejarah dan budaya di kawasan.

Mekanisme hubungan antara ASEAN dan ECO adalah Pertemuan Tahunan para Menteri Luar Negeri ASEAN dan ECO pada kesempatan Sidang Majelis Umum PBB di New York yang telah diselenggarakan sejak tahun 1995. Pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN-ECO telah diselenggarakan sebanyak 7 (tujuh) kali. Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-ECO ke-7 dilaksanakan pada tanggal 27 September 2004 di New York.

Pada tahun 2006, ASEAN-ECO telah menandatangani MoU kerjasama di bidang perdagangan dan investasi, penanggulangan narkoba, pengembangan pengusaha kecil dan menengah (SMEs) serta pariwisata. MoU tersebut menandai tataran baru dalam sebelas tahun kerjasama kedua organisasi. Sebagai tindak lanjut, saat ini tengah disusun *Work Plan* guna implementasi MoU tersebut.

b. ASEAN-SCO

Shanghai Cooperation Organization (SCO) adalah organisasi yang didirikan di Shanghai pada 15 Juni 2001 oleh enam negara yaitu China, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan dan Uzbekistan. SCO merupakan kelanjutan dari *Shanghai Five Mechanism* (SCO tanpa Uzbekistan) yang didirikan untuk memperkuat *confidence-building* dan *disarmament* di sepanjang perbatasan negara-negara tersebut. Dalam perkembangannya, SCO memfokuskan diri untuk penanganan masalah-masalah keamanan seperti ancaman terorisme, separatisme dan kejahatan lintas batas negara terutama narkoba.

Sekretariat ASEAN dan Sekretariat SCO telah menandatangani MoU pada tanggal 21 April 2005 di Jakarta. MoU ini akan melandasi kerjasama kedua belah pihak dalam berbagai bidang, seperti penanganan kejahatan lintas batas negara yang mencakup kontra-terorisme, pengawasan narkotika dan obat-obat terlarang, penyelundupan senjata, pencucian uang dan *human trafficking*. Selain itu, kerjasama ini mencakup bidang ekonomi dan keuangan, pariwisata, lingkungan hidup, pembangunan sosial, kerjasama energi khususnya *hydroelectric power* dan *biofuels*.

c. ASEAN-GCC

Dewan Kerjasama Teluk (*The Gulf Cooperation Council/GCC*) merupakan suatu organisasi regional di kawasan Arab yang beranggotakan Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Persatuan Emirat Arab, dan Qatar yang dibentuk pada tahun 1981. Tujuannya adalah mengembangkan kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam perkembangannya kemudian GCC juga memasukkan unsur kerjasama keamanan dalam kegiatan organisasinya.

Pada tahun 2006, ASEAN-GCC telah menyelenggarakan pertemuan di sela-sela Sidang ke-61 Majelis Umum PBB di New York. Dalam pertemuan tersebut, kedua organisasi sepakat untuk mengembangkan potensi kerjasama di berbagai bidang, terutama di bidang investasi dan perdagangan serta energi.

d. ASEAN - SAARC

Kerjasama Regional negara-negara Asia Selatan (*South Asian Association for Regional Cooperation/SAARC*) dibentuk pada tanggal 8 Desember 1985 dalam suatu Konferensi Tingkat Tinggi Negara-negara Asia Selatan di Dhaka.

Keinginan SAARC untuk menjalin kerjasama dengan ASEAN pertama kali dibahas pada pertemuan ASEAN *Standing Committee* ASEAN 5/24, 7-9 Mei 1991 di Kuala Lumpur dan pertemuan menyepakati bahwa kerjasama di antara kedua organisasi hanya pada tingkat antar Sekretariat.

Sekretariat ASEAN dan Sekretariat SAARC tengah mempersiapkan implementasi *Partnership Work Plan* (2004-2005) yang telah disepakati kedua belah pihak dan akan menjadi landasan untuk bertukar pandangan mengenai pengalaman masing-masing pihak untuk pengembangan kerjasama yang lebih berarti.

e. ASEAN- Southern African Development Community (SADC)

Hubungan ASEAN-SADC dimulai pada tahun 1995 pada tingkat antar Sekretariat. Pertemuan informal ASEAN-SADC dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1996 di Singapura pada kesempatan Konferensi Tingkat Menteri WTO. Pertemuan dihadiri oleh para Menteri Ekonomi ASEAN, para Menteri Ekonomi SADC, Sekjen ASEAN dan Sekjen SADC. Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak saling bertukar informasi mengenai perkembangan organisasi masing-masing dan berbagai kerjasama regional di bidang politik, ekonomi, serta kerjasama eksternal.

Pada bulan Juli 2004, Indonesia mengadakan pertemuan dengan SADC di Sekretariat SADC, Bostwana, sebagai awal menuju Pertemuan ASEAN-SADC. Pertemuan membahas mengenai kemungkinan diadakannya suatu konferensi yang dikoordinasi bersama oleh Sekretariat SADC dan Sekretariat ASEAN.

f. ASEAN-AASROC

Asian-African Sub-Regional Organisations Conference (AASROC) merupakan suatu forum untuk memfasilitasi kerjasama antara Asia dan Afrika. Pertemuan *Asian-African Sub-Regional Organisations Conference* (AASROC) I di Bandung bulan Juli 2003 dan Pertemuan Kelompok Kerja AASROC di Durban bulan Maret 2004 menyepakati Sekretariat SADC dan Sekretariat ASEAN akan bekerjasama untuk menyelenggarakan Konferensi Pertama AASROC.

Sekretariat ASEAN telah menyumbangkan dua studi mengenai proses AASROC yaitu: (i) pengalaman pertumbuhan ekonomi *East Asia*; dan (ii) langkah-langkah meningkatkan perdagangan dan investasi.

g. ASEAN-Rio Group

Rio-Group mempunyai 12 negara anggota yaitu: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Columbia, Ecuador, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay dan Venezuela, serta dua perwakilan masing-masing dari negara-negara Amerika Tengah dan negara-negara Karibia. Hubungan antara ASEAN-Rio Group yang terjalin selama ini adalah hubungan informal setingkat Menteri yang diawali oleh Pertemuan Tingkat Menteri yang pertama pada tanggal 1 Oktober 1990 di New York.

Pada tahun 1999, Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dan *Rio Group* diselenggarakan di New York pada kesempatan Sidang Majelis Umum PBB. Pertemuan dipimpin bersama oleh Menteri Luar Negeri RI, Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri Meksiko, Mrs. Maria del Rosario Green Macias. Topik utama pertemuan tersebut adalah *exchange of views* mengenai *Developments in the International Financial Situation* dan *East Asia-Latin Amerika Forum* (EALAF). Sampai saat ini, belum ada perkembangan yang berarti dalam hubungan kerjasama antara ASEAN dengan *Rio Group*.

h. ASEAN-Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)

Keterlibatan ASEAN di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan semakin mendalam dengan diberikannya status peninjau kepada ASEAN oleh PBB pada sesi Sidang Umum organisasi dunia terbesar tersebut tanggal 4 Desember 2006.

Sebelumnya pada tanggal 22 September 2006, para Menlu ASEAN telah bertemu dengan Sekjen PBB, Kofi Annan, dan Presiden SMU PBB ke-61, H.E. Sheikh Haya Rashed Al Khalifa, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-61. Pada pertemuan

tersebut, ASEAN dan PBB sepakat untuk menjalin kerjasama yang baik untuk menangani berbagai masalah *crucial* seperti *avian flu*, pembangunan *tsunami early warning system*, pengentasan kemiskinan dan pemberantasan terorisme. Khusus mengenai pengentasan kemiskinan dan kerjasama pembangunan merupakan 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai dunia internasional sebagaimana termuat dalam *Millenium Development Goals* (MDGs).

15. East Asia Summit (EAS)

East Asia Summit merupakan forum kerjasama regional yang terdiri dari 10 negara ASEAN ditambah dengan Jepang, RoK, China, Australia, Selandia Baru dan India. EAS bersifat terbuka, inklusif, transparan dan *outward looking*. Pada EAS, para Pemimpin negara-negara tersebut membahas isu-isu politik, ekonomi dan isu-isu strategis lainnya dalam rangka memajukan perdamaian dan kemakmuran di kawasan.

EAS adalah bagian dari *regional architecture* yang tengah dikembangkan di kawasan dengan ASEAN sebagai *driving force*. Oleh karena itu, pelaksanaan kerjasama dalam kerangka EAS akan dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang sudah ada di ASEAN.

Pertemuan pertama EAS diselenggarakan di Kuala Lumpur tahun 2005. Selanjutnya telah dilaksanakan beberapa kali pertemuan antar pejabat senior EAS selama tahun 2006 dan telah berhasil mengidentifikasi 17 isu sektoral yang potensial untuk dikembangkan dalam kerjasama EAS. Pada pertemuan pejabat senior EAS di Kuala Lumpur bulan Juli 2006, ditetapkan 5 prioritas dari 17 isu sektoral yakni energi, keuangan, pendidikan, *avian flu* dan *disaster management*.

Selanjutnya pada KTT ke-2 EAS telah dilaksanakan di Cebu, 15 Januari 2007 dan telah menghasilkan *Chairman Statement* yang merupakan kesimpulan pembahasan para Pemimpin EAS. KTT EAS ke-2 telah membahas isu-isu *Energy Security* sebagai bahasan utama. Selain itu, KTT ke-2 EAS juga membahas kerjasama pengentasan kemiskinan, pendidikan, kerjasama keuangan, *avian influenza*, mitigasi bencana alam, *Interfaith Initiative*, perkembangan

Doha Development Agenda dan Integrasi Regional serta membahas strategi KTT Asia Timur ke depan.

Dalam pertemuan tersebut telah ditandatangani *Cebu Declaration on East Asian Energy Security* yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Kesepakatan mengembangkan *renewable and alternative energy*, pengembangan efisiensi dan konservasi energi serta mengurangi dampak penggunaan energi terhadap perubahan iklim;
- b. Mendorong pengembangan pasar yang terbuka dan kompetitif di tingkat regional dan internasional guna menjamin ketersediaan energi yang terjangkau secara ekonomis termasuk mengembangkan *biofuels*, mendorong peningkatan perdagangan yang lebih terbuka serta menetapkan standar penggunaan *biofuels* untuk kendaraan bermotor; dan
- c. Menyepakati kerjasama riset dan pengembangan teknologi *biofuels*, teknologi batu bara bersih (*clean coal*) termasuk mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan pengembangan energi serta menjamin ketersediaan energi melalui peningkatan investasi pengembangan infrastruktur jaringan listrik dan pipa gas ASEAN serta menjajagi kemungkinan mengadakan "*strategic fuel stockpiling*".

Dalam bidang kerjasama keuangan, pada pertemuan EAS ke-2 para pemimpin sepakat menugaskan pejabat tingginya untuk mengembangkan usulan memperkuat mekanisme regional bidang keuangan guna mencegah dan mengatasi krisis keuangan. EAS ke-2 juga mendengarkan usulan Jepang mengenai "*Fueling Asia-Japan's Cooperation Initiative for Clean Energy and Sustainable Growth*" yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan konservasi energi, pengembangan energi biomas, pengembangan energi batu bara bersih serta mengatasi kemiskinan energi.

F. PIAGAM ASEAN

Proses penyusunan *draft* Piagam ASEAN diawali dengan pembentukan *Eminent Persons Group* (EPG) *on ASEAN Charter* yang beranggotakan para tokoh terkemuka dari seluruh negara anggota dan diketuai oleh Tun Musa Hitam (EPG-Malaysia). Pembentukan EPG ini diresmikan pada KTT ke-11 ASEAN di Kuala Lumpur, Desember 2005, dengan ditandatanganinya *Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of the ASEAN Charter*. Wakil Indonesia dalam EPG adalah Mantan Menteri Luar Negeri RI, Ali Alatas. EPG bertugas untuk memberikan masukan-masukan dan rekomendasi terhadap proses penyusunan *draft* Piagam ASEAN. Selama masa kerjanya tahun 2006, EPG telah melakukan 8 kali pertemuan yang antara lain juga melakukan dialog dengan Kepala Negara/Pemerintahan, Sektor Bisnis, Parlemen, dan *Civil Society Organizations*. Melalui pertemuan-pertemuan ini, telah diperoleh masukan dan saran mengenai bagaimana Piagam ASEAN disusun.

EPG merekomendasi hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Menegaskan agar Piagam ASEAN memuat kejelasan mekanisme dan struktur ASEAN yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat di dalam berbagai kegiatan kerjasama ASEAN (*people-centered organization*); dan
3. Memperkuat pembangunan Komunitas ASEAN.

Pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, Januari 2007, telah ditandatangani *Cebu Declaration on the Blueprint of the ASEAN Charter* yang berisi kesepakatan untuk menyusun suatu Piagam ASEAN berdasarkan rekomendasi EPG. Para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN telah memberikan arahan mengenai penyusunan *Charter* serta membentuk suatu *High Level Task Force* (HLTF) *on the drafting of ASEAN Charter* yang beranggotakan para pejabat tinggi dari negara-negara anggota. Dalam hal ini, Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN.

Sesuai mandatnya, para Anggota HLTF ditugaskan untuk menyelesaikan penyusunan *draft* ASEAN *Charter* sebelum KTT ke-13 ASEAN di Singapura, Nopember 2007.



Pertemuan Pertama kali para Pemimpin ASEAN-10 pada saat KTT Informal ke-3 ASEAN di Manila, Filipina, 27 – 28 Nopember 1999

BAB III
INDONESIA DAN ASEAN MENUJU
KOMUNITAS ASEAN 2015

A. PERAN INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN KOMUNITAS ASEAN

ASEAN merupakan soko guru politik luar negeri Indonesia karena negara-negara ASEAN merupakan lingkaran terdalam dari lingkaran-lingkaran konsentris pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Pendekatan lingkaran-lingkaran konsentris menegaskan besarnya pengaruh lingkungan eksternal terdekat terhadap situasi domestik Indonesia. Oleh karena itu, terciptanya kawasan Asia Tenggara yang stabil, aman, damai dan kondusif, serta terjalinnya hubungan harmonis dengan negara-negara di Asia Tenggara dirasakan sangat penting dan merupakan modal dasar pembangunan nasional Indonesia.

Indonesia berkeinginan dan berkeyakinan bahwa Asia Tenggara dapat berkembang menjadi kawasan regional yang mandiri dan damai. Hal ini sejalan dengan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menggariskan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu melindungi kepentingan bangsa dan negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut menjaga perdamaian dan ketertiban dunia.

Mengingat Indonesia menempatkan ASEAN sebagai lingkungan utama dari politik luar negerinya, Indonesia telah memainkan peran penting dalam perkembangan ASEAN. Peran penting tersebut, terutama terlihat dari peran Indonesia dalam penentuan arah perkembangan ASEAN.

Dalam pembentukan Komunitas ASEAN, Indonesia memainkan peran utama (*leading role*) sebagai salah satu perumus Komunitas ASEAN dan penggagas konsep Komunitas Keamanan ASEAN. ASEAN yang dulunya asosiasi bersifat longgar kini sedang beralih

menjadi organisasi yang lebih terarah dan terintegrasi. Selain itu, Indonesia juga memainkan peran aktifnya pada saat menjadi Ketua Panitia Tetap (Pantap) ASEAN tahun 2003 yang menghasilkan pembentukan Komunitas ASEAN pada KTT ke-9 ASEAN di Bali.

Sebagai penggagas dan perumus Komunitas ASEAN, Indonesia perlu memastikan bahwa rencana kegiatan yang mendorong terwujudnya Komunitas ASEAN dapat terealisasi. Dalam menindaklanjuti konsep Komunitas ASEAN, Indonesia terus memainkan peran aktifnya dalam implementasi *Plan of Action* (PoA) dan *Vientiane Action Programme* (VAP) yang dihasilkan dalam KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Laos tahun 2004.

Departemen Luar Negeri sebagai *focal point* dalam kerjasama ASEAN saat ini tengah berupaya keras untuk menumbuhkan dan memperkuat "rasa kekitaan" (*we feeling*) di kalangan masyarakat Indonesia. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosialisasi mengenai ASEAN dan perkembangan menuju Komunitas ASEAN melalui penyelenggaraan seminar, *roundtable discussion*, dialog interaktif, *workshop*, festival film ASEAN, dan lain-lain. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, diharapkan masyarakat Indonesia dapat lebih mengenal ASEAN dan merasakan manfaat, serta mempunyai rasa memiliki dari pembentukan Komunitas ASEAN.

B. PEMBENTUKAN KOMUNITAS ASEAN 2015

Percepatan pembentukan Komunitas ASEAN dari 2020 menjadi 2015, sebagaimana disepakati para Kepala Negara ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN, memberikan tantangan tersendiri bagi ASEAN untuk mewujudkannya. Percepatan Komunitas ASEAN juga menyimpan tantangan bagi ASEAN untuk dapat menjaga keseimbangan pencapaian dari ketiga pilarnya agar saling mendukung dan berjalan secara bersama-sama sebagaimana diamanatkan dalam Bali Concord II.

1. Komunitas Keamanan ASEAN

Sejak berdirinya ASEAN, organisasi ini telah memutuskan untuk bekerjasama secara komprehensif di bidang keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam perkembangannya, kerjasama ASEAN lebih banyak dilakukan di bidang ekonomi,

sementara kerjasama di bidang politik-keamanan masih belum maksimal akibat adanya persepsi ancaman yang berbeda-beda dan penerapan prinsip-prinsip *non-interference* serta *sovereign equality* oleh negara-negara anggota ASEAN.

Komunitas Keamanan ASEAN merupakan sebuah pilar yang fundamental dari komitmen ASEAN dalam mewujudkan Komunitas ASEAN. Pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN akan memperkuat ketahanan kawasan dan mendukung penyelesaian konflik secara damai. Terciptanya perdamaian dan stabilitas di kawasan akan menjadi modal bagi proses pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat ASEAN. Sebagaimana ditegaskan dalam VAP, Komunitas Keamanan ASEAN menganut prinsip keamanan komprehensif yang mengakui saling keterkaitan antar aspek-aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Komunitas Keamanan ASEAN memberikan mekanisme pencegahan dan penanganan konflik secara damai. Hal ini dilakukan antara lain melalui konsultasi bersama untuk membahas masalah-masalah politik-keamanan kawasan seperti keamanan maritim, perluasan kerjasama pertahanan, serta masalah-masalah keamanan non-tradisional (kejahatan lintas negara, kerusakan lingkungan hidup dan lain-lain). Dengan derajat kematangan yang ada, ASEAN diharapkan tidak lagi menyembunyikan masalah-masalah dalam negeri yang berdampak pada stabilitas kawasan dengan berlindung pada prinsip-prinsip *non-interference*.

Pencapaian Komunitas Keamanan ASEAN melalui Rencana Aksi yang termuat dalam *Vientiane Action Programme* (VAP) diwujudkan melalui sejumlah komponen yang terdiri dari *political development, sharing and shaping of norms, conflict prevention, conflict resolution*, dan *post-conflict peace building*.

Implementasi Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN, di dalam komponen "*shaping and sharing of norms*" ditandai terutama dengan upaya perumusan Piagam ASEAN. Sesuai dengan *Cebu Declaration on the Blueprint of the ASEAN Charter* yang disahkan pada KTT ke-12 ASEAN, penyusunan Piagam

ASEAN dilakukan oleh *High Level Task Force on the Drafting of ASEAN Charter* (HLTF) dan ditargetkan untuk diselesaikan sebelum KTT ke-13 ASEAN di Singapura, bulan Nopember 2007.

Piagam ASEAN akan mengubah ASEAN sebagai suatu *rule based organization*. Hal ini dibutuhkan mengingat selama ini, karakter ASEAN sebagai sebuah asosiasi yang bersifat longgar tidak lagi dirasakan cukup mengakomodasi potensi kerjasama dan menanggapi tantangan integrasi kawasan dan globalisasi.

Piagam ASEAN memiliki arti penting terkait dengan kedudukan ASEAN terhadap pihak ketiga. Sejauh ini hanya Indonesia yang mengakui ASEAN sebagai suatu entitas hukum (*legal entity*), itupun sebatas pada Sekretariat ASEAN melalui Keputusan Presiden No. 17/1976 yang meratifikasi *Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat of 24 February 1976* dan Keppres No. 9/1979 yang meratifikasi *Agreement between the Government of Indonesia and ASEAN Relating to the Privileges and Immunities of the ASEAN Secretariat of 20 January 1979* serta *Agreement on the Use and Maintenance of the Premises of the ASEAN Secretariat of 25 November 1981*.

Hal ini disebabkan karena pendirian ASEAN hanya berdasarkan sebuah deklarasi yang kedudukannya dalam hukum internasional dianggap tidak mengikat. Sebagai konsekuensi, terdapat suatu kendala bagi ASEAN untuk dapat mengikat diri secara hukum dalam perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Dalam hal ini, Piagam ASEAN dapat memberikan *legal personality* yang dibutuhkan untuk menjadikan ASEAN sebagai entitas hukum yang diakui.

Piagam ASEAN akan merefleksikan perwujudan Komunitas ASEAN yang tidak berupa lembaga supra nasional seperti Uni Eropa. Piagam ASEAN tidak dimaksudkan untuk menjadi landasan pembentukan suatu pakta pertahanan, aliansi militer ataupun kebijakan luar negeri bersama. ASEAN berkomitmen untuk menghasilkan suatu Piagam yang *bold* dan *visioner* serta mampu mengakomodasi kepentingan perwujudan Komunitas ASEAN dengan ketiga pilarnya.

Terselenggaranya *ASEAN Defence Ministers' Meeting* (ADMM) merupakan capaian dari komponen "*conflict prevention*" Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN. ADMM memberikan peluang bagi pengembangan kerjasama keamanan di kawasan tanpa membentuk sebuah pakta pertahanan atau aliansi militer.

Dalam komponen "*conflict prevention*" Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN, implementasi kerjasama di bidang pemberantasan kejahatan lintas negara diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan (*doable*). Di bidang kerjasama pemberantasan terorisme, berbagai langkah-langkah dilakukan untuk memberdayakan kelompok-kelompok moderat terutama melalui peningkatan pemahaman dan pemeliharaan keserasian di antara umat beragama/kepercayaan di kawasan. Keberhasilan Indonesia dalam mengungkap kasus-kasus terorisme merupakan raihan penting dari kerjasama yang telah terjalin selama ini. Untuk itu, Indonesia terus berupaya meningkatkan kerjasama dimaksud.

Indonesia sebagai *Lead-Shepherd* di bidang pemberantasan terorisme di ASEAN telah memprakarsai penandatanganan *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT). Selama ini kerjasama ASEAN di bidang pemberantasan terorisme, baik antar negara anggota ASEAN maupun dengan negara Mitra Wicara, didasarkan atas *declaration* dan *plan of action* yang secara hukum tidak mengikat. ACCT memberikan dasar hukum bagi kerjasama ASEAN di bidang pemberantasan terorisme. Hal ini juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas kerjasama di bidang pemberantasan terorisme dengan Mitra Wicara ASEAN. Selain itu, ACCT secara substantif bersifat komprehensif.

Capaian lain dari komponen "*shaping and sharing of norms*" Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN adalah penandatanganan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLAT). Traktat ini memberikan peluang untuk mendukung kerjasama hukum yang lebih konkrit, terutama dalam pemberian bantuan hukum timbal balik diantara para Pihak di bidang pidana.

Terkait dengan ACCT dan MLAT, ASEAN perlu untuk segera menindaklanjuti penandatanganan kedua perjanjian dimaksud serta mulai mengimplementasikan bidang-bidang kerjasama di dalamnya.

Tantangan ke depan bagi ASEAN dalam implementasi komponen *"shaping and sharing of norms"* dari Komunitas Keamanan ASEAN, antara lain adalah perumusan sebuah traktat ekstradisi ASEAN (*ASEAN extradition treaty*) yang juga telah diamanatkan dalam Bali *Concord* 1976. Dalam hal ini, para pejabat tinggi ASEAN di bidang hukum (ASLOM) dalam pertemuannya yang ke-11 di Siem Reap, Kamboja, bulan Januari 2007 telah menyepakati pembentukan kelompok kerja (*working group*) untuk memulai proses perumusan traktat dimaksud.

Walau beberapa target capaian dalam komponen *"conflict prevention"* dan *"shaping and sharing of norms"* telah diraih, ASEAN perlu untuk mendorong pencapaian komponen-komponen Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN lainnya, terutama dalam komponen *"political development"* (antara lain terkait dengan *good governance*, *combatting corruption* dan promosi dan perlindungan HAM), *"conflict resolution"*, dan *"post-conflict peace building"*. Hal ini telah dicermati dalam ASEAN *Security Community Coordinating Conference* (ASCCO) ke-1 di Jakarta, bulan September 2006.

2. Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC)

Kerjasama ekonomi ASEAN dimulai dengan disahkannya Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Dalam perkembangannya, kerjasama ekonomi ASEAN mengarah kepada pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN yang pelaksanaannya berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik-keamanan dan sosial budaya.

KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 menghasilkan Bali Concord II yang menegaskan bahwa AEC diarahkan kepada pembentukan sebuah integrasi ekonomi kawasan. Pembentukan

AEC akan menciptakan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi. AEC akan menciptakan bebasnya arus barang, jasa, investasi dan aliran modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang setara serta dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2020. AEC akan menjadikan ASEAN sebagai suatu pasar tunggal dan basis produksi, mengubah keanekaragaman yang menjadi karakter kawasan, menjadi peluang bisnis yang saling melengkapi serta membuat ASEAN menjadi lebih dinamis dan menjadi segmen yang lebih kuat sebagai bagian dari rantai pasok global (*global supply chain*).

Pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu bulan Januari 2007, para Pemimpin ASEAN menyatakan komitmen kuat mereka untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 2015 dan menyetujui untuk mempercepat pembentukan AEC menjadi tahun 2015, serta menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang ditandai dengan kebebasan arus barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal yang lebih bebas. Pembentukan AEC juga akan menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang mempunyai daya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata dan terintegrasi dalam ekonomi global.

Pembentukan AEC akan memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperluas cakupan skala ekonomi, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, meningkatkan daya tarik sebagai tujuan bagi investor dan wisatawan, mengurangi biaya transaksi perdagangan, memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis, serta meningkatkan daya saing sektor UKM. Disamping itu, pembentukan AEC juga akan memberikan kemudahan dan peningkatan akses pasar intra-ASEAN serta meningkatkan transparansi dan mempercepat penyesuaian peraturan-peraturan dan standarisasi domestik.

Disisi lain, pembentukan AEC juga menimbulkan tantangan bagi Indonesia berupa keharusan untuk: meningkatkan pemahaman publik dalam negeri mengenai ASEAN terutama untuk kalangan bisnis; meningkatkan daya saing melalui peningkatan efisiensi dalam segala aspek;

menciptakan *good governance*; mampu menentukan prioritas sektor-sektor yang akan di liberalisasi serta menyelaraskan posisi Indonesia dalam berbagai negosiasi baik bilateral, regional maupun multilateral. Tantangan lain yang akan dihadapi Indonesia adalah keharusan untuk mampu melaksanakan dan menilai berbagai komitmen FTA yang telah disepakati, baik bilateral, regional maupun multilateral.

3. Komunitas Sosial-Budaya ASEAN 2015

Kerjasama di bidang sosial-budaya menjadi salah satu titik tolak utama untuk meningkatkan integrasi ASEAN melalui terciptanya "*a caring and sharing community*", yaitu sebuah masyarakat ASEAN yang saling peduli dan berbagi. Kerjasama sosial-budaya mencakup kerjasama di bidang kepemudaan, wanita, kepegawaian, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam, kesehatan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, dan ketenagakerjaan serta Yayasan ASEAN.

Dalam mewujudkan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN 2015, terdapat beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi, antara lain:

a. Koordinasi antar badan-badan sektoral ASEAN

Isu-isu sosial-budaya yang beragam dan bersifat lintas sektoral memerlukan suatu koordinasi yang efektif sehingga program badan-badan sektoral dapat terlaksana dengan baik. Sejak tahun 2006 telah diupayakan fungsi koordinasi yang lebih menyeluruh melalui penyelenggaraan *Social Coordinating Conference on ASEAN Socio-Cultural Community* (SOC-COM).

b. ASEAN awareness di kalangan masyarakat ASEAN

ASEAN perlu melakukan upaya untuk menumbuhkan ASEAN awareness dan rasa kepemilikan ASEAN oleh

masyarakatnya. Pencapaian Komunitas Sosial-Budaya ASEAN akan menunjang perwujudan Komunitas Keamanan ASEAN dan Komunitas Ekonomi ASEAN. Upaya peningkatan ASEAN awareness perlu dilaksanakan dengan:

- i. Menjadikan kalangan pemuda sebagai sasaran utama mengingat "rasa kekitaan" ASEAN (*we feeling*) harus ditumbuhkan sejak dini. Generasi muda akan mewarisi dan merasakan manfaat terbentuknya Komunitas Sosial Budaya ASEAN 2015.
- ii. Menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang berorientasi pada masyarakat (*people-centred organisation*), sehingga kegiatannya dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Selain itu, ASEAN perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

c. Kawasan ASEAN Bebas Narkoba 2015 (*A Drug Free ASEAN 2015*)

Pada akhir dekade 1990-an, para pemimpin ASEAN melihat adanya kecenderungan yang mengkhawatirkan dan bersifat jangka panjang mengenai bahaya peningkatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kawasan ASEAN. Sebagai upaya untuk menanggulangnya, pada tahun 2000 disepakati *Bangkok Declaration in Pursuit of Drug Free ASEAN*. Hal ini ditegaskan kembali dalam Rencana Aksi Komunitas Sosial Budaya pada *Vientiane Action Programme* (VAP), yaitu mewujudkan suatu kawasan ASEAN Bebas Narkoba 2015. Dalam kaitan ini, perlu dilakukan upaya bersama dalam menyelaraskan strategi dan langkah nasional di negara anggota ASEAN.

d. Penanggulangan bahaya wabah penyakit menular

Pada akhir dekade 1990-an, wabah penyakit SARS menjalar ke kawasan Asia Tenggara. Sementara sejak awal

tahun 2000-an kawasan Asia Tenggara juga dilanda wabah penyakit flu burung. Untuk itu, ASEAN perlu mengantisipasi terjadinya ancaman pandemi penyakit menular. Sebagai langkah preventif, ASEAN telah membangun *networking* dengan negara di luar kawasan dan organisasi internasional. Misalnya, dalam *stockpiling antiviral drugs and personnel protective equipment* di salah satu negara ASEAN. Selain itu, kekhawatiran terhadap meningkatnya penderita HIV/AIDS di kawasan telah mendorong para Pemimpin ASEAN untuk menyepakati ASEAN Commitment on HIV/AIDS.

e. Kesetaraan Gender, Pemajuan dan Perlindungan Wanita

Tantangan bagi kerjasama ASEAN di bidang wanita disebabkan oleh adanya perbedaan sistem politik dan kebijakan masing-masing negara anggota ASEAN. Oleh karenanya, dalam menghadapi tantangan ini, negara-negara anggota ASEAN perlu berupaya untuk membentuk persamaan persepsi dan prinsip-prinsip dasar dalam pemajuan kerjasama regional di bidang wanita. Sejauh ini, ASEAN telah memiliki 4 deklarasi terkait isu wanita yaitu: (i) *Declaration on the Advancement of Women in ASEAN*, 1988; (ii) *Declaration on HIV and AIDS*, 2001; (iii) *Declaration against Trafficking in Persons Particularly Women and Children*, 2004; dan (iv) *Declaration on the Elimination of Violence against Women* (DEVAW), tahun 2004. Selain itu juga telah tersusun *Work Plan on Women's Advancement and Gender Equality (2005-2010)* serta *Work Plan to Operationalize the Declaration on the Elimination of Violence against Women in ASEAN*.

C. HUBUNGAN EKSTERNAL ASEAN

Saat ini ASEAN memiliki 11 Mitra Wicara penuh dan 1 Mitra Wicara sektoral. Selain itu, ASEAN juga memiliki hubungan/dialog terbatas dengan beberapa organisasi regional dan internasional.

Dalam perkembangannya, hubungan eksternal ASEAN juga mengalami perluasan yang ditandai dengan terbentuknya mekanisme kerjasama baru yaitu *East Asia Summit* (EAS). ASEAN sebagai organisasi regional yang dinamis telah menarik banyak negara untuk menjadi Mitra Wicara penuh ataupun sektoral.

Keberadaan Mitra Wicara ikut berperan penting dalam proses pembangunan kawasan ASEAN yang diharapkan dapat terbentuk menjadi sebuah komunitas yang solid pada 2015. Menyikapi hal tersebut, ASEAN terus berupaya mengelola keberadaan Mitra Wicaranya agar dapat secara maksimal berpartisipasi aktif membantu tercapainya pembentukan komunitas tersebut. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip dasar kerjasama eksternal ASEAN yaitu kerjasama ASEAN harus dapat meningkatkan ketahanan regional ASEAN.

Dalam melaksanakan hubungan dengan Mitra Wicara, ASEAN menghadapi berbagai hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Bertambahnya pertemuan dengan Mitra Wicara

Peningkatan kerjasama ASEAN dengan negara Mitra Wicara berimplikasi pada bertambahnya jumlah pertemuan dari tingkat tinggi sampai tingkat kelompok kerja (*working group*). Pertambahan jumlah pertemuan menjadi kendala bagi ASEAN mengingat proses perampingan pertemuan (*streamlining ASEAN Meetings*) sedang diupayakan. Oleh karena itu, ASEAN harus tetap mempertahankan bobot kerjasama dengan Mitra Wicara melalui mekanisme pertemuan yang lebih efektif.

Sebagai langkah awal, saat ini ASEAN tengah berupaya menyederhanakan mekanisme pertemuan-pertemuannya khususnya pada level pertemuan tingkat tinggi. Hal ini juga akan berkembang ke tingkat pertemuan yang lebih rendah.

2. Sentralitas ASEAN

Salah satu prinsip kerjasama ASEAN dengan Mitra Wicara adalah terjaganya sentralitas ASEAN, sehingga ASEAN dapat berperan sebagai *prime mover* dalam hubungannya dengan Mitra

Wicara. Implementasi kerjasama dengan Mitra Wicara hendaknya menempatkan kepentingan ASEAN sebagai prioritas. Selain itu, proyek yang disepakati hendaknya dapat dilaksanakan di negara anggota ASEAN. Pada saat ini, proyek-proyek kerjasama ASEAN dengan Mitra Wicara lebih banyak merupakan inisiatif negara Mitra Wicara serta dilaksanakan di negara Mitra Wicara tersebut.

Tantangan untuk menjaga prinsip sentralitas ASEAN akan semakin penting seiring berkembangnya arsitektur kerjasama di Asia Timur melalui proses EAS.

3. Pendanaan Proyek Kerjasama ASEAN dengan Mitra Wicara

Guna memperkuat posisi ASEAN sebagai *prime mover* dalam kerjasama pembangunan, ASEAN perlu lebih mandiri dalam pendanaan proyek-proyek kerjasama. Upaya ASEAN untuk mengatasi hal ini, adalah dengan mendirikan ASEAN *Development Fund*. Kemandirian ASEAN untuk mendanai proyek kerjasama dengan negara Mitra Wicara juga diperlukan untuk mengantisipasi kecenderungan semakin berkurangnya bantuan pembangunan (*Official Development Assistance*) dari negara Mitra Wicara.

4. Akses Negara-negara Mitra Wicara ke dalam TAC

TAC merupakan instrumen utama guna melibatkan negara Mitra Wicara untuk berpartisipasi dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan. ASEAN perlu mendorong negara Mitra Wicara, Amerika Serikat dan Kanada, untuk mengakses TAC sebagai bentuk dukungan politis terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan.

5. Tantangan FTA dengan Mitra Wicara

Dengan terbentuknya Komunitas ASEAN pada 2015, maka secara ekonomi ASEAN akan menjadi sebuah pasar yang besar dan menjanjikan. Hal ini menjadi peluang bagi pengembangan kerjasama bidang ekonomi antara ASEAN dan negara Mitra

Wicara. Dalam membentuk kesepakatan pasar bebas dengan negara-negara Mitra Wicara, ASEAN masih harus menempuh proses negosiasi yang panjang. Hal tersebut antara lain disebabkan sulitnya menentukan *Rules of Origin (RoO)* atau adanya kondisionalitas yang diterapkan oleh negara-negara Mitra Wicara.

6. Perbedaan Prioritas Kerjasama Antara ASEAN dengan Negara Mitra Wicara

Dalam berbagai proyek kerjasama pembangunan antara ASEAN dan negara Mitra Wicara, masih terlihat adanya perbedaan prioritas. Untuk itu, ASEAN perlu lebih mendorong pencapaian *mutual benefit*. ASEAN juga perlu untuk menjaga agar proyek kerjasama pembangunan dengan negara Mitra Wicara tetap relevan dengan VAP.



Pertemuan Tingkat Menteri (AMM) ke-39 di Kuala Lumpur, Malaysia, Juli 2006

BAB IV

KESIMPULAN

Politik luar negeri Indonesia (polugri) menerapkan pendekatan strategis lingkaran-lingkaran konsentrik yang menegaskan kedekatan geografis dan lingkup pengaruh lingkungan eksternal dapat memberikan dampak terhadap Indonesia. Pendekatan strategis lingkaran-lingkaran konsentris tersebut menentukan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan polugri terutama jika dikaitkan dengan isu-isu utama global.

Asia Tenggara merupakan lingkaran konsentris pertama kawasan terdekat Indonesia. Sejak semula Indonesia telah menetapkan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) sebagai soko guru atau pilar utama dalam pelaksanaan politik luar negerinya. Kawasan Asia Tenggara yang stabil, aman, damai dan kondusif merupakan modal dasar yang penting untuk pembangunan nasional Indonesia.

Pembentukan ASEAN merupakan wujud nyata kerjasama regional negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN telah mengalami perkembangan pesat dan tengah berubah dari sebuah perhimpunan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang longgar menjadi suatu organisasi yang lebih terstruktur, terintegrasi menuju perwujudan komunitas tunggal. Perkembangan ini telah menandai makin solidnya jalinan kerjasama antar anggota untuk menciptakan cara pandang dan visi yang sama.

Pada Visi ASEAN 2020, yang disepakati di Kuala Lumpur tahun 1997, disebutkan mengenai cita-cita ASEAN untuk menjadi suatu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020. Visi ini lebih ditegaskan melalui *Bali Concord II* yang dihasilkan pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yang menyepakati pembentukan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*).

Pembentukan Komunitas ASEAN merupakan upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasinya dalam menghadapi

perkembangan konstelasi politik internasional. Selain itu, juga merupakan upaya ASEAN untuk menyesuaikan cara pandang agar dapat lebih terbuka dalam membahas permasalahan domestik yang berdampak kepada kawasan.

Pencapaian Komunitas ASEAN semakin kuat dengan ditandatanganinya "*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*" oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, 13 Januari 2007. Dengan ditandatanganinya Deklarasi ini, para Pemimpin ASEAN menyepakati percepatan pembentukan Komunitas ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 2015.

Melalui tiga pilar kerjasama Komunitas ASEAN, ASEAN bertekad untuk lebih menyeimbangkan pemajuan kerjasama ASEAN di bidang politik-keamanan, ekonomi dan sosial budaya. Integrasi yang lebih erat di bidang politik, ekonomi dan sosial-budaya diharapkan akan membentuk suatu Komunitas ASEAN yang memberikan manfaat pada meningkatnya kepercayaan dan kenyamanan diantara negara-negara anggota dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat ASEAN dan daya saing kawasan.

Pada masa awal berdirinya ASEAN, kerjasama politik-keamanan dirasakan belum maksimal karena cenderung dinilai sebagai hal yang sensitif dan keterpakuan ASEAN kepada prinsip non-intervensi yang dianut secara kaku. Perkembangan konstelasi politik global, khususnya saling keterkaitan antar permasalahan domestik dan internasional, telah mendorong perlunya kerjasama internasional yang lebih erat. Dalam hal ini, penancangan Komunitas Keamanan ASEAN menandai kemajuan ASEAN di bidang kerjasama politik-keamanan.

Perwujudan Komunitas Keamanan ASEAN didasarkan pada prinsip *non-intervention*, konsensus, *national and regional resilience*, kedaulatan, pencegahan penggunaan senjata dalam situasi konflik dan *peaceful settlement of disputes*. Prinsip-prinsip ini juga dianut dalam *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) dan penyelesaian konflik yang akan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas kawasan diarahkan pada penyelesaian secara politis. TAC merupakan kunci *code of conduct* hubungan antar negara dan berfungsi sebagai

instrumen diplomatik dalam mempertahankan perdamaian dan stabilitas kawasan. Akses negara-negara diluar ASEAN khususnya negara-negara besar di kawasan Asia telah membuktikan penghargaan atas meningkatnya peran ASEAN di kawasan.

Sebagai negara pemrakarsa Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN, Indonesia memberi perhatian besar pada implementasi butir-butir yang dimuat dalam Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN. Komponen Rencana Aksi tersebut terdiri atas komponen-komponen *political development, shaping and sharing of norms, conflict prevention, post conflict peace building*, dan memuat acuan bagi pembangunan ketahanan kawasan serta pengembangan mekanisme penyelesaian konflik secara damai.

Implementasi dua komponen Rencana Aksi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dilakukan pada komponen *conflict prevention* dan *shaping and sharing of norms*. Komponen *shaping and sharing of norms* ditandai oleh penyusunan Piagam ASEAN yang ditargetkan selesai sebelum KTT ke-13 ASEAN di Singapura, Nopember 2007. Selain itu, *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLAT) yang telah ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN memberikan peluang untuk mendukung kerjasama hukum yang lebih konkrit, terutama dalam pemberian bantuan hukum timbal balik di bidang pidana.

Komponen *conflict prevention* antara lain ditandai oleh keberhasilan ASEAN menyelenggarakan ASEAN *Defence Ministers' Meeting* (ADMM) di tahun 2006 dan menghasilkan ASEAN *Convention on Counter Terrorism* (ACCT) yang menyediakan dasar hukum bagi kerjasama kawasan di bidang pemberantasan terorisme. Pencapaian komponen-komponen ini dilakukan secara gradual dan ditujukan untuk menciptakan kawasan ASEAN yang sehat secara politis dan didasarkan oleh "*sovereign comfort level*".

Sejalan dengan kemajuan yang telah dicapai pada isu-isu politik dan keamanan, partisipasi ASEAN dalam penciptaan perdamaian dan kestabilan di kawasan Asia Pasifik dilakukan terutama melalui proses ASEAN *Regional Forum* (ARF) yang pembentukannya diprakarsai oleh ASEAN. ARF sebagai satu-satunya forum dialog keamanan di

Asia Pasifik membantu meningkatkan profil negara-negara anggota ASEAN kepada *major powers* dan memberikan ruang bagi ASEAN untuk berperan dalam upaya perdamaian dan stabilitas kawasan.

Menyangkut perkembangan Komunitas Ekonomi ASEAN, pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu bulan Januari 2007 ditetapkan pula untuk mempercepat pembentukan AEC dari tahun 2020 menjadi 2015 serta penyusunan "Cetak Biru" ASEAN *Economic Community* (AEC)". Cetak Biru AEC tersebut berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN.

Tujuan AEC seperti yang digariskan dalam Visi ASEAN 2020, yaitu menciptakan sebuah kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan kompetitif, yang dibarengi dengan terdapatnya kebebasan arus barang, jasa, investasi dan pekerja terampil serta arus modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang sederhana dan pengurangan tingkat kemiskinan serta perbedaan tingkat sosial ekonomi. Pembentukan AEC akan menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang mempunyai daya saing tinggi dan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta terintegrasi dalam ekonomi global. Selain itu, pembentukan AEC juga disepakati atas dasar kesamaan kepentingan untuk memperdalam dan memperluas upaya-upaya ekonomi melalui inisiatif-inisiatif yang ada maupun inisiatif-inisiatif baru dengan tenggat waktu yang jelas.

Pembentukan AEC dapat memberikan peluang dan tantangan bagi Indonesia. Peluang tersebut antara lain berupa cakupan skala ekonomi yang lebih luas, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, meningkatkan daya tarik sebagai tujuan bagi investor dan wisatawan, mengurangi biaya transaksi perdagangan, memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis, serta meningkatkan daya saing sektor UKM. Disamping itu, pembentukan AEC juga akan memberikan kemudahan dan peningkatan akses pasar intra-ASEAN, meningkatkan transparansi dan mempercepat penyesuaian peraturan-peraturan serta standarisasi domestik.

Adapun tantangan bagi Indonesia antara lain adalah perlunya upaya untuk lebih meningkatkan pemahaman publik dalam negeri

mengenai ASEAN terutama untuk kalangan bisnis, daya saing dan efisiensi dalam segala aspek, menciptakan *good governance*, menentukan prioritas sektor-sektor untuk liberalisasi serta menyelaraskan posisi Indonesia dalam berbagai negosiasi baik bilateral, regional maupun multilateral. Selain itu, Indonesia juga harus mampu melaksanakan dan menilai berbagai komitmen FTA yang telah disepakati, baik bilateral, regional maupun multilateral.

Dengan demikian, diharapkan Indonesia akan dapat menarik manfaat dari integrasi ekonomi kawasan yang berdaya saing tinggi dan terintegrasi dalam ekonomi global, sehingga pada gilirannya akan memberikan manfaat ekonomi secara luas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun mengenai Komunitas Sosial Budaya, pembentukannya mendapatkan momentum penting melalui penyelenggaraan "*Coordinating Conference on the ASEAN Socio Cultural Community*" (SOC-COM) pada tahun 2006, yang diikuti Pertemuan ke-2 pada tahun 2007. SOC-COM berfungsi untuk mengkoordinasikan langkah-langkah yang perlu dilakukan badan-badan sektoral dalam rangka pembentukan Komunitas Sosial Budaya ASEAN.

Para Pemimpin ASEAN telah memberikan penekanan penting pada pilar Sosial Budaya pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu tahun 2007, dengan dihasilkannya "*Cebu Declaration One Caring and Sharing Community*". Dalam dokumen tersebut secara jelas disebutkan agar Badan-badan Sektoral ASEAN mempercepat kerjasama ASEAN di bawah pilar Komunitas Sosial Budaya melalui konsultasi yang lebih intensif dan penciptaan sinergi dalam mewujudkan sasaran-sasaran Komunitas Sosial Budaya, penetapan tahapan jangka waktu pencapaian (*time line*) yang jelas.

A *Caring and Sharing Community* secara jelas memaparkan langkah dan capaian yang harus dilakukan dalam waktu mendatang yaitu membangun identitas regional yang lebih kuat; pelaksanaan ASEAN *Strategic Framework for Social, Welfare and Family* (2007-2010); pembuatan instrumen guna melindungi hak-hak pekerja migran; percepatan implementasi ASEAN *Framework on Rural*

Development and Poverty Eradication (2006-2010); dan perhatian terhadap penanganan masalah lingkungan; penanggulangan bahaya penyakit menular.

Perkembangan kerjasama ASEAN juga semakin meningkat dalam kaitannya dengan negara maupun organisasi internasional yang menjadi Mitra Wicara ASEAN. Kegiatan puncak yang dilaksanakan dengan Mitra Wicara adalah ASEAN-China *Commemorative Summit* di Nanning, China, pada tanggal 30-31 Oktober 2006 yang menghasilkan *Joint Statement of ASEAN-China Commemorative Summit: Towards an Enhanced ASEAN-China Cooperation*. Deklarasi ini telah memuat arah bagi perkembangan kerjasama ASEAN-China di bidang politik-keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya untuk 15 tahun ke depan.

Peningkatan kerjasama juga terjadi dalam hubungan ASEAN-Kanada dengan dihasilkannya kesepakatan “ASEAN-Canada *Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism*”. Selain itu, telah pula disahkan 2005-2007 ASEAN-Canada *Joint Cooperation Work Plan* sebagai pedoman kerjasama ASEAN dan Kanada di bidang politik-keamanan, dan kerjasama pembangunan. Kedua dokumen penting ini menjadi hasil akhir pertemuan PMC ASEAN-Kanada di Kuala Lumpur, 27 Juli 2006.

Selain itu, perkembangan kerjasama ASEAN dan Selandia Baru telah ditandai dengan kesepakatan “ASEAN-New Zealand *Framework for Cooperation 2006-2010*” di Kuala Lumpur, 27 Juli 2006. Dokumen ini memberikan arah kerjasama di bidang ekonomi, politik-keamanan, pendidikan, *people-to-people contact* dan kontak budaya.

Sementara itu, kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat telah menunjukkan kemajuannya di tahun 2006 dengan ditandatanganinya *Framework Document for the Plan of Action to Implement the ASEAN-US Enhanced Partnership*. Dokumen ini menjadi cetak biru kerjasama ASEAN-Amerika Serikat selama lima tahun ke depan. Untuk lebih memberikan penekanan prioritas kerjasamanya, telah disepakati *Joint Press Statement on Follow-Up to the ASEAN-US Enhanced Partnership*, pada tanggal 17 Nopember 2006. Di bidang ekonomi, ASEAN-Amerika Serikat juga telah menyepakati *Trade and*

Investment Framework Arrangement (TIFA).

Sebagai langkah tindak lanjut dari pertemuan *East Asia Summit*, telah disepakati 17 isu sektor kerjasama yang kemudian telah ditetapkan adanya 5 sektor prioritas yaitu energi, keuangan, pendidikan, *avian flu*, dan *disaster management*. Pada KTT ke-2 EAS, di Cebu tahun 2007, telah disepakati *Cebu Declaration on East Asian Energy Security*. Deklarasi ini memuat komitmen dan target kerjasama di bidang ketahanan energi.

Sejalan dengan perkembangan hubungan eksternal ASEAN tersebut, telah dilakukan peralihan posisi Indonesia sebagai koordinator kerjasama dengan Mitra Wicara. Pada bulan Juli 2006, Indonesia menyelesaikan tugasnya sebagai koordinator ASEAN-Uni Eropa periode 2003-2006. Capaian yang dihasilkan di akhir tugas Indonesia adalah *Final Evaluation Mission for ASEAN-EU Programme for Regional Integration Support* (APPRIS) *I for the period of 2003-2006*. Berkaitan dengan ini, Uni Eropa menyatakan dukungan terwujudnya ASEAN *Single Window* sebagai bentuk harmonisasi bea cukai dalam proses integrasi ASEAN.

Indonesia selanjutnya menjadi koordinator hubungan dialog ASEAN-India untuk periode 2006-2009. Selaku koordinator, Indonesia memprioritaskan pentingnya implementasi proyek-proyek kerjasama ASEAN-India. Secara khusus kerjasama ASEAN-India diarahkan pada upaya pengembangan kerjasama di bidang farmasi (obat generik dan obat tradisional), peningkatan kapasitas SDM dalam bidang bioteknologi dan manajemen, teknologi informatika dan komunikasi (ICT) serta pengembangan energi alternatif.



Pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, 12 – 13 Januari 2007

**THE ASEAN DECLARATION
(BANGKOK DECLARATION)
Bangkok, 8 August 1967**

The Presidium Minister for Political Affairs/Minister for Foreign Affairs of Indonesia, the Deputy Prime Minister of Malaysia, the Secretary of Foreign Affairs of the Philippines, the Minister of Foreign Affairs of Singapore and the Minister of Foreign Affairs of Thailand:

MINDFUL of the existence of mutual interests and common problems among countries of Southeast Asia and convinced of the need to strengthen further the existing bonds of regional solidarity and cooperation;

DESIRING to establish a firm foundation for common action to promote regional cooperation in Southeast Asia in the spirit of equality and partnership and thereby contribute towards peace, progress and prosperity in the region;

CONSCIOUS that in an increasingly interdependent world, the cherished ideals of peace, freedom, social justice and economic well-being are best attained by fostering good standing, good neighborliness and meaningful cooperation among the countries of the region already bound together by ties of history and culture;

CONSIDERING that the countries of Southeast Asia share a primary responsibility for strengthening the economic and social stability of the region and ensuring their peaceful and progressive national development, and that they are determined to ensure their stability and security from external interference in any form or manifestation in order to preserve their national identities in accordance with the ideals and aspirations of their peoples;

AFFIRMING that all foreign bases are temporary and remain only with the expressed concurrence of the countries concerned and are not intended to be used directly or indirectly to subvert the national independence and freedom of States in the area or prejudice the orderly processes of their national development;

DO HEREBY DECLARE:

FIRST, the establishment of an Association for Regional Cooperation among the countries of Southeast Asia to be known as the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

SECOND, that the aims and purposes of the Association, shall be:

1. To accelerate the economic growth, social progress and cultural development in the region through joint endeavours in the spirit of equality and partnership in order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community of Southeast Asian Nations;
2. To promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relationship among countries of the region and adherence to the principles of the United Nations Charter;
3. To promote active collaboration and mutual assistance on matters of common interest in the economic, social, cultural, technical, scientific and administrative fields;
4. To provide assistance to each other in the form of training and research facilities in the educational, professional, technical and administrative spheres;
5. To collaborate more effectively for the greater utilization of their agriculture and industries, the expansion of their trade, including the study of the problems of international commodity trade, the improvement of their transportation and communications facilities and raising of the living standards of their peoples;
6. To promote Southeast Asian studies;
7. To maintain close and beneficial cooperation with existing international and regional organizations with similar aims and purposes, and explore all avenues for even closer cooperation among themselves.

THIRD, that to carry out these aims and purposes, the following machinery shall be established:

- a) Annual Meeting of Foreign Ministers, which shall be by rotation and referred to as ASEAN Ministerial Meeting. Special Meetings of Foreign Ministers may be convened as required.

- b) A Standing Committee, under the chairmanship of the Foreign Minister of the host country or his representative and having as its members the accredited Ambassadors of the other Members the accredited Ambassadors of the other Member Countries, to carry on the work of the Association in between Meetings of Foreign Ministers.
- c) Ad-Hoc Committees and Permanent Committees of specialists and officials on specific subjects.
- d) A National Secretariat in each Member Country to carry out the work of the Association on behalf of that country and to service the Annual or Special Meetings of Foreign Ministers, the Standing Committee and such other committees as may hereafter be established.

FOURTH, that the Association is open for participation to all States in the Southeast Asian region subscribing to the aforementioned aims, principles and purposes.

FIFTH, that the Association represents the collective will of the nations of Southeast Asia to bind themselves together in friendship and cooperation and, through joint efforts and sacrifices, secure for their peoples and for posterity the blessings of peace, freedom and prosperity.

DONE, in Bangkok on the Eighth Day of August in the Year One Thousand Nine Hundred and Sixty-Seven.

(Signed)

For the Republic of Indonesia :

ADAM MALIK

Presidium Minister for Political Affairs/
Minister of Foreign Affairs

For Malaysia :

TUN ABDUL RAZAK BIN HUSSEIN

Deputy Prime Minister, Minister of Defence
and Minister of National Development

For the Republic of the Philippines :
NARCISO RAMOS
Secretary of Foreign Affairs

For the Republic of Singapore :
S. RAJARATNAM
Minister of Foreign Affairs

For the Kingdom of Thailand :
THANATKHOMAN
Minister of Foreign Affairs

Lampiran 2

**Declaration of ASEAN Concord
Indonesia, 24 February 1976**

The President of the Republic of Indonesia, the Prime Minister of Malaysia, the President of the Republic of the Philippines, the Prime Minister of the Republic of Singapore and the Prime Minister of the Kingdom of Thailand :

REAFFIRM their commitment to the Declarations of Bandung, Bangkok and Kuala Lumpur, and the Charter of the United Nations;

ENDEAVOUR to promote peace, progress, prosperity and the welfare of the peoples of member states;

UNDERTAKE to consolidate the achievements of ASEAN and expand ASEAN cooperation in the economic, social, cultural and political fields;

DO HEREBY DECLARE:

ASEAN cooperation shall take into account, among others, the following objectives and principles in the pursuit of political stability:

1. The stability of each member state and of the ASEAN region is an essential contribution to international peace and security. Each member state resolves to eliminate threats posed by subversion to its stability, thus strengthening national and ASEAN resilience.
2. Member states, individually and collectively, shall take active steps for the early establishment of the Zone of Peace, Freedom and Neutrality.
3. The elimination of poverty, hunger, disease and illiteracy is a primary concern of member states. They shall therefore intensify cooperation in economic and social development, with particular emphasis on the promotion of social justice and on the improvement of the living standards of their peoples.
4. Natural disasters and other major calamities can retard the pace of development of member states. They shall extend, within their capabilities, assistance for relief of member states in distress.
5. Member states shall take cooperative action in their national and regional development programmes, utilizing as far as possible the resources

available in the ASEAN region to broaden the complementarity of their respective economies.

6. Member states, in the spirit of ASEAN solidarity, shall rely exclusively on peaceful processes in the settlement of intra-regional differences.
7. Member states shall strive, individually and collectively, to create conditions conducive to the promotion of peaceful cooperation among the nations of Southeast Asia on the basis of mutual respect and mutual benefit.
8. Member states shall vigorously develop an awareness of regional identity and exert all efforts to create a strong ASEAN community, respected by all and respecting all nations on the basis of mutually advantageous relationships, and in accordance with the principles of selfdetermination, sovereign equality and non-interference in the internal affairs of nations.

AND DO HEREBY ADOPT

The following programme of action as a framework for ASEAN cooperation.

A. POLITICAL

1. Meeting of the Heads of Government of the member states as and when necessary.
2. Signing of the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia.
3. Settlement of intra-regional disputes by peaceful means as soon as possible.
4. Immediate consideration of initial steps towards recognition of and respect for the Zone of Peace, Freedom and Neutrality wherever possible.
5. Improvement of ASEAN machinery to strengthen political cooperation.
6. Study on how to develop judicial cooperation including the possibility of an ASEAN Extradition Treaty.

7. Strengthening of political solidarity by promoting the harmonization of views, coordinating position and, where possible and desirable, taking common actions.

B. ECONOMIC

1. Cooperation on Basic Commodities, particularly Food and Energy

- i) Member states shall assist each other by according priority to the supply of the individual country's needs in critical circumstances, and priority to the acquisition of exports from member states, in respect of basic commodities, particularly food and energy.
- ii) Member states shall also intensify cooperation in the production of basic commodities particularly food and energy in the individual member states of the region.

2. Industrial Cooperation

- i) Member states shall cooperate to establish large-scale ASEAN industrial plants particularly to meet regional requirements of essential commodities.
- ii) Priority shall be given to projects which utilize the available materials in the member states, contribute to the increase of food production, increase foreign exchange earnings or save foreign exchange and create employment.

3. Cooperation in Trade

- i) Member states shall cooperate in the fields of trade in order to promote development and growth of new production and trade and to improve the trade structures of individual states and among countries of ASEAN conducive to further development and to safeguard and increase their foreign exchange earnings and reserves.
- ii) Member states shall progress towards the establishment of preferential trading arrangements as a long term objective on a basis deemed to be at any particular time appropriate through rounds of negotiations subject to the unanimous agreement of member states.

- iii) The expansion of trade among member states shall be facilitated through cooperation on basic commodities, particularly in food and energy and through cooperation in ASEAN industrial projects.
- iv) Member states shall accelerate joint efforts to improve access to markets outside ASEAN for their raw material and finished products by seeking the elimination of all trade barriers in those markets, developing new usage for these products and in adopting common approaches and actions in dealing with regional groupings and individual economic powers.
- v) Such efforts shall also lead to cooperation in the field of technology and production methods in order to increase the production and to improve the quality of export products, as well as to develop new export products with a view to diversifying exports.

4. Joint Approach to International Commodity Problems and Other World Economic Problems

- i) The principle of ASEAN cooperation on trade shall also be reflected on a priority basis in joint approaches to international commodity problems and other world economic problems such as the reform of international trading system, the reform on international monetary system and transfer of real resources, in the United Nations and other relevant multilateral fora, with a view to contributing to the establishment of the New International Economic Order.
- ii) Member states shall give priority to the stabilisation and increase of export earnings of those commodities produced and exported by them through commodity agreements including bufferstock schemes and other means.

5 . Machinery for Economic Cooperation

Ministerial meetings on economic matters shall be held regularly or as deemed necessary in order to :

- i) formulate recommendations for the consideration of Governments of member states for the strengthening of ASEAN economic cooperation;
- ii) review the coordination and implementation of agreed ASEAN programmes and projects on economic cooperation;
- iii) exchange views and consult on national development plans and policies as a step towards harmonizing regional development; and
- iv) perform such other relevant functions as agreed upon by the member Governments.

C. SOCIAL

1. Cooperation in the field of social development, with emphasis on the well being of the low-income group and of the rural population, through the expansion of opportunities for productive employment with fair remuneration.
2. Support for the active involvement of all sectors and levels of the ASEAN communities, particularly the women and youth, in development efforts.
3. Intensification and expansion of existing cooperation in meeting the problems of population growth in the ASEAN region, and where possible, formulation of new strategies in collaboration with appropriate international agencies.
4. Intensification of cooperation among members states as well as with the relevant international bodies in the prevention and eradication of the abuse of narcotics and the illegal trafficking of drugs.

D. CULTURAL AND INFORMATION

1. Introduction of the study of ASEAN, its member states and their national languages as part of the curricula of schools and other institutions of learning in the member states.

2. Support of ASEAN scholars, writers, artists and mass media representatives to enable them to play an active role in fostering a sense of regional identity and fellowship.
3. Promotion of Southeast Asian studies through closer collaboration among national institutes.

E. SECURITY

Continuation of cooperation on a non-ASEAN basis between the member states in security matters in accordance with their mutual needs and interests.

F. IMPROVEMENT OF ASEAN MACHINERY

1. Signing of the Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat.
2. Regular review of the ASEAN organizational structure with a view to improving its effectiveness.
3. Study of the desirability of a new constitutional framework for ASEAN.

DONE, at Denpasar, Bali, this Twenty-Fourth Day of February in the year One Thousand Nine Hundred and Seventy-Six.

For the Republic
of Indonesia:
SOEHARTO
President

For the Republic
of Singapore:
LEE KUAN YEW
Prime Minister

For Malaysia:

DATUK HUSEIN ONN
Prime Minister

For the Kingdom
of Thailand:
KUKRIT PRAMOJ
Prime Minister

For the Republic
of the Philippines:
FERDINAND F. MARCOS

Lampiran 3

ASEAN VISION 2020 Kuala Lumpur, 15 December 1997

We, the Heads of State/Government of the Association of Southeast Asian Nations, gather today in Kuala Lumpur to reaffirm our commitment to the aims and purposes of the Association as set forth in the Bangkok Declaration of 8 August 1967, in particular to promote regional cooperation in Southeast Asia in the spirit of equality and partnership and thereby contribute towards peace, progress and prosperity in the region.

We in ASEAN have created a community of Southeast Asian Nations at peace with one another and at peace with the world, rapidly achieving prosperity for our peoples and steadily improving their lives. Our rich diversity has provided the strength and inspiration to us to help one another foster a strong sense of community.

We are now a market of round 500 million people with a combined gross domestic product of US\$600 billion. We have achieved considerable results in the economic field, such as high economic growth, stability and significant poverty alleviation over the past few years. Members have enjoyed substantial trade and investment flows from significant liberalization measures.

We resolve to build upon these achievements.

Now, as we approach the 21st century, thirty years after the birth of ASEAN, we gather to chart a vision for ASEAN on the basis of today's realities and prospects in the decades leading to the Years 2020.

That vision is of ASEAN as a concert of Southeast Asian Nations, outward looking, living in peace, stability and prosperity, bonded together in partnership in dynamic development and in a community of caring societies.

A Concert of Southeast Asian Nations

We envision the ASEAN region to be, in 2020, in full reality, a Zone of Peace, Freedom and Neutrality, as envisaged in the Kuala Lumpur Declaration of 1971.

ASEAN shall have, by the year 2020, established a peaceful and stable

Southeast Asia where each nation is at peace with itself and where the causes for conflict have been eliminated, through abiding respect for justice and the rule of law and through the strengthening of national and regional resilience.

We envision a Southeast Asia where territorial and other disputes are resolved by peaceful means.

We envision the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia functioning fully as a binding code of conduct for our governments and peoples, to which other states with interest in the region adhere.

We envision a Southeast Asia free from nuclear weapons, with all the Nuclear Weapon States committed to the purpose of the Southeast Asia Nuclear Weapons Free Zone Treaty through their adherence to its Protocol. We also envision our region free from all other weapons of mass destruction.

We envision our rich human and natural resources contributing to our development and shared prosperity.

We envision the ASEAN Regional Forum as an established means for confidence-building and preventive diplomacy and for promoting conflict-resolution.

We envision a Southeast Asia where our mountains, rivers and seas no longer divide us but link us together in friendship, cooperation and commerce.

We see ASEAN as an affective force for peace, justice and moderation in the Asia-Pacific and in the world.

A Partnership in Dynamic Development

We resolve to chart a new direction towards the year 2020 called, ASEAN 2020; Partnership in Dynamic Development which will forge closer economic integration within ASEAN.

We reiterate our resolve to enhance ASEAN economic cooperation through economic development strategies, which are in line with the aspiration of our respective peoples, which put emphasis on sustainable and equitable growth, and enhance national as well as regional resilience.

We pledge to sustain ASEAN's high economic performance by building upon the foundation of our existing cooperation efforts, consolidating our achievements, expanding our collective efforts and enhancing mutual assistance.

We commit ourselves to moving towards closer cohesion and economic integration, narrowing the gap in the level of development among Member Countries, ensuring that the multilateral trading system remains fair and open, and achieving global competitiveness.

We will create a stable, prosperous and highly competitive ASEAN Economic Region in which there is a free flow of goods, services and investments, a freer flow of capital, equitable economic development and reduced poverty and socio-economic disparities.

We resolve, inter-alia, to undertake the following:

- maintain regional macroeconomic and financial stability by promoting closer consultations in macroeconomic and financial policies.
- advance economic integration and cooperation by undertaking the following general strategies: fully implement the ASEAN Free Trade Area and accelerate liberalization of trade in services; realise the ASEAN Investment Area by 2010 and free flow of investments by 2020; intensify and expand sub-regional cooperation in existing and new sub-regional growth areas; further consolidate and expand extra-ASEAN regional linkages for mutual benefit; cooperate to strengthen the multilateral trading system; and reinforce the role of the business sector as the engine of growth.
- promote a modern and competitive small and medium enterprises (SME) sector in ASEAN which will contribute to the industrial development and efficiency of the region.
- accelerate the free flow of professional and other services in the region.
- promote financial sector liberalization and closer cooperation in money and capital market, tax, insurance and customs matters as well as closer consultations in macroeconomic and financial policies.
- accelerate the development of science and technology including information

technology by establishing a regional information technology network and centers of excellence for dissemination of and easy access to data and information.

- establish interconnecting arrangements in the field of energy and utilities for electricity, natural gas and water within ASEAN through the ASEAN Power Grid and a Trans-ASEAN Gas Pipeline and Water Pipeline, and promote cooperation in energy efficiency and conservation, as well as the development of new and renewable energy resources.
- enhance food security and international competitiveness of food, agricultural and forest products, to make ASEAN a leading producer of these products, and promote the forestry sector as a model in forest management, conservation and sustainable development.
- meet the ever increasing demand for improved infrastructure and communications by developing an integrated and harmonized trans-ASEAN transportation network and harnessing technology advances in telecommunication and information technology, especially in linking the planned information highways/multimedia corridors in ASEAN, promoting open sky policy, developing multi-modal transport, facilitating goods in transit and integrating telecommunications networks through greater interconnectivity, coordination of frequencies and mutual recognition of equipment-type approval procedures.
- enhance human resource development in all sectors of the economy through quality education, upgrading of skills and capabilities and training.
- work towards a world-class standards and conformance system that will provide a harmonized system to facilitate the free flow of ASEAN trade while meeting health, safety and environmental needs.
- use the ASEAN Foundation as one of the instruments to address issues of unequal economic development, poverty and socio-economic disparities.
- promote an ASEAN customs partnership for world class standards and excellence in efficiency, professionalism and service, and uniformity through harmonized procedures, to promote trade and investment and to protect the health and well-being of the ASEAN community.

- enhance intra-ASEAN trade and investment in the mineral sector and to contribute towards a technologically competent ASEAN through closer networking and sharing of information on mineral and geosciences as well as to enhance cooperation and partnership with dialogue partners to facilitate the development and transfer of technology in the mineral sector, particularly in the downstream research and the geosciences and to develop appropriate mechanism for these.

A. Community of Caring Societies

We envision the entire Southeast Asia to be, by 2020, an ASEAN community conscious of its ties of history, aware of its cultural heritage and bound by a common regional identity.

We see vibrant and open ASEAN societies consistent with their respective national identities, where all people enjoy equitable access to opportunities for total human development regardless of gender, race, religion, language, or social and cultural background.

We envision a socially cohesive and caring ASEAN where hunger, malnutrition, deprivation and poverty are no longer basic problems; where strong families as the basic units of society tend to their members particularly the children, youth, women and elderly; and where the civil society is empowered and gives special attention to the disadvantaged, disable and marginalized and where social justice and the rule of law reign.

We see well before 2020 a Southeast Asia free of illicit drugs, free of their production, processing, trafficking and use.

We envision a technologically competitive ASEAN competent in strategic and enabling technologies, with an adequate pool of technologically qualified and trained manpower, and strong networks of scientific and technological institutions and centers of excellence.

We envision a clean and green ASEAN with fully established mechanisms for sustainable development to ensure the protection of the region's environment, the sustainability of its natural resources, and the high quality of life of its peoples.

We envision the evolution in Southeast Asia of agreed rules of behavior and cooperative measures to deal with problems that can be met only on regional scale, including environmental pollution and degradation, drug trafficking, trafficking in women and children, and other transnational crimes.

We envision our nations being governed with the consent and greater participation of the people with its focus on the welfare and dignity of the human person and the good of the community.

We resolve to develop and strengthen ASEAN's institutions and mechanisms to enable ASEAN to realize the vision and respond to the challenges of the coming century. We also see the need for a strengthened ASEAN Secretariat with an enhanced role to support the realization of our vision.

An Outward-Looking ASEAN

We see an outward-looking ASEAN Playing a pivotal role in the international fora, and advancing ASEAN's common interests. We envision ASEAN having an intensified relationship with its Dialogue Partners and other regional organizations based on equal partnership and mutual respect.

Conclusion

We pledge to our peoples our determination and commitment to bringing this ASEAN Vision for the Year 2020 into reality.

DECLARATION OF ASEAN CONCORD II (BALI CONCORD II)

The Sultan of Brunei Darussalam, the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, the President of the Republic of Indonesia, the Prime Minister of the Lao People's Democratic Republic, the Prime Minister of Malaysia, the Prime Minister of the Union of Myanmar, the President of the Republic of the Philippines, the Prime Minister of the Republic of Singapore, the Prime Minister of the Kingdom of Thailand and the Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam;

RECALLING the Declaration of ASEAN Concord adopted in this historic place of Bali, Indonesia in 1976, the Leaders of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) expressed satisfaction with the overall progress made in the region;

NOTING in particular the expansion of ASEAN to ten countries in Southeast Asia, the deepening of regional economic integration and the impending accession to the Treaty of Amity and Cooperation (TAC) by States outside Southeast Asia;

CONSCIOUS of the need to further consolidate and enhance the achievements of ASEAN as a dynamic, resilient, and cohesive regional association for the well being of its member states and people as well as the need to further strengthen the Association's guidelines in achieving a more coherent and clearer path for cooperation between and among them;

REAFFIRMING their commitment to the principles enshrined in the ASEAN Declaration (Bangkok, 1967), the Declaration on Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (Kuala Lumpur, 1971), the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (Bali, 1976), the Declaration of ASEAN Concord (Bali, 1976), and the Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapons Free Zone (Bangkok, 1995);

COGNIZANT that the future of ASEAN cooperation is guided by the ASEAN Vision 2020, the Hanoi Plan of Action (1999-2004), and its succeeding Plans of Action, the Initiative for ASEAN Integration (IAI), and the Roadmap for the Integration of ASEAN (RIA);

CONFIRMING further that ASEAN Member Countries share primary responsibility for strengthening the economic and social stability in the region and ensuring their peaceful and progressive national development, and that they are determined to ensure their stability and security from external interference in any form or manner in order to preserve their national interest in accordance with the ideals and aspirations of their peoples;

REAFFIRMING the fundamental importance of adhering to the principle of non-interference and consensus in ASEAN cooperation;

REITERATING that the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) is an effective code of conduct for relations among governments and peoples;

RECOGNIZING that sustainable economic development requires a secure political environment based on a strong foundation of mutual interests generated by economic cooperation and political solidarity;

COGNIZANT of the interdependence of the ASEAN economies and the need for ASEAN member countries to adopt "Prosper Thy Neighbour" policies in order to ensure the long-term vibrancy and prosperity of the ASEAN region;

REITERATING the importance of rules-based multilateral trading system that is equitable and that contributes towards the pursuit of development;

REAFFIRMING that ASEAN is a concert of Southeast Asian nations, bonded together in partnership in dynamic development and in a community of caring societies, committed to upholding cultural diversity and social harmony;

DO HEREBY DECLARE THAT:

1. An ASEAN Community shall be established comprising three pillars, namely political and security cooperation, economic cooperation, and socio-cultural cooperation that are closely intertwined and mutually reinforcing for the purpose of ensuring durable peace, stability and shared prosperity in the region;
2. ASEAN shall continue its efforts to ensure closer and mutually beneficial integration among its member states and among their peoples, and to promote regional peace and stability, security, development and prosperity with a view to realizing an ASEAN Community that is open, dynamic and resilient;

3. ASEAN shall respond to the new dynamics within the respective ASEAN Member Countries and shall urgently and effectively address the challenge of translating ASEAN cultural diversities and different economic levels into equitable development opportunity and prosperity, in an environment of solidarity, regional resilience and harmony;
4. ASEAN shall nurture common values, such as habit of consultation to discuss political issues and the willingness to share information on matters of common concern, such as environmental degradation, maritime security cooperation, the enhancement of defense cooperation among ASEAN countries, develop a set of socio-political values and principles, and resolve to settle long-standing disputes through peaceful means;
5. The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) is the key code of conduct governing relations between states and a diplomatic instrument for the promotion of peace and stability in the region;
6. The ASEAN Regional Forum (ARF) shall remain the primary forum in enhancing political and security cooperation in the Asia Pacific region, as well as the pivot in building peace and stability in the region. ASEAN shall enhance its role in further advancing the stages of cooperation within the ARF to ensure the security of the Asia Pacific region;
7. ASEAN is committed to deepening and broadening its internal economic integration and linkages with the world economy to realize an ASEAN Economic Community through a bold, pragmatic and unified strategy;
8. ASEAN shall further build on the momentum already gained in the ASEAN+3 process so as to further draw synergies through broader and deeper cooperation in various areas;
9. ASEAN shall build upon opportunities for mutually beneficial regional integration arising from its existing initiatives and those with partners, through enhanced trade and investment links as well as through IAI process and the RIA;

10. ASEAN shall continue to foster a community of caring societies and promote a common regional identity;

DO HEREBY ADOPT:

The framework to achieve a dynamic, cohesive, resilient and integrated ASEAN Community:

A. ASEAN SECURITY COMMUNITY (ASC)

1. The ASEAN Security Community is envisaged to bring ASEAN's political and security cooperation to a higher plane to ensure that countries in the region live at peace with one another and with the world at large in a just, democratic and harmonious environment. The ASEAN Security Community members shall rely exclusively on peaceful processes in the settlement of intra-regional differences and regard their security as fundamentally linked to one another and bound by geographic location, common vision and objectives.
2. The ASEAN Security Community, recognizing the sovereign right of the member countries to pursue their individual foreign policies and defense arrangements and taking into account the strong interconnections among political, economic and social realities, subscribes to the principle of comprehensive security as having broad political, economic, social and cultural aspects in consonance with the ASEAN Vision 2020 rather than to a defense pact, military alliance or a joint foreign policy.
3. ASEAN shall continue to promote regional solidarity and cooperation. Member Countries shall exercise their rights to lead their national existence free from outside interference in their internal affairs.
4. The ASEAN Security Community shall abide by the UN Charter and other principles of international law and uphold ASEAN's principles of non-interference, consensus-based decision-making, national and regional resilience, respect for national sovereignty, the renunciation of the threat or the use of force, and peaceful settlement of differences and disputes.
5. Maritime issues and concerns are transboundary in nature, and therefore shall be addressed regionally in holistic, integrated and comprehensive manner. Maritime cooperation between and among ASEAN member countries shall contribute to the evolution of the ASEAN Security Community.
6. Existing ASEAN political instruments such as the Declaration on ZOPFAN, the TAC, and the SEANWFZ Treaty shall continue to play a pivotal role in the area of confidence building measures, preventive diplomacy and the approaches to conflict resolution.
7. The High Council of the TAC shall be the important component in the ASEAN Security Community since it reflects ASEAN's commitment to resolve all differences, disputes and conflicts peacefully.
8. The ASEAN Security Community shall contribute to further promoting peace and security in the wider Asia Pacific region and reflect ASEAN's determination to move forward at a pace comfortable to all. In this regard, the ARF shall remain the main forum for regional security dialogue, with ASEAN as the primary driving force.
9. The ASEAN Security Community is open and outward looking in respect of actively engaging ASEAN's friends and Dialogue Partners to promote peace and stability in the region, and shall build on the ARF to facilitate consultation and cooperation between ASEAN and its friends and Partners on regional security matters.
10. The ASEAN Security Community shall fully utilize the existing institutions and mechanisms within ASEAN with a view to strengthening national and regional capacities to counter terrorism, drug trafficking, trafficking in persons and other transnational crimes; and shall work to ensure that the Southeast Asian Region remains free of all weapons of mass destruction. It shall enable ASEAN to demonstrate a greater capacity and responsibility of being the primary driving force of the ARF.
11. The ASEAN Security Community shall explore enhanced cooperation with the United Nations as well as other international and regional bodies for the maintenance of international peace and security.
12. ASEAN shall explore innovative ways to increase its security and establish modalities for the ASEAN Security Community, which include, inter alia, the following elements: norms-setting, conflict prevention, approaches to conflict resolution, and post-conflict peace building.

B. ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)

1. The ASEAN Economic Community is the realisation of the end-goal of economic integration as outlined in the ASEAN Vision 2020, to create a stable, prosperous and highly competitive ASEAN economic region in which there is a free flow of goods, services, investment and a freer flow of capital, equitable economic development and reduced poverty and socio-economic disparities in year 2020.
2. The ASEAN Economic Community is based on a convergence of interests among ASEAN members to deepen and broaden economic integration efforts through existing and new initiatives with clear timelines.
3. The ASEAN Economic Community shall establish ASEAN as a single market and production base, turning the diversity that characterises the region into opportunities for business complementation making the ASEAN a more dynamic and stronger segment of the global supply chain. ASEAN's strategy shall consist of the integration of ASEAN and enhancing ASEAN's economic competitiveness. In moving towards the ASEAN Economic Community, ASEAN shall, inter alia, institute new mechanisms and measures to strengthen the implementation of its existing economic initiatives including the ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) and ASEAN Investment Area (AIA); accelerate regional integration in the priority sectors; facilitate movement of business persons, skilled labour and talents; and strengthen the institutional mechanisms of ASEAN, including the improvement of the existing ASEAN Dispute Settlement Mechanism to ensure expeditious and legally binding resolution of any economic disputes. As a first step towards the realization of the ASEAN Economic Community, ASEAN shall implement the recommendations of the **High Level Task Force on ASEAN Economic Integration as annexed.**
4. The ASEAN Economic Community shall ensure that deepening and broadening integration of ASEAN shall be accompanied by technical and development cooperation in order to address the development divide and accelerate the economic integration of Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam through IAI and RIA so that the benefits of ASEAN integration are shared and enable all ASEAN Member Countries to move forward in a unified manner.

5. The realization of a fully integrated economic community requires implementation of both liberalization and cooperation measures. There is a need to enhance cooperation and integration activities in other areas. These will involve, among others, human resources development and capacity building; recognition of educational qualifications; closer consultation on macroeconomic and financial policies; trade financing measures; enhanced infrastructure and communications connectivity; development of electronic transactions through e-ASEAN; integrating industries across the region to promote regional sourcing; and enhancing private sector involvement.

C. ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY (ASCC)

1. The ASEAN Socio-cultural Community, in consonance with the goal set by ASEAN Vision 2020, envisages a Southeast Asia bonded together in partnership as a community of caring societies.
2. In line with the programme of action set by the 1976 Declaration of ASEAN Concord, the Community shall foster cooperation in social development aimed at raising the standard of living of disadvantaged groups and the rural population, and shall seek the active involvement of all sectors of society, in particular women, youth, and local communities.
3. ASEAN shall ensure that its work force shall be prepared for, and benefit from, economic integration by investing more resources for basic and higher education, training, science and technology development, job creation, and social protection. The development and enhancement of human resources is a key strategy for employment generation, alleviating poverty and socio-economic disparities, and ensuring economic growth with equity. ASEAN shall continue existing efforts to promote regional mobility and mutual recognition of professional credentials, talents, and skills development.
4. ASEAN shall further intensify cooperation in the area of public health, including in the prevention and control of infectious diseases, such as HIV/AIDS and SARS, and support joint regional actions to increase access to affordable medicines. The security of the Community is enhanced when poverty and diseases are held in check, and the peoples of ASEAN are assured of adequate health care.

5. The Community shall nurture talent and promote interaction among ASEAN scholars, writers, artists and media practitioners to help preserve and promote ASEAN's diverse cultural heritage while fostering regional identity as well as cultivating people's awareness of ASEAN.
6. The Community shall intensify cooperation in addressing problems associated with population growth, unemployment, environmental degradation and transboundary pollution as well as disaster management in the region to enable individual members to fully realize their development potentials and to enhance the mutual ASEAN spirit.

We hereby pledge to our peoples our resolve and commitment to bring the ASEAN Community into reality and, for this purpose, task the concerned Ministers to implement this Declaration.

DONE in Bali, Indonesia, on the Seventh Day of October in the Year Two Thousand and Three.

For Brunei Darussalam
Haji Hassanal Bolkiah
Sultan of Brunei Darussalam

For the Kingdom of Cambodia
Samdech Hun Sen
Prime Minister

For the Republic of Indonesia

Megawati Soekarnoputri
President

For the Lao People's

Democratic Republic

Bounnhang Vorachith
Prime Minister

For Malaysia

Dr. Mahathir bin Mohamad
Prime Minister

For the Union of Myanmar

General Khin Nyunt
Prime Minister

For the Republic of the Philippines
Gloria Macapagal-Arroyo
President

For the Republic of Singapore
Goh Chok Tong
Prime Minister

For the Kingdom
of Thailand
Dr. Thaksin Shinawatra
Prime Minister

For the Socialist Republic of Viet Nam

Phan Van Khai
Prime Minister

SINGKATAN KATA

AAA	: ASEAN International Airports Association
AADC	: ASEAN - Australian Business Council
AACM	: ASEAN - Australian Consultation Meeting
AACPMS	: ASEAN Australian Cooperation Programme on Marine Science
AADCP	: ASEAN Aquaculture Development and Coordinating Programme
AAEC	: Agreement on ASEAN Energy Cooperation
AAF	: ASEAN - Australia Forum
AAF	: ASEAN Automotive Federation (ASEAN-CCI)
AAECP	: ASEAN - Australia Economic Cooperation Programme
AAIC	: ASEAN Aluminum Industry Club
AAMIP	: ASEAN - Australia Media & Information Programme
AAMLT	: ASEAN Association of Medical Laboratory Technologists
AAPH	: ASEAN Association for Planning and Housing
AAPSIP	: ASEAN - Australia Post Harvest System Improvement Project
AAR	: ASEAN Association for Radiologist
AARCB	: ASEAN Agricultural Research Coordinating Board (COFAF)
ABA	: ASEAN Bankers Association
ABAC	: ASEAN Business Advisory Council
ABC	: ASEAN Banking Council
ABC	: ASEAN Brussels Committee
ABF	: ASEAN Bintulu Fertilizer
ABIS	: ASEAN Business and Investment Summit
ABSNAT	: ASEAN Benchmark Sites Network for Agro technology Transfer
ACA	: ASEAN Contractors Organization
ACAP	: ASEAN Common Agricultural Policy (COFAF)
ACAT	: ASEAN Centre for Appropriate Technology (COST)
ACB	: ASEAN Committee in Beijing
ACBC	: ASEAN - Canada Business Council
ACC	: ASEAN - Canberra Committee
ACCM	: ASEAN - Canberra Consultative Meeting
ACCPMS	: ASEAN - Canada Cooperative Programme on Marine Science
ACCSM	: ASEAN Cooperation in Civil Service Matters
ACCTC	: ASEAN Center for Combating Transnational Crime
ACC-WG	: ASEAN - Canberra Committee Working Group
ACDM	: ASEAN Committee on Disaster Management
ACE	: ASEAN Confederation of Employers
ACE	: ASEAN Centre for Energy
ACEDAC	: ASEAN Centre for the Development of Agricultural Cooperative

ACF : ASEAN Cardiologists Federation
 ACF : ASEAN Constructors Federation
 ACF : ASEAN Cultural Fund
 ACIC : ASEAN Ceramic Industry Clubs (ASEAN-CCI)
 ACITAR : ASEAN Customs Institute for Training and Research
 ACM : ASEAN Committee in Moscow
 ACMB : ASEAN Compliance and Monitoring Body
 ACMECS : Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy
 ACO : ASEAN Cooperative Organization
 ACPA : ASEAN Consumers' Protective Agency
 ACPL : ASEAN Cable ship Private Limited
 ACPHP : ASEAN Crops Post Harvest Programme
 ACRAQS : ASEAN Common Regional Animal Quarantine Centre
 ACRCS : ASEAN Conference on Reforms of Civil Service
 ACS : ASEAN College of Surgeons
 ACS : ASEAN Committee in Seoul
 ACT : ASEAN Committee in Tokyo
 ACT : ASEAN Council of Teachers
 ACT : ASEAN Consultation to Solve Trade and Investment Issues
 ACTT : ASEAN Communication Team for Tourism
 ACTS : ASEAN Communication and Transport System (COTAC)
 ACTS : ASEAN Cargo Transportation Study
 ACTU : ASEAN Council of Trade Union
 ACU : ASEAN Cooperation Unit
 ACW : ASEAN Committee in Wellington
 ACWO : ASEAN Confederation of Women Organization
 ADB : ASEAN Development Bank
 ADBC : ASEAN Data Bank on Commodities
 ADCF : ASEAN Development Cooperation Forum
 ADCP : ASEAN - Australia Development Cooperation Programme
 ADE : Automated Data Exchange
 ADEP : ASEAN Development Education Programme (COSD)
 ADF : ASEAN Development Fund
 ADPC : Agriculture Development Planning Centre (COFAF)
 AEC : ASEAN Economic Community
 AEC PoA : ASEAN Economic Community Plan of Action
 AEGC : ASEAN Expert Group on Coal
 AEGDM : ASEAN Experts Group on Disasters Management
 AEGE : ASEAN Expert Group on Environment
 AEGND : ASEAN Expert Group on National Disasters
 AEEMTRC : ASEAN-EC Energy Management, Training and Research Centre
 AEA : ASEAN Execute Agency

AEBF : ASEAN Energy Business Forum
 AEM : ASEAN Economic Ministers
 AEMEC : ASEAN Economic Ministers on Energy Cooperation
 AEMM : ASEAN - EC Ministerial Meeting
 AEMMEC : ASEAN Economic Ministers Meeting on Energy Cooperation
 AEMTRC : ASEAN Energy Management Training and Research Centre
 AEROSAT : Aeronautical Satellite Programme (COTAC)
 AERR : ASEAN Emergency Rice Reserve
 AFA : ASEAN Federation of Accountants
 AFAA : ASEAN Federation of Automotive Association
 AFAMM : ASEAN Federation of Agricultural Machinery Manufacturers
 AFAS : ASEAN Framework Agreement on Services
 AFC : ASEAN Finance Corporation
 AFC : ASEAN Food Conference
 AFCB : ASEAN Fisheries Consultative Body
 AFCEM : ASEAN Federation of Cement Manufacturers (ASEAN-CCI)
 AFDC : ASEAN Fisheries Development Centre
 AFDM : ASEAN Finance Deputies' Meeting
 AFEEC : ASEAN Federation of Electrical Engineering Contractors
 AFEO : ASEAN Federation of Engineering Organization
 AFF : ASEAN Film Festival
 AFF : ASEAN Fisheries Federation
 AFF : ASEAN Football Federation
 AFFMA : ASEAN Federation of Furniture Manufacturers Association
 AFFPI : ASEAN Federation of Food Processing Industries (ASEAN-CCI)
 AFGM : ASEAN Federation of Glass Manufacturers (ASEAN-CCI)
 AFHB : ASEAN Food Handling Bureau (COFAF)
 AFJ : ASEAN Federation of Jurists
 AFMA : ASEAN Federation of Mining Association
 AFMM : ASEAN Finance Ministers Meeting
 AFOC : ASEAN Forum on Coal
 AFPMH : ASEAN Federation of Psychiatric and Mental Health
 AFSIP : ASEAN Food Safety Implementation Plan
 AFSIS : ASEAN Food Security Information System
 AFSSO : ASEAN Food Standard Office
 AFSR : ASEAN Food Security Reserve (COFAF)
 AFSRB : ASEAN Food Security Reserve Board (COFAF)
 AFTA : ASEAN Free Trade Area
 AFTA-CER FTA : AFTA-Closer Economic Relation Free Trade Area
 AFTEX : ASEAN Federation of Textile Industries
 AGC : ASEAN Geneva Committee

AGCC : ASEAN Gas Consultative Council
 AGPP : ASEAN Grain Post-Harvest Programme
 AGROTECH : ASEAN Small-scale Agro-Engineering Post-harvest Technology Project
 AHIPSA : Animal Health and Production Information System for ASEAN
 AHPADA : ASEAN Handicraft Promotion and Development Association
 AHPP : ASEAN Heads of Population Programme
 AHRDP : ASEAN Human Resources Development Programme
 AHTF : ASOEN Haze Technical Task Force
 AHTN : ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature
 AHTTF : ASOEN Haze Technical Task Force
 AIA : ASEAN Investment Area
 AIC : ASEAN Islamabad Committee
 AIC : ASEAN Industrial Complementation
 AIC : ASEAN Industrial Council
 AICO : ASEAN Industrial Cooperation
 AICs : ASEAN Insurance Commissioners
 AIFM : ASEAN Institute of Forest Management
 AII : ASEAN Information Infrastructure
 AIJVs : ASEAN Industrial Joint Ventures
 AIMS : ASEAN Interconnection Master Plan Study
 AIP : ASEAN Industrial Projects
 AIPO : ASEAN Inter-Parliamentary Organization
 AIREP : ASEAN Routine Weather Report From Aircraft in Flight Programme
 AISIF : ASEAN Iron and Steel Industry Federation
 AISP : ASEAN Integration System of Preference
 AJDF : ASEAN - Japan Development Fund
 AJSTD : ASEAN Journal on Science and Technology for Development
 AJVP : ASEAN Joint Venture Project
 ALA : ASEAN Law Association
 ALC : ASEAN - London Committee
 ALINE : ASEAN Labor Information Network
 ALMM : ASEAN Labor Ministers Meeting
 APBSD : ASEAN Policy Blueprint for SMEs Development
 AMA : ASEAN Mining Association
 AMAF : ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry
 AMBDC : ASEAN Mekong Basin Development Cooperation
 AMPC : ASEAN Minerals Plan Cooperation
 AME : ASEAN Ministers of the Environment
 AMEM : ASEAN Ministers on Energy Meeting
 AMIA : ASEAN Music Industry Association
 AMIS : ASEAN Mineral Information System

AMM : ASEAN Ministerial Meeting
 AMMH : ASEAN Ministerial Meeting on Haze
 AMMM : ASEAN Ministerial Meeting on Minerals
 AMMTC : ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime
 AMPCC : ASEAN Marine Pollution Control Centre
 AMPPA : ASEAN Motion Picture Producers Association
 AMST : ASEAN Ministers of Science and Technology
 AMTIC : ASEAN Materials Technology Information Centre
 ANDC : ASEAN New Delhi Committee
 ANDEX : ASEAN Network of Development Education Centres (COSD)
 ANDIN : ASEAN Natural Disasters Information Network
 ANEX : ASEAN News Exchange
 ANS : ASEAN Neurological Society
 ANWRA : ASEAN Network of Water Resources Agencies
 ANYC : ASEAN New York Committee
 ANZAP : ASEAN - New Zealand A forestation Project
 ANZCERTA : Australian - New Zealand Closer Economic Relation Trade
 AOA : ASEAN Orthopedic Association
 AOC : ASEAN Ottawa Committee
 AOFSCN : ASEAN Optical Fiber Submarine Cable Network
 APA : ASEAN Puppetry Association
 APA : ASEAN People's Assembly
 APAA : ASEAN Port Authorities Association
 APAEC : ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation
 APC : ASEAN Promotion Centre on Trade, Investment and Tourism
 APC : ASEAN Paris Committee
 APC-HRD : ASEAN -Pacific Cooperation on Human Recourse
 APCU : ASEAN Populations Coordinating Unit (COSD)
 APDRTC : ASEAN Poultry Disease Research and Training Centre
 APEX : ASEAN Post-Harvest Exchange Regional Information Newt
 APF : ASEAN Pediatric Federation
 APFME : Agricultural Project Formulation, Monitoring and Evaluation
 APHCN : ASEAN Plant Health Cooperation Network
 APIRLAS : ASEAN Programmes on Industrial Relations and Labour Study
 APLAC : Asia-Pacific Laboratory Accreditation Cooperation
 APP : ASEAN Population Programme (COSD)
 APPS : ASEAN Pioneer Project Scheme
 APSA : ASEAN Petroleum Security Agreement
 APPIC : ASEAN Paper and Pulp Industry Club (ASEAN-CCI)
 ARC : ASEAN Reinsurance Corporation
 ARCBC : ASEAN Regional Centre of Biodiversity Conservation
 ARClE : ASEAN Resource Centre on Information Exchange

ARDCMR : ASEAN Regional Development Centre in Mineral Resources
 ARF : ASEAN Regional Forum
 ARGMC : ASEAN Railway General Managers' Conference
 ARSMC : ASEAN Regional Specialized Meteorological Centre
 ARSPP : ASEAN Regional Studies Promotion Programme
 ASC : ASEAN Standing Committee
 ASC : ASEAN Steel Committee
 ASC : ASEAN Security Community
 ASC PoA : ASEAN Security Community Plan of Action
 AScC : ASEAN Socio-cultural Community
 AScC PoA : ASEAN Socio-cultural Community Plan of Action
 ASCH & N : ASEAN Sub-Committee, on Health & Nutrition
 ASCCARS : ASEAN Sub-Committee on Civil Aviation and Related Services
 ASCLA : ASEAN Sub-Committee on Labour Affairs
 ASCOE : ASEAN Sub-Committee on Education
 ASCOPE : ASEAN Council on Petroleum
 ASCW : ASEAN Sub-Committee on Women
 ASDF : ASEAN Social Development Fund
 ASEAN : Association of South East Asian Nations
 ASEAN-CCI : ASEAN Chambers of Commerce and Industry
 ASEANCOM : ASEAN Council of Museum
 ASEANTA : ASEAN Tourism Association
 ASEAN NTOs : ASEAN National Tourism Organizations
 ASEP : ASEAN Environmental Programme
 ASF : ASEAN Science Fund
 ASLOM : ASEAN Senior Law Official Meeting
 ASMC : ASEAN Specialized Meteorological Centre
 ASO : Annual Security Outlook
 ASOD : ASEAN Senior Officials on Drug Matters
 ASOEN : ASEAN Senior Officials on Environment
 ASOF : ASEAN Senior Officials on Forestry
 ASOMM : ASEAN Senior Official Meeting on Minerals
 ASP-ATMPH : ASEAN Scholarship Programme for Applied Tropical Medicine
 ASP : ASEAN Surveillance Process
 ASPR : ASEAN Surveillance Process Report
 ASSC : ASEAN Schools Sport Council
 ASTNET : ASEAN Science and Technology Network
 ASTP' : Australian System of Trade Preferences
 ASTW : The ASEAN Science and Technology Week
 ASW : ASEAN Sub Committee on Women
 ASY : ASEAN Sub-Committee on Youth
 ATA : ASEAN Tourism Agreement

ATC : ASEAN Training Centre
 ATEC : ASEAN Treaty of Economic Cooperation
 ATF : ASEAN Tourism Forum
 ATIC : ASEAN Tourism Information Centre
 ATC : ASEAN Timber Technology Centre
 ATM : ASEAN Tourism Ministers
 ATRC : ASEAN Telecommunications Regulators' Council
 ATUC : ASEAN Trade Union Council
 ATWG : ASEAN Technical Working Group
 AUN : ASEAN University Networking
 AUCPMS : ASEAN-US Cooperation Programme on Marine Science
 AUI : ASEAN-US Initiative
 AUSC : ASEAN-US University Sport Council
 AVA : ASEAN Values Association
 AVIST : ASEAN Virtual Institute of Science and Technology
 AVRDC : ASEAN-Asia Vegetable Research and Development Center
 AWC : ASEAN Washington Committee
 AWGCM : ASEAN Working Group on Customs Matters
 AWGCMC : ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment
 AWGMEA : ASEAN Working Group on Multilateral Environmental Agreements
 AWGNBC : ASEAN Working Group on Nature Conservation and Biodiversity
 AWGTM : ASEAN Working Group on Tax Matters
 AWP : ASEAN Women's Programme (COSD)
 BAAIC : Basic Agreement on ASEAN Industrial Complementation
 BAAJV : Basic Agreement on ASEAN Industrial Joint Ventures
 BAC : Bonn ASEAN Committee
 BADC : Brackishwater Aquaculture Development Centre
 BBC : Brand-to-Brand Complementation
 BCM : Business Council Meeting
 BIMP-EAGA : Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines ' East ASEAN Growth Area
 BOP : Board of Planners
 BRMM-CT : Bali Regional Ministerial Meeting on Counter Terrorism
 BSA : Bilateral Swap Arrangement
 BSE : Bovine Spongiform Encephalopathy
 BTS : Brokers Telegraph System
 CADEX : Council of ASEAN Directors on Agricultural Extension
 CAJ : Confederation on ASEAN Journalists
 CAYC : Committee on ASEAN Youth Cooperation
 CBMs : Confidence Building Measures
 CBWM : Common Border Whole Sale Market
 CCC : Customs Cooperation Council

CCCA	: Coordinating Committee on CEPT for AFTA
CCCN	: Customs Cooperation Council Nomenclature
CCOP	: Coordinating Committee for Coastal and Offshore Geoscience Programmes in East and Southeast Asia
CCS	: Coordinating Committee on Services
CCEM	: CEPT Concession Exchange Manual
CEPs	: Closer Economic Partnerships
CEPT	: Common Effective Preferential Tariff
CERTs	: Computer Emergency Response Teams
CEVEST	: Centre for Vocational and Extension Service Training
CGC	: Coordinating Group on Crops
CGDK	: Coalition Government of Democratic Kampuchea
CGFI	: Coordinating Group on Fisheries
CGFO	: Coordinating Group on Forestry
CGL	: Coordinating Group on Livestock
CIAST	: Centre for Instructors and Advanced Skills Training
CIDA	: Canadian International Development Agency
CISMA	: Centre for Irrigation System Management for ASEAN
CITES	: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
CLV	: Cambodia, Laos, Vietnam
CLMV	: Cambodia, Laos, Myanmar, and Viet Nam
CMI	: Chiang Mai Initiative
CMO	: Comprehensive Multidisciplinary Outline
COCI	: Committee on Culture and Information
COFAB	: Committee on Finance and Banking
COFAF	: Committee on Food, Agriculture and Forestry
COIME	: Committee on Industry, Minerals and Energy
COSD	: Committee on Social Development
COST	: Committee on Science and Technology
COTAC	: Committee on Transportation and Communications
COTT	: Committee on Trade and Tourism
CR	: Conflict Resolution
CRC	: Convention on the Rights of the Child
CRM	: Customs Reform and Modernisation
DOC	: Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea
DSM	: ASEAN Dispute Settlement Mechanism
EABC	: East ASEAN Business Council
EAS	: East Asia Summit
EE&C-SSN	: Energy Efficiency and Conservation - Sub Sector Network
EEZ	: Exclusive Economic Zones
EID	: Emerging Infectious Diseases

EPG	: Eminent Person Group
ESI	: Electric Supply Industry
FA-AIA	: Framework Agreement on ASEAN Investment Area
FDI	: Foreign Direct Investment
FFRT	: The Fifth Freedom Rights of Traffic
FLEG	: Forest Law Enforcement and Governance
FMD	: foot and mouth diseases
GE	: General Exception
GMS	: Greater Mekong Sub-region
HAPUA	: Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities
HLTF	: High Level Task Force
HPA	: Hanoi Plan of Action
HS	: Harmonized System
IAEA	: International Atomic Energy Agency
IAI	: Initiative for ASEAN Integration
ICT	: Information and Communication Technologies
IL	: Inclusion List
ILAC	: International Laboratory Accreditation Cooperation
IMO	: International Maritime Organisation
IMS-GT	: Indonesia, Malaysia, Singapore-Growth Triangle
IMT-GT	: Indonesia, Malaysia, Thailand-Growth Triangle
IPM	: Integrated Pest Management
IPR	: Intellectual Property Rights
ISIC	: International Standard Industrial Classification for All Economic Activities
ISIS	: ASEAN Institute for Strategic and International Studies
ISM	: Intersessional Meeting
ISM on CT-TC	: ISM on Counter-Terrorism and Transnational Crime
ISM-DR	: ISM on Disaster Relief
ITS	: International Trade in Services
JCLEC	: Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation
JCM	: Joint Consultative Meeting
JMM	: Joint Ministerial Meeting
LSEs	: Large-Scale Enterprises
MOP	: Margin of Preferences
MRAs	: Mutual Recognition Arrangements
NEAC	: National Economic Action Council
NFPWG FPPS	: National Focal Points Working Group for Forest Products Promotion Scheme
NRSE-SSN	: New and Renewable Sources of Energy -Sub Sector Network

NSM	: National Secretariats Meeting
NTBs	: Non-Tariff Barriers
NTMs	: Non-Tariff Measures
PCA	: Customs Post Clearance Audit
PD	: Preventif Diplomasi
PoA	: Plan of Action
PSI	: Pollutant Standard Index
PTA	: Preferential Trading Arrangement
RIA	: Roadmap for the Integration of ASEAN
ROP	: Rule of Procedures
RTAs	: Regional Trading Arrangements
SAARC	: South Asian Association for Regional Cooperation
SCB	: Sub-Committee on Biotechnology
SCC	: Sub-Committee on Climatologic
SCCAN	: Special Coordinating Committee of ASEAN
SCCARS	: Sub-Committee on Civil Aviation and Related Service
SCFST	: Sub-Committee on Food Science & Technology
SCIRD	: Sub-Committee on S & T Instructure and Resources Development
SCLT	: Sub-Committee on Land Transportation
SCMG	: Sub-Committee on Meteorology & Geophysics
SCMIT	: Sub-Committee on Microelectronic and Information Technology
SCMS	: Sub-Committee on Marine Sciences
SCMST	: Sub-Committee on Materials Science & Technology
SCNCER	: Sub-Committee on Non Conventional Energy Research
SCOE	: Sub-Committee of Education
SCOP	: Sub-Committee on Protein
SCOT	: Sub-Committee on Tourism
SCPT	: Sub-Committee on Posts and Telecommunication
SCSP	: Sub-Committee on Shipping and Ports
SDFZ	: Specific Disease Free Zone
SEAFDEC	: Southeast Asian Fisheries Development Center
SEAMEO	: South East Asian Ministers of Education Organization
SEAMEO-RELC	: South East Asian Ministers of Education Organization Regional English Language Centre
SEANWFZ	: South East Asia Nuclear Weapon Free Zone
SEASEE	: Southeast Asia Association on Seismology and Earthquake Engineering
SEOM	: Senior Economic Officials Meeting
SFM	: Sustainable Forest Management
SIAP	: ASEAN Strategic Investment Action Plan

SICT	: Standard International Trade Classification
SKRL	: Singapore-Kunming Rail Link
SL	: Sensitive List
SLOM	: Senior Legal Officials Meeting
SLOM	: Senior Labour Officials Meeting
SME	: Small and Medium Enterprises
SMEs	: Small and Medium Enterprises
SMI	: Small and Medium Industry
SNOC	: Singapore National Oil Company
SOER	: ASEAN State of the Environment Report
SOM	: Senior Officials Meeting
SOMEAC	: Senior Officials Meeting on Energy Cooperation
SOME	: Senior Officials Meeting on Energy
SOMHD	: Senior Officials Meeting on Health Development
SOMRDPE	: Senior Officials Meeting on Rural Development and Poverty Eradication
SOMSWD	: Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development
SOMY	: Senior Officials Meeting on Youth
SPS	: Sanitary and Phytosanitary
SRFA	: Sub - Regional Fire Fighting Arrangements
STABEX	: Stabilization of Export
STOM	: Senior Transport Officials Meeting
STO-MTN	: Senior Trade Officials on Multilateral Trading Negotiations
TAC	: Treaty of Amity and Co-operation
TAGP	: Trans-ASEAN Gas Pipeline
TCPHC	: Training Centre for Primary Health Care
TELS	: Temporary Exclusion Lists
TELSOM	: Telecommunication Senior Officials Meeting
TIPP	: Trade and Investment Promotion Programme
TNC	: Trade Negotiation Committee
TPNG	: Trade Preference Negotiating Group (COTT)
TWG	: Timber Working Group
TWG	: Technical Working Group
UAP	: Unprocessed Agriculture Product
UN	: United Nations
UNCED	: United Nations Conference on Environment and Development
UNDCP	: United Nations Drug Control Programme
UNDP	: United Nations Development Program
UNFPA	: United Nations Fund for Population Activities
UNINET	: University Networking
VAC	: Visit ASEAN Campaign
VADP	: Veterinary Administration Development Programme

VAP	: Vientiane Action Programme
VAY	: Visit ASEAN Year
WCO	: World Customs Organisation
WGEFMMP	: Working Group on Environment-Friendly Mining and Mineral Processing
WGFAF	: Working Group on Food, Agriculture and Forestry
WGIC	: Working Group on Industrial Cooperation
WGMD	: Working Group on Mineral Data Base
WGTIM	: Working Group on Trade and Investment in Minerals
WGTM	: Working Group on Training in Mineral
WTO	: World Trade Organization
ZOPFAN	: Zone of Peace, Freedom and Neutrality
WG-FTRD	: Working Group on Food Technology Research and Development Projects
WGMST	: Working Group on Material Science and Technology
WG-NCGR	: Working Group on Non-Conventional Research Project

TIM PENYUSUN
BUKU “ASEAN SELAYANG PANDANG 2007”
Edisi ke-17

Pelindung :

Dian Triansyah Djani
Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN

Ketua :

M a y e r f a s
Sekretaris Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN

Kordinator Bidang :

Rossalis R. Adenan, Rahmat Azhari (*Kerjasama Ekonomi*);
Aditya Timoranto, Ance Meilani (*Kerjasama Politik dan Keamanan*);
Sanga Panggabean, Satrio Pringgodhany (*Kerjasama Fungsional*);
Lingga Setiawan, Emilia H. Elisa (*Mitra Wicara Antar Kawasan*);

Editor & Ilustrasi :

Achmad Djabatmiko, Sidum Trio Indarto, Dara Yusilawati,
Mita Sari Puji Utami



DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA ASEAN
DEPARTEMEN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
2007